

**SEKTOR UNGGULAN YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAERAH BELAKANG
DI KABUPATEN ALOR**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

ALEXANDER SARENGKELANG
L4D003076



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**SEKTOR UNGGULAN YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAERAH BELAKANG
DI KABUPATEN ALOR**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

ALEXANDER S SARENGKELANG
L4D003076

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal, 29 Maret 2005

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Maret 2005

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Dra. Bitta Pigawati, MT

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro



Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, Maret 2005

ALEXANDER S SARENG KELANG
NIM L4D003076

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3723/T/MPUR/4
tgl.	10 Juni '05

"Tak ada kesulitan yang dapat dikalahkan oleh kasih yang dalam; tak ada pintu yang tak akan dibukakan oleh kasih yang dalam; tak ada dinding yang tak dapat dihancurkan oleh kasih yang dalam; tak ada dosa yang tak dapat ditebus oleh kasih yang dalam; tak peduli betapa besarnya kesulitan; betapa besarnya harapan; betapa besarnya kesalahan" (Toserba Surgawi, Kanisius 2003, film, 184)

Tesis ini kupersembahkan untuk;

Ibu Pertiwi dan Nusa Kenari tercinta yang sedang tercabik bencana kemanusiaan oleh guncangan alam yang memprihatinkan, semoga kita dapat menatap kembali masa depan dan melepaskan semua beban masa silam dan pencerahanpun akan datang. Kenangan buat Almarhum/mah kedua orang tua, semua saudaraku yang selalu memberikan spirit, Bunda Sinning yang memberikan doa dan Isteriku tercinta Maria Ruth Sulastri yang selalu setia mendampingiku dalam suka dan duka.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Atas tuntunan rahmat dan hikmat yang dianugerahkan sehingga penyusunan Tesis dengan judul “Sektor Unggulan yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang di Kabupaten Alor” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini juga tidak lepas dari bantuan serta dukungan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yang telah memberikan dukungan biaya dan kesempatan Tugas Belajar untuk mengikuti Pendidikan Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc selaku Ketua Jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sekaligus sebagai pembimbing utama yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran.
3. Dra. Bitta Pigawati, MT selaku pembimbing pendamping atas waktu, masukan dan kesabarannya membimbing penulis menyelesaikan tulisan ini.
4. Segenap Dosen pengajar dan karyawan/karyawati pada Program MPPWK Universitas Diponegoro yang telah ikut membantu kelancaran studi dengan suasana kekeluargaan yang tinggi.
5. Semua rekan-rekan MPPWK III atas kebersamaan dan persahabatannya dalam suka dan duka selama menempuh perkuliahan.
6. Terutama kenangan akan almarhum dan almarhumah orang tua tercinta, Ibu mertua, Isteri tercinta dan saudara-saudaraku, yang selalu mendoakan keberhasilanku.

Akhir kata, penulis menyadari akan keterbatasan bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu masukan dan saran yang lahir dari hati yang tulus demi penyempurnaan tesis ini akan penulis terima dengan senang hati. Demikian semoga tesis ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Alor terhadap pembangunan daerah yang lebih berkualitas.

Semarang, Maret 2005

Penulis
L4D003076

SEKTOR UNGGULAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAERAH BELAKANG DI KABUPATEN ALOR

Oleh: Alexander S Sareng Kelang

ABSTRAKSI

Kabupaten Alor secara geografi sangat strategis dan berpotensi sebagai salah satu pintu gerbang timur Indonesia. Peran Kota Kalabahi sebagai daerah otonom dalam menjalankan prinsip desentralisasi ke depan dituntut untuk dapat mengembangkan kemandirian melalui berbagai potensi sumber daya yang dimiliki bagi pembangunan daerah secara berkesinambungan untuk mewujudkan peningkatan percepatan pembangunan pada Kawasan Timur Indonesia yang masih tertinggal.

Perkembangan antar wilayah di kabupaten Alor menunjukkan adanya fenomena kesenjangan yang tidak merata antara pusat kota Kalabahi dan daerah belakang. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kontribusi sektor unggulan yang dari waktu ke waktu berpengaruh terhadap perkembangan daerah belakang yang mengalami stagnasi. Hal tersebut disebabkan oleh pemusatan pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi, serta pendapatan perkapita antar wilayah Kecamatan tidak seimbang yang terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan jumlah keluarga miskin yang lebih terkonsentrasi pada daerah belakang.

Berdasarkan masalah tersebut maka diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan daerah belakang di Kabupaten Alor.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan deskriptif dengan mengkombinasikan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sebagai suatu proses pemecahan masalah yang akan dilakukan dengan upaya menjawab permasalahan melalui beberapa alat analisis yang di gunakan. Melalui identifikasi ketersediaan fasilitas pelayanan umum dari masing-masing wilayah akan diketahui struktur wilayah dengan alat analisis Skalogram, yang dilanjutkan dengan kajian wilayah pengaruh melalui analisis Indeks Gravitasi, Identifikasi tingkat kesenjangan antar pusat pertumbuhan dengan daerah belakang menurut PDRB kecamatan dalam kurun waktu 5 tahun untuk mengetahui ambang batas kesenjangan dengan alat analisis Indeks Williamson, dan identifikasi sektor basis yang memiliki potensi unggulan melalui alat analisis Location Qoutient (LQ). Selanjutnya akan dikaji terhadap pengaruh sektor unggulan yang dimiliki dari masing-masing wilayah bagi pertumbuhan wilayah belakang dengan menggunakan alat analisis Regresi berganda.

Secara Umum potensi sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan memberikan kontribusi utama dalam mendorong pertumbuhan wilayah di satu sisi, namun dalam tingkat keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan sangat rentan terhadap daerah marginal yang masih terbelakang. Kondisi ini akan menjadi tantangan bila kurang mendapat perhatian dalam konsep pengembangan wilayah belakang secara terintegrasi.

Untuk itu diperlukan upaya terpadu sebagai Rekomendasi dalam kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi agrobisnis pada kekuatan potensi lokal yang dimiliki oleh sentra-setra produksi daerah belakang sebagai sebuah sistim yang secara sinergis akan dapat mengurangi tingkat kesenjangan dan pemerataan pembangunan sebagai landasan konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Alor

Kata Kunci: Sektor Unggulan, Daerah Belakang.

THE EFFECTS OF THE SUPREME SECTORS TOWARDS THE GROWTH OF HINTERLANDS IN ALOR REGENCY

Oleh: Alexander S Sareng Kelang

Abstracts

Geographically, alor regency wins a very strategic and potential area to serve as one of the main eastern gate of Indonesia which borders with Timor Leste Nation. Kalabahi city as the self autonomous region in the way of decentralization is upcomingly required to be able to develop independency through all its potential resources for the sake of regional or local development continuously in order to speed up some growing areas of Indonesian eastern zone.

Interregional development in alor regency has so far indicated the presence of uneven conditional gap between the town center of kalabahi and its hinterlands which is presumably much affected by the current unbalanced centralized development of economic, social structure and infrastructures, and income per capita as well as high percentage of poverty which is much concentrated on hinterlands.

Due to such problems above, a review towards the economic growth is really needed. It is in order to measure how far the economic growth through its supreme sectors has increased the development of hinterlands in alor regency.

Analysis methodologies are applied on descriptive approach that combines qualitative and quantitative methods into one. Regional economic development through identifying the availability of infrastructures is a means to find out the regional structures by means of an analysis tool called scalogram. The identification of gap rate between the town center and hinterlands according to sub-district PDRB over the past five years is in favor of finding out gap threshold by means of analysis instrument Williamson Index and identification of basic sectors that have supreme potency by Location Quotient (LQ) will later be reviewed towards the effects of the supreme sectors that belong to each regions by means of multiplied regression analysis.

Based on such review analysis on the increasing growth of hinterlands, the result shows interdependent development among the sectors in which the productivity of agriculture sectors seems to provide a very significant contribution in enhancing the growth of hinterlands. Thus, in the developing concept of hinterlands, an integrated mode of growth center focusing on the demand side regional development is required which can integrate the potency of supreme sectors of hinterland into the hierarchical system of zone centers. In addition, by the presence of more even distribution of social and economic infrastructures, the growth of hinterlands could be well backed up that will later reduce the gap and spread a more even development as the base of local planning concept in alor regency.

Possible and necessary step Recommended to back up more the growth of hinterland is prioritize a great deal of supreme sectors of the regency agribusiness oriented that a sinergical system minimizing the gap rate serve as and enabling a more even development as a base concept for Alor Regency.

Keyword: *The Supreme Sector, Hinterlands.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERNYATAAN	iii
LEMBARAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR PETA	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Sasaran Studi	8
1.3.1 Tujuan Studi	8
1.3.2 Sasaran Studi	8
1.4 Ruang Lingkup	9
1.4.1 Ruang Lingkup Subtansial	9
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial	10
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metodologi Penelitian	16
1.6.1 Pendekatan Studi	16
1.6.2 Metode Pelaksanaan Studi	16
1.6.3 Kebutuhan Data	17
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	18
1.6.5 Metode dan Teknik analisa	19
1.6.5.1 Analisis Skalogram	20
1.6.5.2 Analisis Indeks Gravitasi	21
1.6.5.3 Analisis Indeks Williamson	22
1.6.5.4 Analisis Location Quotient	23
1.6.5.5 Analisis Regresi	24
1.6.5.6 Kerangka Analisa	27
1.7 Sistematika Penulisan	28
BAB II PERAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN BASIS EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH BELAKANG KAJIAN PUSTAKA)	29
2.1 Pengertian Umum Wilayah dan Daerah	29
2.2 Kajian Pertumbuhan Wilayah	31
2.3 Proses Pertumbuhan Wilayah	34

2.4 Perkembangan Wilayah Belakang.....	37
2.4.1 Pengertian dan Kajian Wilayah Belakang.....	37
2.4.2 Peran Sektor Potensial dan Strategis (Sektor Unggulan)	38
2.4.3 Peran Daerah Belakang dalam Perkembangan Kota	41
2.5 Peran Kota dalam Perkembangan Wilayah	43
2.6 Model Kajian Pengaruh Pertumbuhan Daerah Belakang	48
2.7 Ringkasan Kajian Teori.....	52
BAB III GAMBARAN PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN	
ALOR	56
3.1 Perkembangan Kabupaten Alor Dalam Struktur Wilayah Nasional	56
3.2 Perkembangan Wilayah Di Kabupaten Alor	58
3.3 Gambaran Wilayah Studi.....	63
3.3.1 Kondisi Fisik Geografi dan Topografi	63
3.3.2 Iklim dan Curah Hujan.....	65
3.3.3 Daerah Irigasi dan Tata Guna Lahan.....	67
3.3.4 Kependudukan.....	70
3.3.5 Kondisi Sosial Ekonomi.....	74
3.3.5.1 Aspek Sosial	74
3.3.5.2 Aspek Perekonomian	79
3.3.6 Sarana Transportasi	82
3.3.6.1 Sarana Transportasi Darat.....	83
3.3.6.2 Transportasi Laut	84
3.3.6.3 Transportasi Udara.....	85
BAB IV ANALISIS SEKTOR UNGGULAN TERHADAP	
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAERAH BELAKANG..	86
4.1 Analisis Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Alor	87
4.2 Analisis Wilayah Pengaruh	91
4.3 Analisis Tingkat Kesenjangan Antar Wilayah	96
4.4 Analisis Potensi Sektor Strategis Kabupaten Alor	99
4.4.1 Analisis Sektor Ekonomi Basis Wilayah	99
4.4.2 Sektor Unggulan yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Daerah	
Belakang.....	112
4.4.3 Kontribusi Sektor Unggulan yang Berpengaruh terhadap	
Pertumbuhan Daerah Belakang.....	146
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	154
5.1 Temuan Hasil Penelitian.....	154
5.2 Kesimpulan.....	158
5.3 Rekomendasi.....	162
Daftar Pustaka.....	165
Daftar Riwayat Hidup	169

LAMPIRAN A. Perhitungan Hierarki Kota	
TABEL A.1	: Kelengkapan Fasilitas Sosial Ekonomi..... 170
TABEL A.2	: Skalogram Guttman 171
LAMPIRAN B. Perhitungan Tingkat Kesenjangan Antar Wilayah di Kabupaten Alor Berdasarkan PDRB Harga Konstan 1993	
TABEL B.1	: Indeks Williamson Wilayah Kabupaten Alor Tahun 1999 173
TABEL B.2	: Indeks Williamson Wilayah Kabupaten Alor Tahun 2000 173
TABEL B.3	: Indeks Williamson Wilayah Kabupaten Alor Tahun 2001 174
TABEL B.4	: Indeks Williamson Wilayah Kabupaten Alor Tahun 2002 174
TABEL B.5	: Indeks Williamson Wilayah Kabupaten Alor Tahun 2003 175
LAMPIRAN C. Data Sekunder Perkembangan PDRB Kabupaten Alor	
TABEL C	: Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 s/d 2003 di Kabupaten Alor 176
TABEL C.1	: Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 s/d 2003 di Kecamatan Pantar 177
TABEL C.2	: Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 s/d 2003 di Kecamatan Pantar Barat..... 177
TABEL C.3	: Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 s/d 2003 di Kecamatan Alor Barat Daya 178
TABEL C.4	: Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 s/d 2003 di Kecamatan Alor Selatan 178
TABEL C.5	: Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 s/d 2003 di Kecamatan Alor Timur 179
TABEL C.6	: Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 s/d 2003 di Kecamatan Alor Timur Laut..... 179
TABEL C.7	: Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 s/d 2003 di Kecamatan Teluk Mutiara 180
TABEL C.8	: Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 s/d 2003 di Kecamatan Alor Barat Laut 180

TABEL C.9 : Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 s/d 2003 di Kecamatan Alor Tengah Utara	181
LAMPIRAN D. Perhitungan Basis Ekonomi (LQ) per Kecamatan tahun 1994-2003	182
LAMPIRAN E. Perhitungan Regresi Berganda untuk Variabel PDRB dan Sektor Unggulan per Kecamatan tahun 1994 – 2003	
TABEL E.1 : Data Variabel PDRB dan Sektor Unggulan Kecamatan Pantar	183
TABEL E.2 : Output Regresi Berganda Kecamatan Pantar.....	184
TABEL E.3 : Data Variabel PDRB dan Sektor unggulan Kecamatan Pantar Barat.....	186
TABEL E.4 : Output Regresi Berganda Kecamatan Pantar Barat.....	187
TABEL E.5 : Data Variabel PDRB dan Sektor unggulan Kecamatan Alor Barat Daya	189
TABEL E.6 : Output Regresi Berganda Kecamatan Alor Darat Daya ..	190
TABEL E.7 : Data Variabel PDRB dan Sektor unggulan Kecamatan Alor Selatan	192
TABEL E.8 : Output Regresi Berganda Kecamatan Alor Selatan.....	193
TABEL E.9 : Data Variabel PDRB dan Sektor Unggulan Kecamatan Alor Timur	195
TABEL E.10 : Output Regresi Berganda Kecamatan Alor Timur	196
TABEL E.11 : Data Variabel PDRB dan Sektor unggulan Kecamatan Alor Timur Laut.....	198
TABEL E.12 : Output Regresi Berganda Kecamatan Alor Timur Laut ..	199
TABEL E.13 : Data Variabel PDRB dan Sektor unggulan Kecamatan Teluk Mutiara	201
TABEL E.14 : Output Regresi Berganda Kecamatan Teluk Mutiara	202
TABEL E.15 : Data Variabel PDRB dan Sektor Unggulan Kecamatan Alor Barat Laut	205
TABEL E.16 : Output Regresi Berganda Kecamatan Alor Barat Laut ...	206
TABEL E.17 : Data Variabel PDRB dan Sektor unggulan Kecamatan Alor Tengah Utara	209
TABEL E.18 : Output Regresi Berganda Kecamatan Alor Tengah Utara.....	210

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: Kebutuhan Data Penelitian	17
TABEL II.1	: Ukuran Keterkaitan Kedepan dan Kebelakang Secara Sistimatis.....	37
TABEL II.2	: Kesimpulan Teori	53
TABEL III.1	: Keadaan Tanah Menurut Kemiringan dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten Alor	65
TABEL III.2	: Kondisi Iklim dan Curah Hujan Kabupaten Alor Tahun 2001	66
TABEL III.3	: Tata Guna Lahan Kabupaten Alor Tahun 2001.....	68
TABEL III.4	: Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Alor Tahun 2001.....	70
TABEL III.5	: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Alor Tahun 2001.....	71
TABEL III.6	: Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Alor Tahun 2001	72
TABEL III.7	: Rasio Fasilitas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun 2001 ...	75
TABEL III.8	: Jumlah Bangunan Sekolah Kabupaten Alor Tahun 2001 ...	77
TABEL III.9	: Tingkat Pendidikan Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas Kabupaten Alor Tahun 2000.....	77
TABEL III.10	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Alor Tahun 2001 ..	78
TABEL III.11	: Jumlah Penduduk berumur 10 tahun keatas menurut Lapangan KerjaDan Jenis Kelamin Kabupaten Alor 2001.	79
TABEL III.12	: PDRB Kabupaten Alor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001	81
TABEL III.13	: Industri Menurut Jenis, Tenaga Kerja, Nilai Investasidan Nilai Produksi	82
TABEL III.14	: Perhotelan	82
TABEL III.15	: Rasio Aksesibilitas Fungsi Jalan per Kecamatan Kabupaten AlorTahun 2001.....	83
TABEL IV.1	: Hierarki Kecamatan di Kabupaten Alor	88
TABEL IV.2	: Jumlah Penduduk dan Jarak Antar Ibu Kota Kecamatan ...	92
TABEL IV.3	: Indeks Gravitasi.....	92
TABEL IV.4	: Analisis Indeks Williamson.....	96
TABEL IV.5	: Analisis Location Quotient Kec.Pantar	100
TABEL IV.6	: Analisis Location Quotient Kec.Pantar Barat.....	101
TABEL IV.7	: Analisis Location Quotient Kec.Alor Barat Daya	102
TABEL IV.8	: Analisis Location Quotient Kec.Alor Selatan.....	104
TABEL IV.9	: Analisis Location Quotient Kec.Alor Timur	105
TABEL IV.10	: Analisis Location Quotient Kec.Alor Timur Laut	106
TABEL IV.11	: Analisis Location Quotient Kec. Teluk Mutiara.....	108
TABEL IV.12	: Analisis Location Quotient Kec.Alor Barat Laut	109
TABEL IV.13	: Analisis Location Quotient Kec.Alor Tengah Utara	111
TABEL IV.14	: Uji Normalitas Data Kec.Pantar	114

TABEL IV.15	: Uji Multikolinearitas Kec.Pantar	114
TABEL IV.16	: Analisis Pengaruh Secara Partial Kec.Pantar	115
TABEL IV.17	: Analisis Pengaruh Secara Simultan Kec.Pantar	116
TABEL IV.18	: Uji Normalitas Data Kec.Pantar Barat.....	117
TABEL IV.19	: Uji Multikolinearitas Kec.Pantar Barat	117
TABEL IV.20	: Analisis Pengaruh Secara Partial Kec.Pantar Barat.....	118
TABEL IV.21	: Analisis Pengaruh Secara Simultan Kec.Pantar Barat.....	120
TABEL IV.22	: Uji Normalitas Data Kec.Alor Barat Daya	120
TABEL IV.23	: Uji Multikolinearitas Kec.Alor Barat Daya	121
TABEL IV.24	: Analisis Pengaruh Secara Partial Kec.Alor Barat Daya	122
TABEL IV.25	: Analisis Pengaruh Secara Simultan Kec.Alor Barat Daya ..	123
TABEL IV.26	: Uji Normalitas Data Kec.Alor Selatan	123
TABEL IV.27	: Uji Multikolinearitas Kec.Alor Selatan	124
TABEL IV.28	: Analisis Pengaruh Secara Partial Kec.Alor Selatan.....	125
TABEL IV.29	: Analisis Pengaruh Secara Simultan Kec.Alor Selatan.....	126
TABEL IV.30	: Uji Normalitas Data Kec.Alor Timur	127
TABEL IV.31	: Uji Multikolinearitas Kec.Alor Timur	128
TABEL IV.32	: Analisis Pengaruh Secara Partial Kec.Alor Timur	128
TABEL IV.33	: Analisis Pengaruh Secara Simultan Kec.Alor Timur	129
TABEL IV.34	: Uji Normalitas Data Kec.Alor Timur Laut.....	130
TABEL IV.35	: Uji Multikolinearitas Kec.Alor Timur Laut.....	131
TABEL IV.36	: Analisis Pengaruh Secara Partial Kec.Alor Timur Laut	132
TABEL IV.37	: Analisis Pengaruh Secara Simultan Kec.Alor Timur Laut ..	133
TABEL IV.38	: Uji Normalitas Data Kec. Teluk Mutiara.....	134
TABEL IV.39	: Uji Multikolinearitas Kec. Teluk Mutiara	135
TABEL IV.40	: Analisis Pengaruh Secara Partial Kec. Teluk Mutiara.....	135
TABEL IV.41	: Analisis Pengaruh Secara Simultan Kec. Teluk Mutiara....	137
TABEL IV.42	: Uji Normalitas Data Kec.Alor Barat Laut	138
TABEL IV.43	: Uji Multikolinearitas Kec.Alor Barat Laut	139
TABEL IV.44	: Analisis Pengaruh Secara Partial Kec.Alor Barat Laut	140
TABEL IV.45	: Analisis Pengaruh Secara Simultan Kec.Alor Barat Laut ..	141
TABEL IV.46	: Uji Normalitas Data Kec.Alor Tengah Utara	142
TABEL IV.47	: Uji Multikolinearitas Kec.Alor Tengah Utara	143
TABEL IV.48	: Analisis Pengaruh Secara Partial Kec.Alor Tengah Utara ..	144
TABEL IV.49	: Analisis Pengaruh Secara Simultan Kec.Alor Tengah Utara.....	145
TABEL IV.50	: Analisis Pengaruh Secara Parsial.....	147

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: PDRB Kabupaten Alor Per Kecamatan Tahun 2001	4
GAMBAR 1.2	: Kontribusi Sembilan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Alor Tahun 2001.....	5
GAMBAR 1.3	: Skema Kerangka Pikir	15
GAMBAR 1.4	: Skema Analisis	27
GAMBAR 2.1	: Model keterkaitan/Jaringan.....	36
GAMBAR 2.2	: Beberapa Alternatif Bentuk Kota	46
GAMBAR 3.1	: Tingkat Kesejahteraan Keluarga dari indikator Prasejahtera.....	74
GAMBAR 4.1	: Perkembangan PDRB Kabupaten Alor Tahun 1994 – 2003	112

DAFTAR PETA

PETA 1.1	: Orientasi Wilayah Penelitian	11
PETA 3.1	: Kelengkapan Sarana Fasilitas Umum di Kabupaten Alor	62
PETA 3.2	: Wilayah Administrasi Kabupaten Alor.....	64
PETA 3.3	: Daerah Irigasi Di Kabupaten Alor.....	69
PETA 3.4	: Penyebaran Penduduk di Kabupaten Alor	73
PETA 3.5	: Zona Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Alor	76
PETA 4.1	: Hierarki Kota Kecamatan Kabupaten Alor.....	95
PETA 4.2	: Zona Daerah Belakang di Kabupaten Alor.....	98

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya menggerakkan semua potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien meliputi semua aspek kehidupan masyarakat yang berkelanjutan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagai penjabaran dari pembangunan nasional yang adil, makmur dan merata. Demikian halnya dengan pembangunan di Kabupaten Alor dalam melaksanakan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dituntut untuk mampu mengembangkan kemandiriannya melalui berbagai potensi sumber daya dan peluang pembangunan sebagai dinamika pengembangan wilayah yang terpadu dalam suatu kesatuan ruang pada tingkat pusat secara umum maupun di daerah Kabupaten Alor secara khusus.

Sebagian pelaksanaan pembangunan nasional selama dua dasa warsa terakhir telah mengadopsi pemikiran dari *development poles theory* yang digagas oleh Perroux (1955) dan *growth center theory* dari Friedmann (1969) dipandang sebagai suatu perencanaan pembangunan yang lebih mengarah kepada pendekatan sektoral dengan menitikberatkan sektor ekonomi melalui bidang pertanian dan industri, tetapi tidak memperhatikan keterpaduan dengan pembangunan pada bidang-bidang lain yang terkait. Pendekatan pembangunan yang lebih bersifat sektoral kurang memperhatikan adanya keseimbangan antar wilayah dan cenderung mengarah kepada munculnya kesenjangan antar wilayah (*regional*

disparity). Kesenjangan yang terjadi karena pendekatan sektoral kurang memperhatikan aspek wilayah (*spatial*), hal ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan baik fisik maupun sosial politik. Kondisi ini menyebabkan adanya dikotomi antara Kota dan Pedesaan serta Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI).

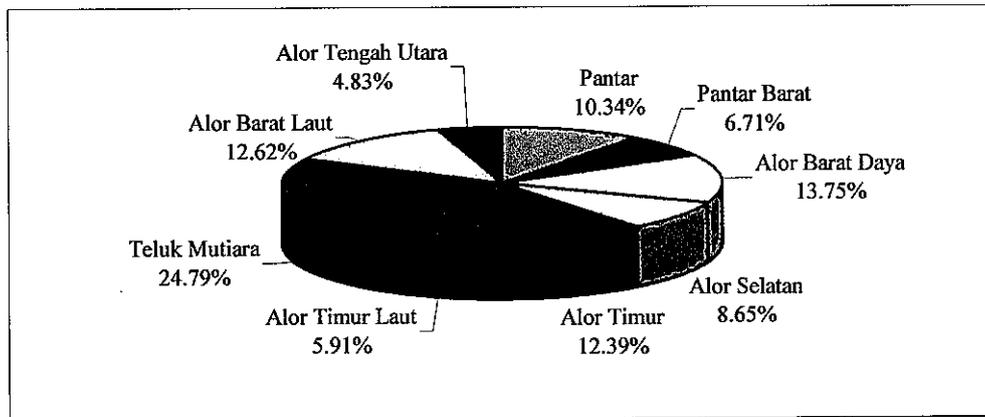
Sebagai negara berkembang yang terdiri dari banyak pulau, Indonesia dihadapkan pada masalah ketidakseimbangan wilayah. Pembangunan di bidang ekonomi yang menuju ke arah penyusunan suatu hierarki pusat-pusat produksi dan konsumsi diharapkan dapat saling menunjang antar wilayah pada kenyataannya menjadi tidak jelas kaitannya antara perkotaan dan pedesaan serta hierarki pemukiman, hal ini mencerminkan organisasi tata ruang belum tersusun secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan tujuan dari kebijaksanaan tersebut maka daerah-daerah yang relatif kurang atau belum berkembang perlu mendapat banyak perhatian dalam prioritas pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah (Kartasmita,1997:37-38).

Intervensi kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Alor masih sangat mengandalkan kemampuan pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat pada kawasan tertentu dan tidak diikuti oleh pengembangan yang bersifat lintas wilayah. Hal ini menjadi kurang sinkron dengan strategi pengembangan wilayah. Kendala dalam menyatukan program pembangunan daerah satu dengan lainnya berbeda-beda dan tidak merata dalam upaya mengatasi permasalahan pokok antar pusat kota yang

lebih pesat perkembangannya dengan daerah belakang yang masih tertinggal dan terisolir. Produk tata ruang sebagai konsep aspirasi masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan menurut sistim hierarki kota-kota sebagai pusat pelayanan yang menunjang pengembangan wilayah secara berkesinambungan.

Adanya ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi antar wilayah kecamatan di Kabupaten Alor, berpengaruh terhadap kontribusi setiap wilayah kecamatan terhadap PDRB Kabupaten Alor. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Teluk Mutiara berada di ibukota Kalabahi sebagai pusat pertumbuhan memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten Alor dibandingkan dengan kecamatan lain yang merupakan daerah belakang yaitu dengan kontribusi sebesar 24,79% dari total PDRB Kabupaten Alor tahun 2001 yang sebesar Rp.115.047.375.000,- sedangkan kecamatan lain hanya memberikan kontribusi sebesar antara 4,83% hingga 13,75% (Alor dalam angka, 2002). Peran sektor PDRB Kabupaten Alor menunjukkan kontribusi yang tidak merata antar wilayah karena sektor-sektor yang mempunyai potensi pertumbuhan mengalami pergeseran yang relatif rendah dan tidak memiliki daya saing yang kuat dibandingkan propinsi.

Seers (1972:21) mengatakan bahwa tujuan pengembangan wilayah pada dasarnya berkaitan dengan pengurangan kemelatan, pengangguran dan ketidakadilan serta mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan yang keberlanjutan (*sustainable development*). Hal ini berarti pengembangan wilayah tidak merekomendasikan terjadinya pemusatan pertumbuhan wilayah yang lambat, justru pengembangan wilayah menghendaki adanya percepatan pembangunan.



GAMBAR 1.1

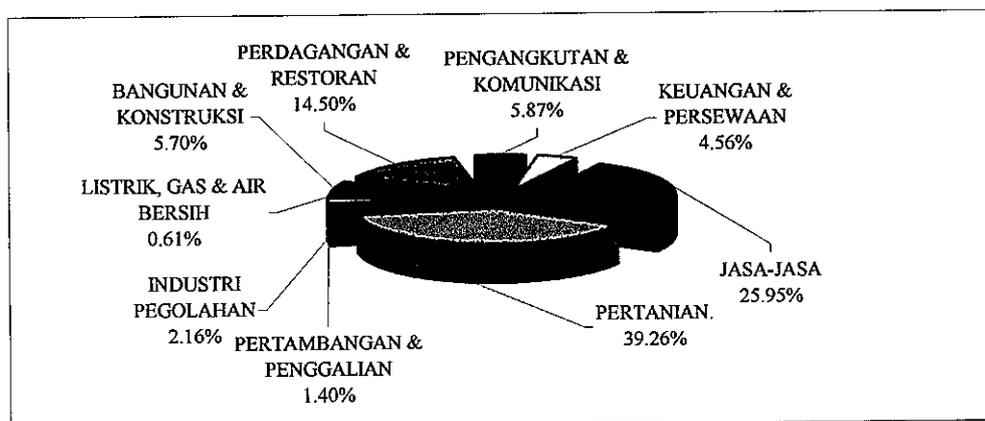
PDRB Kabupaten Alor Per Kecamatan Tahun 2001

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

Perkembangan wilayah di pusat kota yang lebih maju dari daerah belakang akan selalu mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menunjukkan adanya peningkatan kemiskinan di daerah belakang. Kondisi tersebut dilihat dari prosentase tingkat kemiskinan relatif tinggi di Kabupaten Alor dengan rasio usia penduduk produktif dan tidak produktif 2,41:1. Kualitas angkatan kerja yang dimiliki Kabupaten Alor sangat rendah dimana 34,21% angkatan kerjanya berpendidikan tidak sekolah/tidak tamat SD dan 40,56% tamat SD, sedangkan berpendidikan SMU hanya sebesar 3,17% dan 1,48% berpendidikan Diploma. Penduduk miskin di Kabupaten Alor dilihat dari indikator kelompok Pra Sejahtera menunjukkan bahwa dari 37.227 Kepala Keluarga (KK) berada pada kelompok miskin adalah sebesar 73,28% tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan dengan rata-rata tingkat prosentase yang berbeda-beda. Kecamatan Teluk Mutiara merupakan pusat pertumbuhan hanya memiliki 46,13% keluarga yang berada pada kelompok miskin atau Pra Sejahtera, sedangkan kecamatan lain memiliki tingkat prosentase sangat tinggi, bahkan di Kecamatan Alor Selatan mencapai 90,84% (BKKBN

Kabupaten Alor, 2002). Kesenjangan tersebut mengakibatkan jurang pemisah antara pusat pertumbuhan dan daerah belakang menjadi semakin lebar, dimana Kecamatan Teluk Mutiara merupakan daerah maju sebagai pusat pertumbuhan akan menjadi daya tarik bagi penduduk daerah belakang meliputi wilayah kecamatan yang jauh dari pusat pertumbuhan untuk memperoleh kesempatan kerja, pelayanan serta fasilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Kondisi geografi Kabupaten Alor sebagai kawasan yang terdiri dari banyak pulau sangat mengandalkan pada sektor pertanian sebagai sektor unggulan didukung dengan fasilitas sarana irigasi teknik, keterisolasian fisik dan perhubungan menjadi kendala terhadap korelasi produktifitas yang lambat dalam aktivitas perekonomian dan sosial lainnya. Hal ini tentu mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan serta akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan sarana perhubungan demi kelancaran aktivitas dan distribusi perekonomian. Gambar 1.2 menunjukkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Alor.



GAMBAR 1.2
Kontribusi Sembilan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Alor
Tahun 2001

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Alor tahun 2002

Sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Alor, hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sebesar 39,26% atau sebesar Rp.45.163.243.000,- dari total PDRB tahun 2001 sebesar Rp.115.047.384.000,-. Namun dari gambaran tersebut di atas sektor pertanian belum mampu memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, hal ini disebabkan karena pengelolaan sektor pertanian yang ada secara umum masih dikelola secara tradisional kurang mendapat sentuhan teknologi tepat guna. Sementara sentra produksi pertanian belum mempunyai aksesibilitas distribusi untuk pemasaran yang didukung oleh pelayanan prasarana dan sarana transportasi ke ibukota kabupaten. Kendala yang dihadapi dari sebagian besar Daerah Irigasi adalah lokasinya berada pada daerah belakang tidak merata dalam pelayanan sarana prasarana dan ketidakseimbangan sosial ekonomi masih tinggi, sedangkan pendekatan wilayah belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam pendayagunaan sumber daya wilayah (sumber daya alam dan sumber daya buatan/ infrastruktur) yang tersedia untuk membuka keterisolasian wilayah potensial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara utuh.

Berdasarkan latar belakang di atas, Kabupaten Alor terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan pertumbuhan antara Kecamatan Teluk Mutiara sebagai pusat pertumbuhan dengan kecamatan lain dalam pembangunan wilayah. Tinjauan terhadap ketidakseimbangan pertumbuhan antar wilayah lebih menitikberatkan pada sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan dalam perkembangan wilayah, sebagai salah satu aspek dalam upaya mengetahui peran sektor unggulan mana yang berpengaruh

signifikan baik secara parsial maupun simultan dalam meningkatkan pertumbuhan daerah belakang, melalui pendekatan sektor basis sebagai parameter untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Alor.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan wilayah di Kabupaten Alor terletak pada pertumbuhan antara sektor PDRB yang tidak merata. Hal tersebut sangat berhubungan dengan tingkat perkembangan Kota Kalabahi sebagai pusat pertumbuhan yang lebih maju dari pada daerah belakang yang cenderung menimbulkan kesenjangan pembangunan. Kesenjangan tersebut telah mempengaruhi laju tingkat pertumbuhan antara wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kontribusi sektor pembangunan antar wilayah tidak merata dalam memberikan *spread effect* dari pertumbuhan daerah belakang atau *trickle down effect* dari pusat pertumbuhan.
- Terkonsentrasinya fasilitas sarana dan prasarana sosial ekonomi di pusat kota tertentu yang lebih maju, menyebabkan aksesibilitas ke kecamatan lain sebagai kawasan belakang sangat terbatas dan terisolir.
- Intervensi kebijakan Pemerintah yang tidak mencerminkan integrasi pusat pertumbuhan dengan daerah belakang yang belum efektif dalam penataan ruang.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat di rumuskan bahwa sektor unggulan sebagai aspek pengembangan wilayah yang dari waktu ke waktu dapat menimbulkan kesenjangan wilayah terutama pada daerah belakang yang

mengalami *stagnasi*, maka diperlukan suatu penelitian dengan pernyataan penelitian (*Research Question*) adalah: “*Adakah dan Bagaimana Sektor Unggulan Yang Berpengaruh Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Daerah Belakang di Kabupaten Alor ?*”.

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sektor unggulan yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang sebagai upaya pengembangan wilayah di Kabupaten Alor.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam penelitian adalah:

1. Identifikasi fasilitas sarana prasarana sosial ekonomi masing-masing kecamatan untuk mendapatkan hierarki kota kecamatan sebagai pusat pelayanan terhadap aksesibilitas masyarakat.
2. Identifikasi wilayah pengaruh dari pusat-pusat pelayanan terhadap tingkat keterkaitan antara pusat pengembangan wilayah untuk mengetahui sentra-sentra produksi sub pusat pelayanan daerah belakang.
3. Identifikasi tingkat kesenjangan antara wilayah melalui Pendapatan perkapita wilayah untuk mengetahui ambang batas dari pertumbuhan masing-masing kecamatan terhadap acuan wilayah kabupaten.
4. Identifikasi sektor basis yang berperan dominan dari masing-masing kecamatan dengan membandingkan sumbangan sektor wilayah kabupaten

yang sama untuk mengetahui kontribusi perkembangan ekonomi wilayah bersangkutan.

5. Kajian terhadap sektor unggulan mana dari sektor basis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah secara signifikan pada masing-masing Kecamatan.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial yang diangkat dalam studi adalah meliputi:

- Mengkaji ketersediaan fasilitas sosial ekonomi meliputi sarana Pendidikan, Kesehatan, Daerah Irigasi, Kantor, Transportasi dan Perdagangan yang merupakan faktor untuk dapat menentukan struktur wilayah.
- Mengkaji keterkaitan pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruh berdasarkan jumlah penduduk dengan jarak antara kecamatan untuk mengetahui Indeks Gravitasi sebagai indikasi keterkaitan terhadap daerah belakang.
- Identifikasi tingkat kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Alor dikaji berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk pada tingkat kecamatan dengan wilayah acuan Kabupaten Alor. Dimana dari hasil kajian akan mengetahui ketimpangan yang terjadi masih dalam batas kewajaran atau sebaliknya.
- Identifikasi sektor basis ditentukan dari 9 (sembilan) sektor pembangunan di masing-masing kecamatan yang memiliki potensi sektor unggulan dalam

memberikan kontribusi kepada Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah belakang.

- Kajian sektor unggulan yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang secara parsial maupun simultan. Sebagai hasil dari temuan penelitian.

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial adalah batasan wilayah yang menjadi kajian studi yaitu Wilayah Administrasi Kabupaten Alor terletak pada posisi geografi: utara 8° - 6° LS, selatan 8° - 36° LS, timur 125° - 48° BT dan barat 125° - 48° BT dengan luas wilayah 2.864,64 Km². Batas wilayah Kabupaten Alor sebelah Timur dengan pulau-pulau Maluku Tenggara Barat, sebelah barat Selat Lomblen, sebelah utara dengan Laut Flores dan sebelah selatan Selat Ombay.

Ruang lingkup spasial secara makro adalah wilayah Kota Kalabahi sebagai Ibu Kota Kabupaten Alor dan yang menjadi daerah acuan adalah Kecamatan Teluk Mutiara sebagai Pusat pertumbuhan Kota Kalabahi. Sementara secara mikro ruang lingkungannya adalah wilayah Kecamatan yang menjadi obyek studi sebagai daerah pengaruh daerah belakang dari tiap-tiap kecamatan yang meliputi: Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Alor Tengah Utara. Sebagai batasan wilayah studi dapat dilihat dalam Peta 1.1 Orientasi Wilayah Penelitian berikut:

1.5 Kerangka Pemikiran

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi perkembangan wilayah Kabupaten Alor dipengaruhi oleh kontribusi sektor unggulan yang cenderung mengalami adanya ketidakseimbangan pertumbuhan antar pusat kota yang lebih maju dengan daerah belakang yang tertinggal dan terisolir.

Perkembangan wilayah yang merupakan upaya pembangunan daerah di Kabupaten Alor masih sangat mengandalkan kemampuan pada pusat-pusat pertumbuhan kawasan tertentu yang tidak di ikuti dengan perkembangan yang bersifat lintas wilayah. Terpusatnya fasilitas pelayanan sosial ekonomi di pusat kota menyebabkan aksesibilitas ke daerah belakang mengalami perkembangan yang *stagnasi*.

Kondisi geografi Kabupaten Alor sebagai wilayah kepulauan sangat mengandalkan pada sektor pertanian sebagai sektor primer yang akan mendorong peningkatan PDRB sekaligus merupakan aspek pengembangan wilayah. Pengaruh sektor pertanian dalam kontribusi PDRB hanya sebesar 39,26% dari total PRDB Kabupaten Alor tahun 2001 sebesar Rp. 115.047.375.000,- dimana peran sektor pertanian belum mampu mengimbangi peningkatan pertumbuhan dengan sektor-sektor lain yang tidak merata. Dalam tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan angka kemiskinan antar wilayah masih sangat tinggi tingkat prosentasi mencapai 90,84% di kecamatan Alor selatan dan yang terendah 46,13% di Kecamatan Teluk Mutiara.

Intervensi Kebijakan Pemerintah tidak mencerminkan adanya integrasi program pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pusat-pusat tertentu,

sedangkan masih terdapat daerah yang terbelakang dan terisolir. Produk tata ruang sebagai konsep aspirasi masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan menurut sistim hierarki kota-kota sebagai pusat pelayanan yang menunjang pengembangan wilayah.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah rendahnya kontribusi sektor unggulan sebagai aspek pengembangan wilayah yang dari waktu ke waktu dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah terutama pada daerah belakang mengalami *stagnasi*.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan bahwa sektor unggulan yang berpengaruh dalam perkembangan wilayah merupakan faktor penting yang dapat memberikan peranan kepada tingkat pertumbuhan wilayah sebagai upaya mengurangi tingkat kesenjangan di daerah belakang yang mengalami stagnasi.

Peran sektor unggulan dalam pembangunan daerah merupakan acuan dalam menyediakan kebutuhan fasilitas sosial ekonomi guna menetapkan struktur wilayah melalui pusat-pusat pelayanan berdasarkan hierarki kota-kota kecamatan menurut fungsi potensi kawasan dan hubungan keterkaitan antara pusat pengembangan wilayah untuk mengetahui sentra-sentra produksi sub pusat pelayanan daerah belakang.

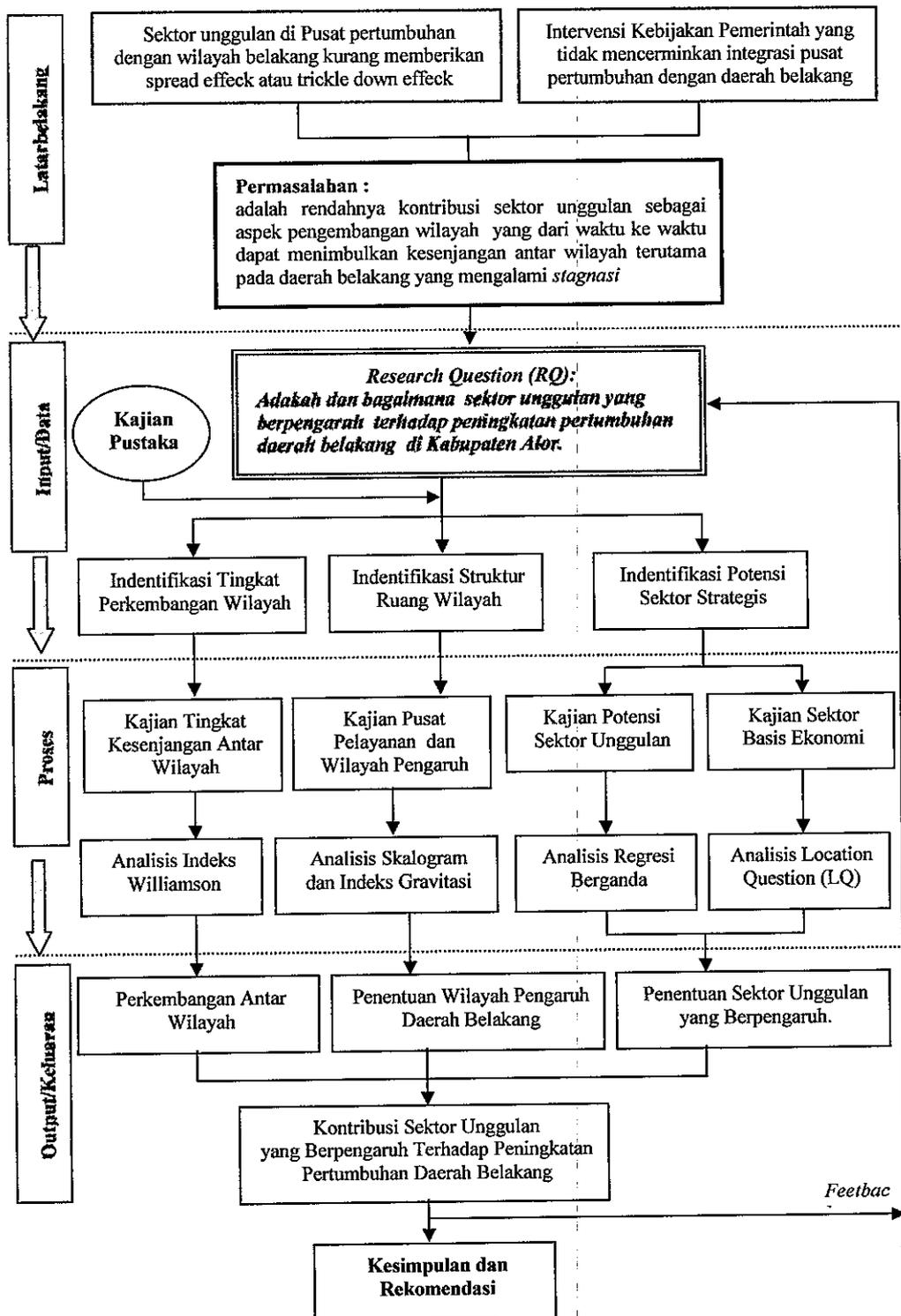
Peran sektor unggulan sebagai faktor pendukung terhadap kontribusi Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) dan jumlah penduduk merupakan parameter untuk mengetahui ketimpangan yang terjadi antar wilayah pusat kota dengan daerah belakang masih berada dalam batas-batas ambang yang wajar atau sebaliknya.

Kinerja sektor unggulan yang diukur atas 9 (sembilan) sektor pembangunan dari masing-masing wilayah guna mengetahui potensi wilayah berdasarkan sektor basis yang dimiliki. Untuk mengetahui peran sektor unggulan bagi pertumbuhan wilayah, maka akan dikaji berdasarkan sektor basis mana yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan guna meningkatkan pertumbuhan wilayah secara berkesinambungan secara khusus pada daerah belakang.

Untuk mencapai tujuan penelitian dalam menentukan sektor unggulan yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang sebagai upaya pengembangan wilayah di Kabupaten Alor akan dibahas melalui metode penelitian yang sesuai dengan analisis yang akan dipergunakan terhadap kajian struktur wilayah, Kajian sektor basis dan potensi sektor unggulan, Kajian tingkat kesenjangan antar wilayah untuk mengetahui kontribusi sektor unggulan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan daerah belakang di wilayah studi.

Dengan hasil kompilasi data dan proses analisis yang dikaji dari pertumbuhan wilayah dan perkembangan wilayah berpengaruh pada daerah belakang melalui sektor-sektor ekonomi yang dimiliki akan dapat menentukan sektor unggulan wilayah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan daerah belakang. Dari hasil kajian sektor unggulan tersebut sejauhmana pengaruh yang signifikan untuk dapat mendorong pertumbuhan daerah belakang merupakan temuan dalam penelitian dan kesimpulan terhadap studi yang diharapkan akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada pihak pemerintah dalam strategi pengembangan sesuai dengan karakteristik daerah belakang yang berkelanjutan.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar.1.3



GAMBAR 1.3
Skema Kerangka Pikir

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Studi

Pendekatan yang dilakukan dalam studi ini adalah melalui pendekatan ekonomi wilayah dan pendekatan deskriptif. Dimana pendekatan metode yang dilakukan dengan mengkombinasikan antara metode analisis kuantitatif dan kualitatif yaitu meliputi semua informasi data-data berkaitan dengan tujuan dan sasaran penelitian. Selanjutnya dari kompilasi data yang dihasilkan akan dianalisis untuk dapat memperoleh gambaran tentang gejala perkembangan dan fakta tertentu dengan kondisi fenomena atau variabel yang diselidiki secara komprehensif.

1.6.2 Metode Pelaksanaan Studi

Dalam melaksanakan penelitian ini akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku untuk memecahkan permasalahan melalui hubungan dari bagian-bagian yang sedang diteliti (Bogdan dan Biklen 1982:29). Permasalahan yang menjadi keterbatasan dalam penelitian tersebut adalah metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder tanpa di dukung oleh adanya survey primer. Selanjutnya dalam penggunaan data tersebut sangat mempengaruhi validitas data yang digunakan dalam penelitian. Kajian dari fokus variabel sektor unggulan sebagai aspek perkembangan wilayah baru dilihat pada ruang lingkup wilayah kecamatan. Dimana dari fenomena kontribusi PDRB yang tidak merata antara pusat kota dan daerah belakang yang mengalami stagnasi akan dicermati secara obyektif sekaligus mencari pemecahan masalah melalui solusi-solusi dan batasan lingkup studi baik secara teoritis maupun empiris.

Selanjutnya untuk menjawab permasalahan peningkatan pertumbuhan daerah belakang dalam mengurangi kesenjangan dengan pusat pertumbuhan di Kota Kalabahi, dilandasi oleh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pengembangan studi, meliputi identifikasi ketersediaan fasilitas pelayanan umum, fasilitas ekonomi dan sosial, fasilitas sarana dan prasarana transportasi, identifikasi tingkat kesenjangan yang terjadi dan identifikasi sektor unggulan berpengaruh terhadap pertumbuhan daerah belakang.

1.6.3 Kebutuhan Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui buku laporan, peraturan-peraturan dan dokumen yang mendukung, adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel I.1.

TABEL I.1
Kebutuhan Data Penelitian

Kebutuhan Data	Kegunaan	Sumber Data	Teknik Analisis	Tahun
▪ Data kependudukan, fasilitas sosial ekonomi	Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Alor	▪ BPS ▪ Bappeda Kab.Alor	Statistik Deskriptif	2001
▪ Data Infrastruktur Kabupaten Alor	Untuk menganalisis hierarki kota dan wilayah pengaruhnya	▪ BPS ▪ Kimpraswil Kab.Alor	Analisis Skalogram dan Analisis Indeks Gravitasi	2001
▪ Data PDRB Kabupaten Alor	Untuk menganalisis sektor Basis ekonomi Daerah	▪ BPS	Analisis Indeks Williamson	1999 -2003
▪ Data PDRB Kecamatan	Untuk Menentukan Potensi Sektor Unggulan Kecamatan	▪ BPS	Analisis Regresi Berganda	1994-2003
▪ Data Tenaga Kerja	Untuk mengetahui pola penyebaran dan kepadatan	▪ BPS	Analisis LQ	2001

Sumber: Dikembangkan Untuk Penelitian

Dalam penelitian ini lebih mengarahkan pada sektor pembangunan yang merupakan parameter dari pertumbuhan wilayah Kabupaten Alor, dimana dalam perkembangannya telah menimbulkan kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan pertumbuhan daerah belakang dengan pusat pertumbuhan ibu kota kabupaten, maka data yang dibutuhkan berasal dari instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Alor. Pada tahap kegiatan ini, dilakukan pengumpulan data dan informasi untuk mengkaji permasalahan yang ada dari tiap wilayah, dimana interaksi pengaruh sektor ekonomi strategis secara langsung berhubungan dengan aktivitas masyarakat dan kinerja sektor pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dimasa yang akan datang.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari dan mencatat kembali data-data dari dokumen, buku-buku, studi-studi yang telah dilakukan ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk bahan analisis permasalahan.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis melalui:

1. Data yang diperoleh dalam bentuk angka dapat diukur melalui teknik:
 - Perhitungan matematika sederhana yaitu mengelola data dengan berbagai perhitungan statistik sederhana.
 - Perhitungan matematika tertentu yaitu mengelola data dengan hitungan statistik yang telah dirumuskan oleh para pakar.
 - Perhitungan matematika lainnya yang diperlukan dalam mengkuantitatifkan data kualitatif agar dapat diolah secara numerik.

2. Data Kualitatif (non numerik) pengelolaan melalui:

- Metode deskripsi dengan membandingkan gambaran serta kondisi dari fenomena untuk mengkaji secara lebih jelas terhadap wilayah studi.
- Metode asumsi dalam rangka memperkirakan rangking tertentu berdasarkan pada kebutuhan dalam wilayah studi.
- Metode komparatif terhadap variabel data yang merupakan perbandingan kelebihan dan kekurangan dalam menyimpulkan kebutuhan yang optimal dari hasil penelitian.

1.6.5 Metode dan Teknik Analisa

Teknik analisis yang digunakan bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian kajian sektor unggulan yang berpengaruh untuk meningkatkan pertumbuhan daerah belakang dalam mengurangi kesenjangan dengan pusat pertumbuhan di Kabupaten Alor. Metode kuantitatif dengan uji statistik untuk menganalisa hasil penelitian sedangkan metode kualitatif adalah memberikan analisis tentang gambaran atau kondisi di lapangan secara ilmiah dengan kajian sebagai berikut:

- 1) Identifikasikan ketersediaan fasilitas pelayanan umum, fasilitas ekonomi dan sosial fasilitas sarana dan prasarana transportasi dari masing-masing kecamatan
- 2) Identifikasi wilayah pengaruh dari pusat-pusat pelayanan terhadap tingkat keterkaitan antara pusat pengembangan wilayah untuk mengetahui sentra-sentra produksi sub pusat pelayanan daerah belakang.
- 3) Identifikasi tingkat kesenjangan yang terjadi antara kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dengan kecamatan lain

- 4) Identifikasi sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan untuk mengoptimalkan sektor basis dalam upaya memperkecil kesenjangan yang terjadi dengan pusat pertumbuhan

Atas dasar kajian data akan dianalisis sesuai dengan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis data secara kuantitatif dan kualitatif.

Teknik kuantitatif dilakukan dengan alat analisis (1) Skalogram, (2) Analisa Indeks Williamson, (3) Analisa Indeks Gravitasi, (4) *Location Quotient* (LQ) dan (5) Analisis Regresi Berganda.

1.6.5.1 Analisis Skalogram

Teknik analisis ini sebagai pendekatan untuk menentukan hierarki kecamatan-kecamatan di Kabupaten Alor dengan menggunakan Metode Skalogram Guttman, urutan sebagai berikut (Rondinelli, 1985:115):

- a) Membuat urutan kecamatan berdasarkan jumlah penduduk pada sebelah kiri tabel kerja.
- b) Membuat urutan fasilitas berdasarkan pada frekuensi.
- c) Menggambarkan baris dan kolom sehingga membentuk matriks berdasarkan fasilitas dan kecamatan.
- d) Memberikan tanda (1) pada keberadaan suatu fasilitas dan (0) untuk ketidakberadaan suatu fasilitas.
- e) Menyusun ulang baris dan kolom berdasarkan frekuensi kelengkapan fasilitas suatu kecamatan dan jumlah fasilitas yang ada pada setiap kecamatan.
- f) Menyusun hierarki kecamatan berdasarkan peringkat kelengkapan fasilitas.

Untuk menguji kelayakan penggunaan skalogram digunakan perhitungan uji reproduksi dan skalabilitas, yang meliputi uji koefisien reproduksi (Kr) dan koefisien skalabilitas (Ks). Rumus Kr dan Ks adalah sebagai berikut (Singarimbun, 1995: 118):

$$K_r = 1 - \frac{\text{Jumlah Kesalahan (e)}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Fasilitas}}$$

Syarat Kr yang layak digunakan jika nilai $K_r > 0,900$

$$K_s = 1 - \frac{\text{Jumlah Kesalahan (e)}}{0,5 \times \{(\text{Jumlah Kecamatan} \times \text{Jumlah Fasilitas}) - \text{Total Fasilitas Tersedia}\}}$$

Syarat Ks yang layak digunakan jika nilai $K_s > 0,600$

1.6.5.2 Analisis Indeks Gravitasi

Analisa wilayah pengaruh menggunakan model gravitasi yang berkaitan dengan analisis Skalogram. Analisa model gravitasi ini digunakan untuk: (1) mengukur kekuatan keterkaitan antara sentra komoditas dengan pusat pengembangan wilayah. (2) menentukan kekuatan tempat kedudukan dari setiap pusat kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi (sentra-sentra komoditas) dalam sistim jaringan jasa, distribusi dan transportasi.

Kelemahan metode ini adalah karna pada kenyataanya bobot dan jarak tidak dapat berfungsi utuh sebagai faktor determinan besarnya interaksi. Jika muncul perubahan pada bobot atau jarak, daya tarik antara dua kota akan berubah (Daldjoeni, 1997:204). Oleh karena itu penentuan wilayah pengaruh dengan menggunakan rumus Model Gravitasi dalam penelitian ini dibatasi hanya untuk memberikan suatu indikasi wilayah pengaruh daerah belakang.

Rumus matematis dalam menentukan indeks gravitasi adalah sebagai berikut

(Warpani, 1984:113):

$$I_{12} = \frac{P_1 P_2}{d_{12}^2}$$

dimana:

- I : Interaksi kecamatan 1 dengan kecamatan 2 (indeks gravitasi)
- P : Jumlah penduduk pada wilayah pertama (ribuan jiwa)
- P : Jumlah penduduk pada wilayah ke dua (ribuan jiwa)
- D : Jarak Ibu kota Kecamatan 1 dengan kecamatan 2 (dalam KM, diasumsikan 1Km jarak equivalen dengan jarak 1 mil jarak laut)

1.6.5.3 Analisis Indeks Williamson

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan pertumbuhan antar wilayah melalui pendapatan perkapita wilayah. Indeks williamson menggambarkan ukuran relatif pendapatan perkapita kecamatan terhadap rata-rata wilayah (regional) Kabupaten Alor dimana tiap-tiap deviasi tingkat kecamatan di bagi sumbangannya dengan penduduk wilayah (regional) Kabupaten secara keseluruhan.

Rumus matematis dalam perhitungan indeks williamson adalah sebagai berikut

(Friedmann dan Alonson (EDS), 1976:166):

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \cdot f_i/n}}{Y}$$

dimana,

- V_w : Tingkat disparitas tertimbang.
- F_i : Penduduk pada daerah Kecamatan (sub.regional) ke i
- N : Penduduk Kabupaten (Regional Keseluruhan)
- Y_i : Pendapatan perkapita Kecamatan (Sub.regional) ke i
- Y : Pendapatan perkapita rata-rata Kabupaten.

1.6.5.4 Analisis Location Quotient

Teknik Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan suatu daerah pada sektor-sektor tertentu yang merupakan sektor basis atau sektor leading. LQ banyak digunakan sebagai alat sederhana untuk mengukur spesialisasi relatif suatu daerah pada sektor-sektor tertentu. Data yang dapat digunakan untuk menghitung LQ tersebut adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten. Apabila digunakan data PDRB maka sebaiknya data dihitung berdasarkan harga konstan yang mencerminkan pendapatan dan produksi riil. Jenis data yang digunakan adalah data PDRB kita hitung dari setiap sektornya serta data PDRB wilayah acuan tempat dimana daerah yang dihitung tersebut berada.

Formula untuk perhitungan LQ tersebut adalah sebagai berikut (Warpani, 1984:68):

$$LQ = \frac{\text{PDRB Sektor } i \text{ Kecamatan} / \text{Total PDRB Kecamatan}}{\text{PDRB Sektor } i \text{ Kabupaten Alor} / \text{Total PDRB Kabupaten Alor}}$$

Dari hasil perhitungan LQ ada tiga kemungkinan hasil yang di dapat, yaitu:

- Jika $LQ > 1$, disebut sektor tersebut adalah sektor basis, yakni sektor yang tingkat spesialisasi lebih tinggi dari tingkat Kabupaten Alor.
- Jika $LQ < 1$, disebut sektor tersebut adalah sektor non-basis yakni sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat Kabupaten Alor.
- Jika $LQ = 1$ maka sektor tersebut memiliki tingkat yang sama dengan Kabupaten Alor.

Keunggulan dari analisis LQ adalah suatu alat yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat. LQ dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah, kemudian dilanjutkan dengan analisis lainnya. Sedangkan kelemahan dari analisis ini adalah banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan mengakibatkan hasil perhitungan menjadi bias. Hal ini disebabkan karena adanya disagregasi PDRB Sektor daerah hitung, pemilihan total PDRB baik wilayah acuan maupun daerah hitung, pemilihan entity yang diperbandingkan serta pemilihan tahun dan kualitas data.

1.6.5.5 Analisis Regresi

Analisis Regresi digunakan untuk mengetahui sektor unggulan yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan antara wilayah pusat dengan daerah belakang, yang persamaan matematisnya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

dimana:

- Y : Pertumbuhan Wilayah
- X : Sektor Unggulan
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- e : Error Term

Pengujian pengaruh secara partial apakah signifikan atukah tidak digunakan uji t dengan persamaan sebagai berikut:

$$t \text{ hitung} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

dimana:

β_i : Koefisien korelasi

Se (β_i) : Standar error koefisien regresi

Kriteria pengujian:

1. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya sektor unggulan secara partial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesenjangan yang terjadi.
2. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ artinya secara partial sektor unggulan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesenjangan yang terjadi.

Pengujian pengaruh secara simultan apakah signifikan atukah tidak digunakan uji F dengan persamaan sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{\text{Regression Mean Square}}{\text{Residual Mean Square}}$$

Kriteria pengujian:

1. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ artinya sektor unggulan secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesenjangan yang terjadi.
2. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya sektor unggulan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesenjangan yang terjadi.

Alternatif lain untuk melihat pengaruh secara partial maupun simultan adalah dengan melihat nilai signifikansinya, apabila nilai signifikansi terbentuk dibawah 5% maka terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya bila signifikansi terbentuk di atas 5% maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Imam Ghozali (2002) mengatakan asumsi utama mendasari model analisis regresi adalah dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Squares*) yang diantaranya adalah normalitas data dan tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel bebas meliputi:

1) Uji Normalitas Data

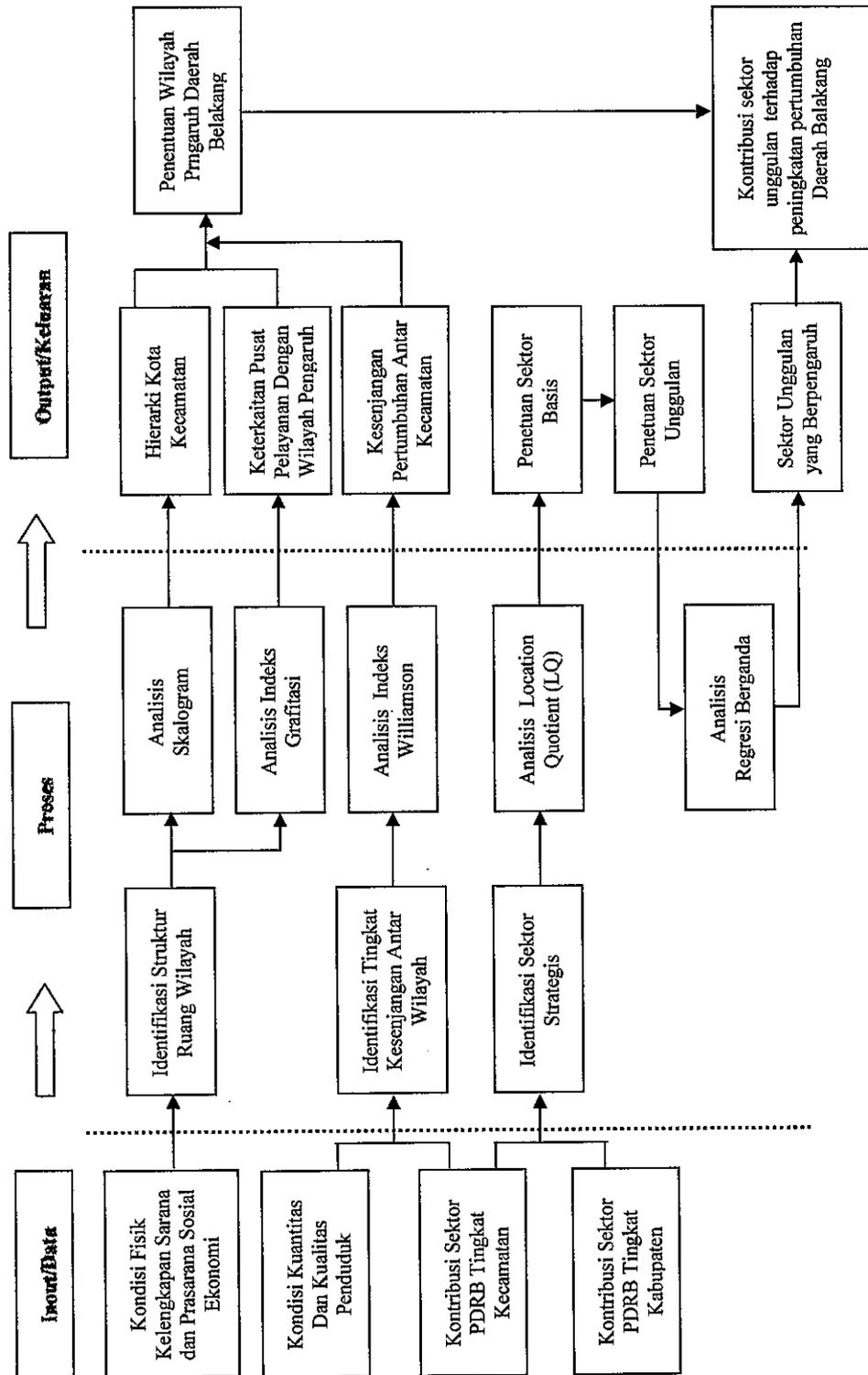
Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah sebaran data yang ada terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang menghasilkan nilai Z , apabila nilai Z hitung lebih kecil dari Z tabel atau nilai signifikansi terbentuk di atas 5% maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data terdistribusi secara normal, sebaliknya bila nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel atau nilai signifikansi terbentuk dibawah 5% maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data tidak terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi yang sempurna diantara beberapa variabel independen yang digunakan dalam model. Multikolinearitas terjadi bila terdapat hubungan linear diantara variabel independen dalam model. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat matrik korelasi, jika antar variabel bebas ada korelasi yang tinggi (umumnya di atas 0,90) maka hal ini menunjukkan indikasi multikolinearitas.

1.6.2.6 KERANGKA ANALISIS.

Untuk menjelaskan urutan analisis dapat dilihat pada kerangka sebagai berikut:



Gambar 1.4
Kerangka Analisis

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup, kerangka pemikiran, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II** Kajian teori yang mendukung konsep pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Kabupaten Alor dengan wilayah kecamatan dalam identifikasi sektor unggulan yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah belakang.
- Bab III** Perkembangan wilayah di Kabupaten Alor yang menggambarkan kondisi eksisting dari wilayah studi. Secara makro perkembangan wilayah nasional dan secara mikro meliputi tingkat perkembangan antar wilayah yang mengacu pada pertumbuhan sektor unggulan.
- Bab IV** Pembahasan analisis sektor unggulan yang berpengaruh terhadap peningkatan daerah belakang yang meliputi empat analisis yaitu (1) Analisis Skalogram, (2) Analisis Indeks Gravitasi, (3) Analisis Disparitas antar wilayah, (4) Analisis Location Quotient dan Regresi Berganda.
- Bab V** Kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi pihak terkait dan rekomendasi upaya-upaya peningkatan pertumbuhan bagi pengembangan wilayah khususnya pada daerah belakang di Kabupaten Alor.

BAB II

PERAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN BASIS EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN DAERAH BELAKANG (KAJIAN PUSTAKA)

2.1 Pengertian Umum Wilayah dan Daerah

Pengertian wilayah adalah suatu daerah geografis yang memiliki luas tertentu atau ada batas administrasi. Daerah (*region*) adalah lebih menunjuk kepada wilayah administrasi yang lebih luas dibandingkan dengan kota, dapat berupa daerah propinsi, kabupaten, kecamatan atau desa.

Banyak kontroversi dan ketidakadaan kesepakatan tentang pengertian wilayah (*region*), untuk menjelaskan secara umum ada 3 (tiga) pengertian yaitu:

- a) Wilayah formal berkenaan dengan keseragaman yang didefinisikan menurut homogenitas. Karakteristik dari suatu daerah homogenitas adalah suatu konsep yang realita berupa tingkat urbanisasi, kepadatan penduduk, pendapatan perkapita dan lain-lain. Suatu kawasan homogen memiliki kesamaan sifat-sifat kegiatan yang sama (homogen), contohnya homogenitas karena dialiri oleh satu sungai, penggabungan wilayah-wilayah elementer (*elementary square gridcells*), atau operasional klasifikasi unit ke dalam sekumpulan wilayah baru yang lebih besar.
- b) Wilayah fungsional sebagai daerah nodal (*polarizes region*) terdiri dari satuan-satuan yang heterogen seperti kota dan desa yang secara fungsi saling berkaitan. Jadi dengan kata lain suatu wilayah nodal mempunyai tingkat

ketergantungan yang tinggi terhadap intensitas aliran ekonomi internal dimana aliran internal mendominasi hubungan external.

Boudeville (1966) mengatakan bahwa wilayah-wilayah nodal harus memenuhi kondisi: populasi lebih dari empat juta orang, adanya kompleks industri yang terintegrasi dan mempunyai tingkat ekspor yang cukup tinggi.

- c) Wilayah perencanaan/administrasi yang dilihat sebagai suatu ruang yang berada di bawah suatu administrasi tertentu seperti propinsi, kabupaten dan kecamatan. Wilayah perencanaan ini ditentukan dari sudut sasaran yang akan dituju oleh wilayah tertentu atau oleh populasinya. Selain itu wilayah perencanaan merupakan suatu basis ruang yang berguna untuk penentuan program-program pengembangan tertentu.

Sukirno (1981) menjelaskan bahwa pengertian daerah dapat dilihat dari beberapa disiplin ilmu menyangkut studi dalam bidang regional serta tergantung pada tujuan yang hendak dicapai dalam menganalisa suatu daerah. Menganalisa wilayah dapat dibedakan dalam tiga pengertian, yaitu:

1. Daerah atau wilayah adalah suatu ruang atau area geografis dipelbagai pelosok mempunyai kesamaan sifat baik menurut kriteria sosial, ekonomi maupun politik yang dikenal dengan sebutan daerah homogen.
2. Perbatasan diantara pelbagai daerah ditentukan oleh tempat-tempat dimana pengaruh dari satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi digantikan dengan pengaruh dari pusat lainnya, daerah ini disebut daerah nodal.
3. Suatu daerah dibedakan menurut batas-batas administratif dalam suatu daerah atau wilayah.

2.2 Kajian Pertumbuhan Wilayah

Suatu wilayah akan tumbuh dan berkembang diawali dari pusat kota yang berinteraksi melalui pusat-pusat pertumbuhan lainnya mengikuti hierarki dalam suatu pusat-pusat pertumbuhan. Jika ditinjau dari aspek ruang ekonomi, menurut Soejarto (1981) bahwa dalam ruang ekonomi akan tercipta pusat-pusat pertumbuhan dengan berbagai ukuran hierarki dan pembangunan akan terstruktur secara makro melalui hierarki wilayah pusat dan secara regional dari pusat tersebut ke masing-masing daerah belakangnya.

Pandangan dari beberapa teori pertumbuhan menunjukkan apakah pertumbuhan wilayah tersebut mengalami gap antara daerah maju dengan daerah yang kurang maju. Menurut Ferroux, seorang ahli ekonomi Perancis menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan wilayah tidak terjadi disemua tempat akan tetapi terbatas dengan variabel yang berbeda-beda intensitasnya.

Wilayah diidentifikasi sebagai suatu area kekuatan yang didalamnya terdapat pusat-pusat atau kutub-kutub. Setiap pusat atau kutub mempunyai kekuatan pengembangan keluar dan kekuatan tarik ke dalam. Sejalan dengan penjelasan di atas, maka Ferroux dalam Daldjoeni (1997) menjelaskan bahwa konsep pertumbuhan kutub (*growth pole*) yang terpusat dan mengambil tempat tertentu sebagai pusat pengembangan diharapkan menjalankan perkembangan ke pusat-pusat yang tingkatannya lebih rendah. Dalam konsep tersebut terdapat istilah *spread* dan *trickling down* (penjalaran dan penetasan) serta *backwash* dan *polarization* (penarikan dan pemusatan). Dimana untuk menentukan wilayah atau sektor yang perlu diprioritaskan dengan menunjukan tingkat pengaruh wilayah.

Kenyataan terjadi menurut teori sektor, dimana luas lingkup relokasi sumber daya internal adalah besar di daerah-daerah pertanian yang miskin dari pada di daerah-daerah yang lebih berkembang. Konsekuensi yang timbul dari proses tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Myrdal (1957) bahwa suatu daerah lebih maju akan berkembang lebih cepat dari pada yang kurang maju. Hal ini disebabkan karena *backwash effect* ditimbulkan oleh daerah yang maju adalah lebih besar dari pada *spread effect*. *Backwash effect* diartikan sebagai mengalirnya faktor-faktor produksi potensial dari tempat atau daerah miskin ke daerah kaya. Sebagai contoh migrasi penduduk usia produktif, mengalirnya atau berpindahnya tenaga-tenaga terampil dan terdidik serta modal atau sumber daya alam ke pusat kota atau ke wilayah yang besar. Penduduk yang kurang terampil dan produktivitasnya relatif rendah akan tertinggal. Dalam hal ini konsentrasi pembangunan sarana dan prasarana serta pemasaran akan lebih terpusat dan lebih baik di daerah perkotaan, sehingga terjadi pemusatan kegiatan ekonomi yang akan mendorong tingkat pertumbuhan.

Kartasmita (1996) mengatakan bahwa faktor-faktor kesenjangan pertumbuhan wilayah disebabkan terutama oleh lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar daerah perkotaan dan perdesaan. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah pedesaan menyebabkan produktivitas dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan menjadi rendah. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya prasarana dan sarana perhubungan di daerah perdesaan, khususnya prasarana dan sarana yang menghubungkan suatu daerah miskin dengan daerah-daerah lebih maju.

Kondisi wilayah pusat pertumbuhan dihadapkan pada masalah yang merupakan konsekuensi logis dari mengelompoknya penduduk dan aktivitas di tempat-tempat tertentu, seperti dikemukakan oleh Oppenheim (1980) bahwa penambahan jumlah penduduk tidak hanya disebabkan oleh faktor alami melainkan juga disebabkan oleh adanya migrasi. Pergerakan penduduk erat hubungannya dengan pemusatan penduduk di suatu kota atau daerah, dimana terdapat kesempatan lapangan kerja atau pusat kegiatan yang dominan maka disanalah arus pergerakan penduduk terjadi, hal ini akan dapat membantu dalam mengetahui lokasi pusat kegiatan dan pola pusat kegiatan di suatu wilayah. Menurut Branch (1996) daerah-daerah yang ada sangat beraneka ragam bentuknya, mulai kecil, sedang dan besar serta berpenduduk jarang dan padat dengan kondisi ekonomi, sosial, politik, keagamaan yang beragam merupakan faktor dapat mempengaruhi pola pertumbuhan wilayah tersebut. Sejalan dengan hal itu pertumbuhan dari daerah yang berada di sekitar pusat kota akan mengalami pertumbuhan yang lambat karena adanya daya tarik dari pusat kota, khususnya sumber daya manusia yang produktif dan sumber daya ekonomi.

Richarson (1974) menyebutkan sistim pusat pertumbuhan merupakan sistim yang paling efisien dalam menjalankan perkembangan wilayah dan juga sistim ini dapat dipergunakan sebagai suatu alat untuk mendistribusi pelayanan barang dan jasa bagi masyarakat luas. Namun menurut Soejarto (1981) bahwa tanpa adanya hierarki yang jelas maka akan sulit mekanisme penjalaran perkembangan dari pusat-pusat pengembangan wilayah ekonomi terbentuk, malah kemungkinan besar

akan mempertajam kesenjangan yang ada antara kota-kota kecil dengan kota-kota lebih besar atau antara wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan.

Lebih lanjut May (1984:61) menyatakan bahwa permasalahan umum pertumbuhan terjadi pada daerah-daerah di Indonesia adalah pola pemanfaatan lahan yang belum optimal, tingkat pertumbuhan perdesaan dan perkotaan tidak seimbang, kemampuan mengelola sumber daya masih rendah, belum terjangkau oleh teknologi yang memadai, tingkat pendidikan dan keterampilan relatif rendah, tingkat pelayanan jasa, pemerintahan dan sosial belum memadai, wilayah yang berperan sebagai penghasil produksi primer hasilnya harus dipasarkan keluar tidak dapat terlaksana dengan baik karena lemahnya transportasi dan tidak mempunyai hubungan yang kuat dalam pemasaran hasil tersebut.

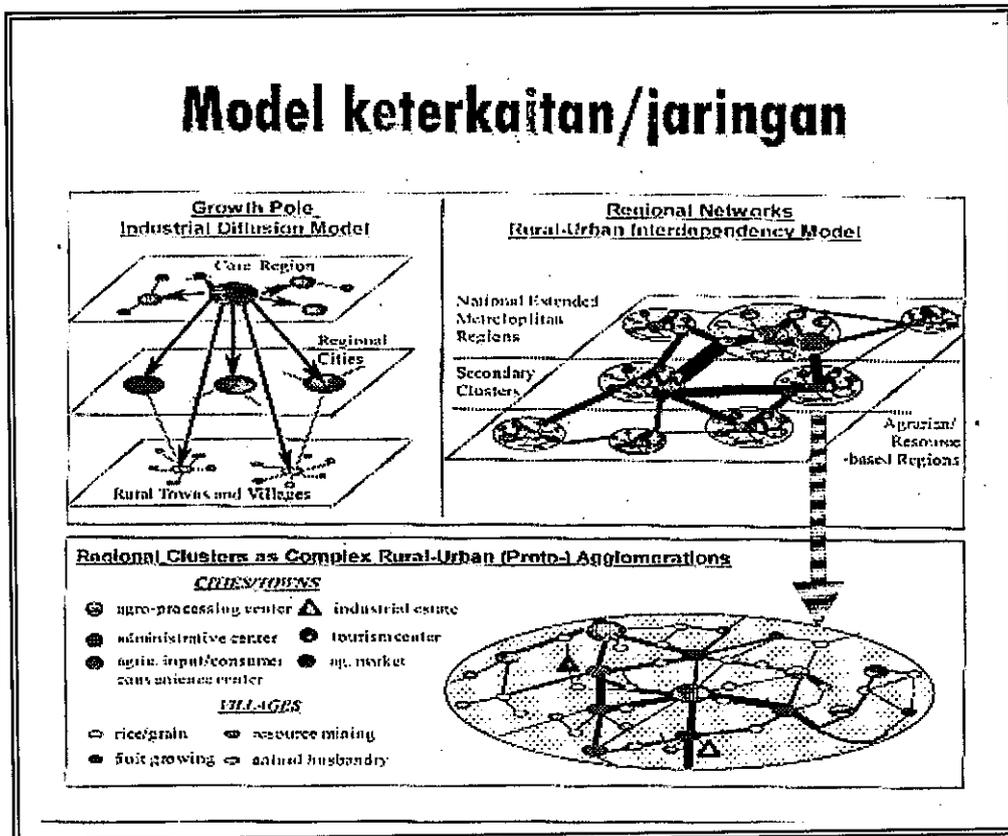
2.3 Proses Pertumbuhan Wilayah

Dalam proses pertumbuhan wilayah menganut nilai-nilai yang berorientasi kepada kepentingan internal pertumbuhan wilayah dan kepentingan eksternal. Pertumbuhan ini disertai dengan peningkatan produktifitas populasi ketenagakerjaan serta pendapatan yang akan memberikan nilai tambah sektor manufaktur. Pada intinya pertumbuhan wilayah adalah bahwa sektor ekonomi lambat laun terbentuk karena kemampuan peran dari proses internal dalam wilayah sebagai aktifitas dan aplikasi teknologi terhadap sumber daya lokal atau peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini dapat terjadi dengan mengamati peningkatan pendapatan perkapita pada area yang berbeda dengan waktu tertentu secara umum terhadap relokasi sumber daya yang mengalami penurunan

proporsional tenaga kerja pada aktifitas primer (sektor pertanian) dan peningkatan tersier (sektor jasa), Glasson (1983) menyimpulkan bahwa kunci dari proses pertumbuhan wilayah secara internal adalah pertumbuhan yang mendasar dalam struktur organisasi suatu institusi.

Selain faktor internal, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan terhadap wilayah lain bertujuan untuk memberi peningkatan kompetitif berdasarkan model basis ekspor. Aktifitas ekonomi wilayah dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu, aktifitas ekonomi berproduksi untuk pasar ekspor yang dikenal sebagai sektor basis dan aktifitas ekonomi berproduksi untuk pasar lokal yang dikenal sebagai sektor non basis. Berdasarkan *Economic Base Theory* yang menekankan pada perlunya pasar diluar kebutuhan lokal atau pentingnya ekspor sebagai pendorong ekonomi lokal, pengembangan ekonomi lokalpun mempunyai keselarasan. Pengembangan ekonomi lokal tidak menyangkal pentingnya ekspor sebagai pendorong ekonomi lokal (Blakeley, 1989:62).

Boudeville (dikutip dari Gore, 1979) berpendapat bahwa perekonomian wilayah bertumbuh jika industri yang dikembangkan pada pusat wilayah nodal bersifat propulsif dan sifat industrinya terhadap pertumbuhan menyebar melalui interkoneksi ekonomi terhadap daerah belakang. Disamping wilayah-wilayah nodal harus memenuhi kondisi dinamika hubungan ekonomi internal lebih intensif dari pada hubungan eksternalnya dalam mengintegrasikan ruang-ruang ekonomi yang abstrak sebagai ruang yang nyata yang ditentukan oleh aktivitas ekonomi. Dengan gambaran Model Keterkaitan/jaringan berikut:



GAMBAR 2.1
Model Keterkaitan/Jaringan

Sumber: Setyono (2003): 18

Secara umum interaksi atau keterkaitan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu, keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Keterkaitan ke belakang diartikan sebagai tingkat rangsangan yang diciptakan oleh pembangunan suatu industri terhadap pengembangan industri yang menyediakan bahan baku (*input*), bagi investasi tersebut. Sedangkan keterkaitan ke depan diartikan sebagai tingkat rangsangan yang diciptakan oleh pengembangan industri terhadap industri yang menggunakan produksi industri yang pertama sebagai bahan baku (*input*). *Backward linkage* adalah pengaruh kebelakang, Sedangkan *Forward linkage* adalah pengaruh kedepan yang ditimbulkan oleh perkembangan suatu wilayah.

TABEL. II.1
Ukuran Keterkaitan Kedepan dan Kebelakang Secara Sistimatis.

	Keterkaitan ke depan rendah	Keterkaitan ke depan tinggi.
Keterkaitan ke belakang tinggi	Manufaktur untuk memenuhi permintaan akhir.	Manufaktur untuk memenuhi permintaan antara.
Keterkaitan ke belakang rendah	Produksi tersier untuk memenuhi permintaan akhir	Produksi primer untuk memenuhi permintaan antara.

Sumber: Chenery dan Watanabe dikutip dari Herrick dan Kindleberge (1984)

2.4 Perkembangan Daerah Belakang

2.4.1 Pengertian dan Kajian Daerah Belakang

Daerah belakang (*Hinterlands*) merupakan wilayah pinggir dan terbelakang dengan keanekaragaman tingkat pendapatan, produktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta potensi sumber daya yang dimiliki relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan pertumbuhan yang tidak seimbang dalam investasi dari satu kesatuan wilayah (Perspektif teori pengembangan wilayah).

Dalam penentuan kriteria kawasan belakang seperti tersebut di atas, juga akan dikaji berdasarkan tingkat kesenjangan antar wilayah yang berada di Kabupaten Alor. Permasalahan kesenjangan dimaksud adalah antara pusat pertumbuhan kota yang maju dengan daerah belakang yang kurang maju. May (1984:61) menjelaskan bahwa tingkat potensi pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan cara untuk melihat seberapa jauh hasil perkembangan wilayah dan hasil pembangunan di wilayah tersebut serta besarnya kemampuan wilayah untuk menerima perkembangan. Semakin tinggi tingkat potensi perkembangan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk tumbuh dan menerima perkembangan. Hal ini akan memberikan dampak kepada daerah yang

mempunyai tingkat potensi pelayanan sosial ekonomi dan perhubungan yang tinggi untuk lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah tingkat potensi perkembangan yang rendah.

Berdasarkan uraian di atas, daerah belakang dibatasi menurut perkembangannya sesuai dengan cakupan deliniasi antar wilayah kecamatan sebagai pendekatan penelitian dan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan yang terjadi atas variabel sektor ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan penelitian.

2.4.2 Peran Sektor Potensial dan Strategis (Sektor Unggulan)

Sektor Potensial yang dipahami dalam pengertian potensi wilayah yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai sektor perekonomian wilayah di kabupaten alor yang diarahkan pada kebijakan pembangunan ekonomi kota yang diselaraskan dengan pembangunan ekonomi perdesaan. Peran sektor potensial dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan di selaraskan dengan struktur perekonomian sebagai kontribusi pertumbuhan PDRB di Kabupaten Alor.

Kontribusi sektor potensial seperti tersebut diatas selanjutnya dapat dianalisis untuk mengetahui pergeseran sektor ekonomi dalam penentuan sektor strategis sebagai komponen pertumbuhan ekonomi daerah dimasa yang akan datang. Sebagai sektor strategis diharapkan akan mampu mendorong perkembangan wilayah dan meningkatkan Pendapatan per kapita masyarakat di kabupaten Alor.

Umumnya ketergantungan ekonomi di antara unit kawasan andalan pada wilayah yang lebih besar akan berpengaruh terhadap polarisasi yang

menimbulkan ketidak seimbangan pendapatan yang cenderung terjadi pada daerah belakang yang kurang berkembang dengan perkembangan teknologi di daerah yang maju, walaupun arus faktor internal tidak selalu dalam keseimbangan yang klasik (Indeks Williamson).

Disamping pertumbuhan ekonomi wilayah yang dikemukakan di atas, perlu pula diantisipasi bahwa pertumbuhan wilayah sangat dipengaruhi oleh *implicit policy* (Munir, 2002), yaitu kebijakan pembangunan sektoral didasarkan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas dari daerah dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja dan merangsang peningkatan produktivitas. Melalui pendekatan sektor pembangunan secara terpadu sehingga pembangunan lebih diarahkan pada upaya mengeksplorasi wilayah sebagai daerah pusat pertumbuhan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut Sukirno (1976) dan Arsyad (1999) bahwa cara terbaik yang digunakan dalam pembangunan daerah adalah dengan pengembangan sektor pertanian. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan:

1. Sebagian besar penduduk hidup dan bekerja di sektor pertanian, padahal di sektor pertanian merupakan daerah kantong kemiskinan dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.
2. Bila kemiskinan di daerah pertanian dibiarkan maka akan terjadi urbanisasi yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran di kota-kota dengan segala konsekuensinya.

3. Jika dilakukan pilihan pembangunan di sektor industri, pengembangan sektor ini tidak dapat menampung tambahan tenaga kerja secara signifikan, selain itu sektor industri sangat rentan dengan kelestarian lingkungan.
4. Sektor pertanian perlu terus dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat serta untuk memperoleh devisa melalui kegiatan ekspor.
5. Sektor pertanian telah terbukti memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh krisis ekonomi, walaupun sektor ini dinilai lamban dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, karena sektor pertanian dinilai lamban dalam mendongkrak pertumbuhan daerah maka pembangunan sektor pertanian harus diikuti dengan pembangunan sektor-sektor prioritas lainnya, seperti agroindustri dan agribisnis atau industri pengolahan yang bahan bakunya bersumber dari sektor pertanian.

Secara umum kondisi pembangunan daerah Kabupaten Alor dari aspek ekonomi, hingga tahun 1999, sektor primer (pertanian) masih mendominasi struktur ekonomi yakni sebesar 39,38% dengan laju pertumbuhan 2,91%, disusul sektor sekunder (industri) sebesar 2,15% dengan laju pertumbuhan 0,66% dan sektor tersier (perdagangan) sebesar 14,48% dengan laju pertumbuhan 2,65%.

Kondisi fluktuatif tersebut, sebenarnya tidak menggeser posisi sektor pertanian sebagai kontributor terbesar dalam PDRB, sehingga perlu dilakukan bagaimana memposisikan pembangunan pertanian dilihat dari berbagai dimensi dan cakupan peran yang diemban. Menurut Muslim Nasution dalam Raharjo

(1997) bahwa sektor pertanian memiliki dimensi dan cakupan peran yang tidak hanya sebagai penyedia pangan, tetapi meliputi hal-hal:

1. Menjamin keberlangsungan hidup masyarakat secara luas, baik yang hidup di sektor pertanian maupun non pertanian melalui peningkatan pendapatan riil masyarakat.
2. Mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan serta kesejahteraan.
3. Memberikan akses kepada masyarakat pertanian terhadap kebutuhan hidup di luar pangan sejalan dengan peningkatan aspirasi masyarakat dalam mendukung dan mempercepat proses transformasi struktur perekonomian nasional.
4. Mengakomodasikan pergeseran sistim budaya, nilai-nilai dan kehidupan masyarakat sebagai akibat perubahan yang terjadi.

2.4.3 Peran Daerah Belakang Dalam Perkembangan Kota

Paradigma Friedman (1976) membahas adanya pandangan suatu sistim keruangan yang lengkap dengan melihat daerah pusat dan daerah tepi sebagai suatu sistim. Wilayah pusat di sini diartikan sebagai suatu teritorial tertentu dengan subsistim masyarakat yang teratur memiliki kapasitas tinggi untuk memacu pembaharuan dan menyerap perubahan inovasi. Sedangkan daerah tepi merupakan subsistim yang jalur perkembangannya terutama ditentukan atau dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang ada di pusat, sehingga daerah ini mempunyai ketergantungan substansial. Dengan keadaan tersebut, dapat dilihat bahwa ada jalinan yang berupa interaksi antara wilayah pusat dengan daerah tepi dalam hubungan keruangan.

Hadjisarosa dalam Sukirno (1981) mengetengahkan bahwa pada suatu daerah terdapat hubungan dan ketergantungan antara pusat dengan wilayah yang mengitarinya. Daerah belakang membutuhkan barang-barang yang dihasilkan oleh daerah pusat dan sebaliknya daerah pusat membutuhkan bahan pangan dan tenaga kerja dari daerah-daerah belakang. Interaksi antara kota pusat dan daerah belakang dapat menimbulkan ketidakseimbangan struktural di daerah bersangkutan, demikian pula antara pusat besar dengan pusat-pusat kecil lainnya. Interaksi penduduk di daerah perkotaan lebih tinggi intensitasnya dibandingkan dengan daerah yang dipengaruhinya. Interaksi tersebut menunjukkan korelasi negatif terhadap jarak, semakin jauh jarak antara dua pusat berarti semakin rendah intensitas interaksinya. Berdasarkan pada korelasi dari keterkaitan interaksi maka dapat diartikan bahwa semakin lengkap fasilitas pelayanan yang tersedia di suatu pusat berarti semakin jauh wilayah pelayanannya (wilayah pengaruhnya).

Dari uraian tersebut terlihat hubungan bahwa ketergantungan daerah belakang sangat besar terhadap peranan kota sebagai pusat pertumbuhan, dimana dalam interaksinya menimbulkan pengembangan terhadap timbulnya unit-unit pelayanan yang akan mendorong daerah belakang untuk dapat berperan sebagai sub pusat pertumbuhan terdepan di daerah belakang akan menghasilkan tingkat perkembangan yang lebih baik dan merata pada seluruh wilayah.

Permasalahannya adalah bagaimana memadukan kepentingan antara perkembangan kota melalui pertumbuhan pembangunan sektor ekonomi yang pesat dengan kondisi sektor pembangunan ekonomi pada daerah belakang yang tingkat pertumbuhannya cenderung menurun. Selanjutnya pengaruh perbedaan

pertumbuhan antara kota dengan daerah belakang tidak dapat dihindari dan merupakan potensi dalam menggali komposisi sektor unggulan antar wilayah.

Pengaruh dari komposisi tersebut akan berdampak terhadap pembangunan secara menyeluruh. Peran dari masing-masing sektor pembangunan ekonomi wilayah akan dapat mengarahkan acuan kebijakan pembangunan dalam program strategis yang lebih inovatif dan aspiratif untuk menciptakan keterpaduan pembangunan. Permasalahannya adalah sejauh mana pengaruh dari sektor pembangunan ekonomi tersebut berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan bagi daerah belakang dan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan dalam pengelolaan sektor pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan konsep pengembangan wilayah yang berusaha mewujudkan pemerataan perkembangan antar daerah, dimana keterkaitan dan keterpaduan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dengan mengutamakan penekanan pada kesenjangan tingkat pertumbuhan antar wilayah. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah penduduk di seluruh wilayah dapat memperoleh berbagai pelayanan sosial ekonomi dan lainnya sehingga perkembangan antar daerah dapat mudah terwujud.

2.5 Peran Kota dalam Perkembangan Wilayah

Peran kota dalam suatu wilayah sebagai elemen nodal yang terjadi dalam suatu sistem hubungan antara kota dan wilayah disekelilingnya, menurut Daldjoeni (1998), dahulu kota-kota di zaman Yunani Kuno tidak mengenal batas yang tegas secara ekonomis maupun politis antara kota dengan pedesaan (agraris)

diluarnya. Memang nampak tembok kota memisahkan penduduk kota dengan penduduk yang bertani diluarnya, tetapi sebenarnya antara kota dan wilayah sekelilingnya itu terdapat relasi yang simbiotis (Daldjoeni, 1998:76). Di Eropa interaksi kota-wilayah memunculkan sebutan untuk kawasan luar kota yang agraris, misalnya Umland (sebutan geografis di Jerman dan Skandinavia); di Inggris hinterland. Berdasarkan fungsi pengaruh kota terhadap pedalaman memunculkan sebutan *catchment area*, *space of influence* dan *urban field* serta *city region* (Daldjoeni, 1998:77). Selanjutnya Von Thunen dan Losch menjelaskan bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terlepas dari adanya kegiatan pembangunan di wilayah tersebut, hal ini terlihat dari distribusi keruangan dan kegiatan manusia bertumpu pada faktor jarak dan hubungan dari tiap-tiap lokasi yang juga dapat meliputi lebih dari satu pusat pertumbuhan (Daldjoeni, 1998). Dalam pengertian lain, kedudukan kota terhadap wilayah sekelilingnya adalah sebagai inti dengan wilayah pinggiran, yaitu dalam struktur ruang wilayah sebagai pusat dari kegiatan, yang menjadi pusat pertumbuhan bagi pengembangan suatu wilayah, pandangan tentang konsep pertumbuhan menekankan pada peran dan fungsi dari pusat pelayanan yang oleh para ahli mengutarakan konsep kutub pertumbuhan (Perroux, 1964), konsep pusat pertumbuhan (Boudeville, 1966), konsep integrasi ruang ekonomi (Friedman, 1976) yang dalam rencana tata ruang diterjemahkan kota-kota dengan hierarki tertentu yang melayani wilayah pengembangan. Dengan demikian fungsi dari pelayanan pembangunan fasilitas mengelompok pada pusat kota. Dengan demikian pengaruh kota sangat besar terhadap perkembangan suatu wilayah.

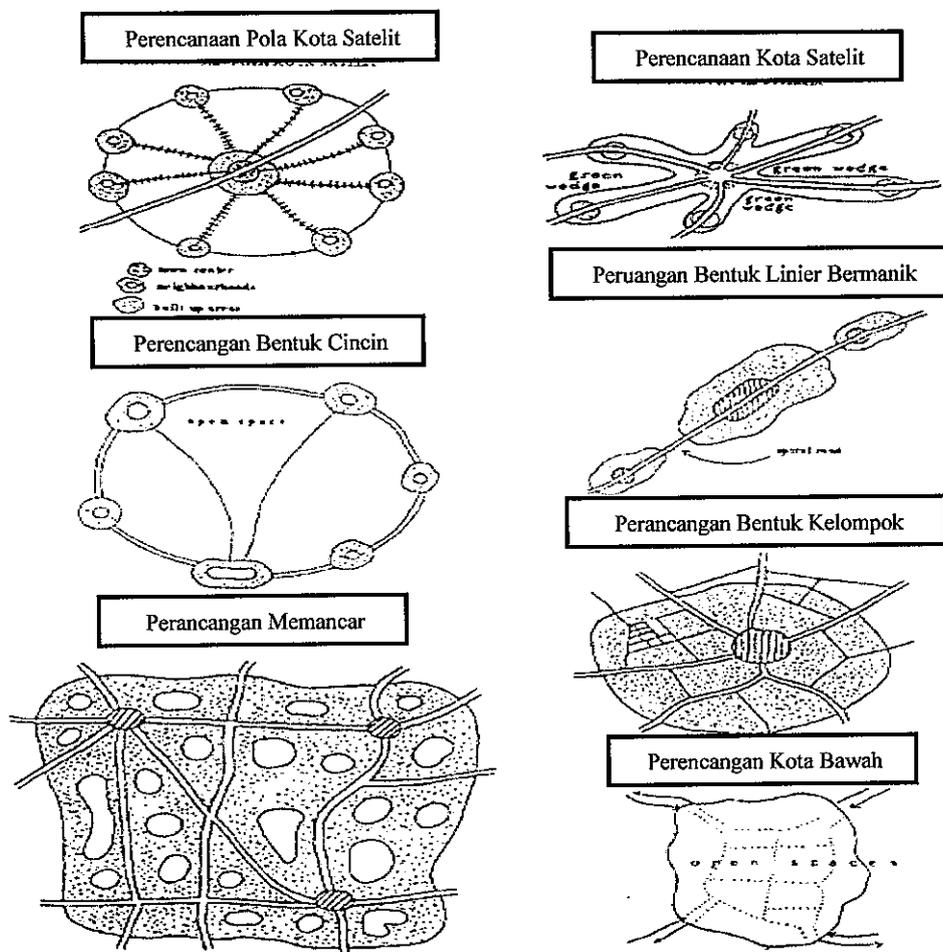
Perkembangan kota, selanjutnya menurut Friedman (1976) terjadi lebih dahulu dari pada pengembangan wilayah. Peran kota dalam suatu sistim perkotaan dipandang sebagai agen dinamis pengembangan wilayah. Sistim perkotaan bukan hanya membangkitkan namun juga menjadi mediator pengembangan wilayah. Kota sebagai pusat pelayanan merupakan pusat pemerintahan dan administrasi yang berperan sebagai pusat kelembagaan dan informasi melalui hubungan komunikasi dalam menunjang sektor pembangunan sosial, ekonomi dan administrasi ke wilayah sekitarnya sehingga menjamin keterkaitan fungsi pembangunan, inovasi dan kemajuan yang serasi, seimbang dan selaras antara kota dan wilayah perdesaan (belakang).

Perkembangan kota dan kebijakan ekonomi juga mempengaruhi perkembangan suatu kota. Hal ini disebabkan perkembangan kota pada dasarnya adalah wujud fisik perkembangan ekonomi. Kegiatan ekonomi sekunder dan tersier seperti manufaktur dan jasa-jasa cenderung untuk berlokasi di kota-kota besar karena faktor *urbanization economics* yang secara sederhana diartikan sebagai kekuatan yang mendorong aktivitas kota sebagai pusat (*market*), tenaga kerja ahli, pasar produksi dan lainnya yang pada gilirannya akan menunjang aktivitas tersebut beropersi dengan lebih efisien.

Penetapan hierarki Kota berdasarkan pada RTRW mempunyai tingkat secara berjenjang, sistim hierarki kota-kota dari Propinsi dan Kabupaten menunjukkan kedudukan ibukota hampir selalu sebagai kota dengan orde satu, sedangkan kota-kota lainnya sesuai dengan urutan perkembangan kotanya mempunyai orde dua dan tiga. Konsep ini didasarkan pada teori tempat sentralnya

Christaller, yaitu tempat pusat suatu model penentuan lokasi yang berorientasi pasar dengan dasar pemilihan lokasi dalam hal ini kota menjadi titik pusat yang melayani wilayah berbentuk hexagonal disekelilingnya dan bersinggungan dengan daerah lain secara matematik menguntungkan karena tidak ada wilayah yang tidak terlayani (Glasson, 1990:136).

Perkembangan kota sebagai hasil perancangan dimana dapat terbentuk dari beberapa wilayah pengaruh sebagai alternatif, dalam Gambar.2.2.



GAMBAR 2.2
Beberapa Alternatif Bentuk Kota
Sumber: Yunus, 2001:133 - 141

Kebijakan dalam pengembangan Tata Ruang Kabupaten Alor tahun 1997-2017 hierarki kota Kalabahi sebagai ibu kota Kabupaten Alor sebagai kota orde satu dengan jangkauan pelayanan adalah seluruh Kabupaten, sebagai kota orde satu Kedudukan ibukota kabupaten dalam RTRW ini berarti mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sesuai dengan strategi pusat-pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan kegiatan kota di daerah belakangnya.

Parr (1999) mengatakan ada beberapa strategi pusat pertumbuhan yaitu:

1. Membangkitkan Kembali Daerah Terbelakang

Daerah terbelakang dipandang sebagai daerah yang memiliki karakteristik rendahnya tingkat ketrampilan masyarakat, pendapatan perkapita, tingkat kesejahteraan penduduk dan tingkat pelayanan fasilitas sebagai prasarana dasar maupun utilitas yang ada.

Strategi ini dilakukan guna menciptakan struktur ruang wilayah yang lebih kompetitif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan antara pergerakan modal secara inter-regional bertujuan untuk mencegah aliran modal ke luar wilayah serta menurunkan laju pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Hasil yang diharapkan adalah berupa transformasi struktur ruang ekonomi wilayahnya.

2. Mendorong Dekonsentrasi Wilayah

Strategi ini dilakukan guna menekan tingkat konsentrasi wilayah serta bertujuan untuk membentuk suatu struktur ruang yang tepat khususnya pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan. Artinya, pengembangan dilakukan pada wilayah non-metropolitan guna menekan peranan wilayah

metropolitan yang sudah terlalu besar, yang menjadi masalah adalah tidak semua lokasi bisa dijadikan pusat pertumbuhan.

3. Memodifikasi Sistem Kota-Kota

Tujuan strategi ini adalah untuk mengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan. Dengan adanya pengaturan sistem kota-kota dengan hierarki yang terstruktur, diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.

4. Pencapaian terhadap Keseimbangan Wilayah

Strategi ini muncul akibat kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional, biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada wilayah-wilayah tersebut.

2.6 Model Kajian Pengaruh Pertumbuhan Daerah Belakang

Ketidakmerataan pertumbuhan antar wilayah telah berpengaruh terhadap perkembangan wilayah yang pesat dengan perkembangan wilayah yang lamban. Bila ada wilayah yang perkembangannya lamban serta miskin dengan sumber daya dimiliki, maka kecenderungan dari wilayah yang lamban perkembangannya akan menggantungkan diri terhadap pengaruh dari daya tarik wilayah yang pesat perkembangannya. Konsekuensi ketergantungan ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif bila tidak ada peran serta masyarakat dan intervensi kebijakan pemerintah, Aspek ini menjadi penting sebagai suatu komitmen dalam pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan dalam proses pembangunan.

Menurut Parr (1973) ada dua dasar rasional yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan secara keseluruhan, yaitu:

1. Konsentrasi Prasarana Kota Pada Pusat Pertumbuhan

Pemusatan prasarana kota pada pusat-pusat pertumbuhan yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan utama ekonomi dan sosial. Dalam konteks umum, penyediaan prasarana dibatasi pada penyediaan prasarana skala luas. Prasarana skala luas akan menciptakan eksternalitas, hal ini akan membuat kota menjadi lebih menarik bagi masyarakat dalam konteks lokasi dan masuknya investasi. Dalam penyediaan prasarana ini peranan investasi pemerintah lebih besar.

2. Konsentrasi Aktivitas Perekonomian (aglomerasi)

Konsentrasi aktivitas ekonomi di kota pusat pertumbuhan terutama industri memiliki kaitan ke depan dan ke belakang. Kondisi ini dipengaruhi oleh aliran investasi yang masuk langsung ke pusat pertumbuhan dan dikaitkan dengan eksploitasi aglomerasi ekonomi.

Dalam Konteks di Indonesia upaya untuk meningkatkan pertumbuhan antar wilayah telah dilakukan semenjak Repelita I dengan berbagai program Inpres, agar tercapai distribusi pemerataan pertumbuhan keseluruh wilayah, namun kenyataannya masih terdapat kesenjangan pertumbuhan antara wilayah. Menurut Soejarto (1991) bahwa faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pola dan struktur pusat-pusat pelayanan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) faktor manusia; (2) faktor kegiatan manusia dan; (3) faktor pola pergerakan manusia pada satu pusat kegiatan ke pusat kegiatan lainnya. Selanjutnya diterangkan

bahwa faktor manusia menyangkut segi-segi perkembangan penduduk kota baik karena kelahiran maupun karena migrasi ke kota, perkembangan tenaga kerja, perkembangan status sosial dan kemampuan ilmu pengetahuan serta penyerapan teknologi. Faktor kegiatan manusia menyangkut segi-segi kegiatan kerja, kegiatan fungsional, kegiatan perekonomian kota dan kegiatan hubungan regional yang lebih luas. Faktor pola pergerakan disebabkan oleh faktor perkembangan penduduk yang disertai dengan perkembangan fungsi kegiatannya yang akan membentuk pola hubungan antara pusat-pusat kegiatan dengan sub-sub pusat kegiatan lainnya.

Yunus (1999) mengatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab perbedaan pertumbuhan pada suatu wilayah, akan menghasilkan pola-pola keruangan yang khas yaitu: (1) Fasilitas-fasilitas khas tertentu (*specialized facilities*); (2) Faktor ekonomi eksternal (*external economies*); (3) faktor yang saling merugikan antar fungsi tidak serupa dan (4) faktor kemampuan fungsi ekonomi yang berbeda. Aji (1990) mengatakan bahwa dalam menentukan ukuran pertumbuhan wilayah dapat dilihat dari berbagai indikator yang ada, salah satunya adalah indikator tingkat kesejahteraan masyarakatnya dapat menunjukkan prestasi tingkat kualitas hidup.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan wilayah di Kabupaten Alor dalam penelitian ini terdapat beberapa tolok ukur yang menjadi acuan, dimana dari landasan teori yang dikemukakan dapat menjadi penentuan variabel penelitian. Adanya perkembangan wilayah di Kabupaten Alor yang masih tertinggal dan terisolir dan ketidak seimbangan pertumbuhan pusat kota dengan daerah belakang telah mempengaruhi tingkat pertumbuhan yang menjadi

fenomena perkembangan wilayah di Kabupaten Alor. Dari kondisi fenomena tersebut menunjukkan permasalahan terhadap sektor unggulan dipusat pertumbuhan dengan daerah belakang kurang memberikan *spread effect* atau *trickle down effect* dan intervensi kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan integrasi pusat pertumbuhan dengan daerah belakang. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan daerah belakang yaitu distribusi Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) tidak seimbang, Kontribusi sektor pembangunan yang tidak merata, prosentase tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih sangat rendah, serta penyebaran fasilitas umum dan sosial ekonomi yang terpusat pada ibu kota kabupaten.

Berdasarkan variabel indikator pertumbuhan wilayah maka dalam penelitian ini variabel terpengaruh (*dependent variable*) akan digunakan dalam mengukur tingkat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Alor, yaitu:

1. Identifikasi Struktur wilayah dengan variabel kelengkapan fasilitas yang meliputi ketersediaan fasilitas sosial ekonomi.
2. Identifikasi tingkat kesejangan antar wilayah dengan variabel Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) masing-masing kecamatan.
3. Identifikasi Potensi wilayah dengan variabel sektor basis masing-masing kecamatan.
4. Kajian Pengaruh sektor unggulan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang dengan variabel terpengaruh Kontribusi PDRB kecamatan adalah (Y), yang menjadi indikator perkembangan wilayah yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan wilayah secara menyeluruh.

5. Variabel mempengaruhi (X) adalah sembilan sektor usaha yang menjadi sektor unggulan dari masing-masing wilayah.

2.7 Ringkasan Kajian Teori

Berdasarkan uraian di atas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah belakang dan untuk membatasi faktor-faktor tersebut sebagai variabel dalam kajian sektor unggulan sangat berpengaruh terhadap potensi pengembangan wilayah, tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan menggunakan parameter yang berpengaruh dari Kontribusi Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB), dan kajian struktur wilayah sesuai hierarki kota-kota dengan parameter penyediaan sarana sosial ekonomi wilayah, kependudukan dan aksesibilitas transportasi.

Dari pembahasan atas kesimpulan kajian teori yang berhubungan dengan sektor unggulan yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang adalah:

- Dalam pendekatan teori-teori tersebut yang mempunyai relevansi dengan perkembangan wilayah yang berkembang, tingkat perkembangan sektor pembangunan yang berpotensi bagi peningkatan pertumbuhan daerah belakang, tidak semata-mata sebagai keunggulan komparatif akan tetapi bagaimana pengaruh signifikan dari perkembangan sektor pembangunan ekonomi wilayah.
- Penggunaan teori-teori yang menunjukkan faktor-faktor atau variabel-variabel yang menentukan pengaruh pertumbuhan ekonomi wilayah.

TABEL II.2
Tabulasi Rangkuman Kajian Teori

No	Teori / Pendapat	Pengelompokan Unsur-unsur Teori/Pendapat	Indikator	Parameter	Unsur Yang Diperhatikan
1	2	3	4	5	6
I.	KAJIAN TINGKAT KESENJANGAN ANTAR WILAYAH.				
1.	Dumary (1997), Permasalahan wilayah bukan ada atau tidak adanya kesenjangan (perbedaan) pertumbuhan namun bagaimana pembangunan wilayah dapat dikonsepsikan dalam perpektif jangka panjang dan bersinergis dengan kemandirian ekonomi wilayah.	Pengaruh pusat pertumbuhan yang berdampak terhadap daerah belakang/hinterland yang kurang berkembang dalam interaksi perkembangan sosial ekonomi yang tidak seimbang, sehingga dalam perkembangannya sangat tergantung kepada wilayah pusat pertumbuhan yang dapat menimbulkan tingkat kesenjangan antar wilayah.	Tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh terhadap kontribusi Pendapatan Domestik Regional Brutto/PDRB sebagai acuan dalam mengetahui seberapa besar tingkat kesenjangan yang terjadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Brutto/PDRB dalam kurun waktu 5 – 10 tahun. ▪ Laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5 – 10 tahun 	Sebagai parameter dalam mengetahui tingkat kesenjangan wilayah dengan kriteria tingkat pertumbuhan (Vw 0,4 – 0,5%)
2.	Hadjisarosa dalam Sukirno (1981), Ada ketergantungan anatar pusat kota dengan wilayah yang mengitarinya. Interaksi antara kota pusat dengan wilayah belakang dapat menimbulkan ketidak seimbangan struktural di daerah yang bersangkutan.				
3.	J.Freidmand,(1979) Adanya sistim keruangan antara daerah pusat dan daerah tepi dimana Wilayah pusat sebagai daerah teritorial yang memiliki kapasitas tinggi dan daerah tepi sebagai subsistim perkembangannya yang mempunyai ketergantungan substansial dengan wilayah pusat.				

1	2	3	4	5	6
II.	KAJIAN STRUKTUR WILAYAH.				
1.	Sujarto (1981). Pusat pertumbuhan wilayah berawal dari pusat kota dan secara hierarki akan berdampak pada wilayah belakang dengan orientasi ekonomi.	Sebagai acuan dalam menentukan tingkat pelayanan kota-kota dengan aktivitas masyarakat sesuai kondisi sosial ekonomi guna terbentuknya struktur wilayah melalui hubungan orde kota yang diperlukan sebagai sistem pengembangan wilayah.	Ketersediaan fasilitas umum, sosial, ekonomi dalam upaya pelayanan terhadap aktivitas masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebutuhan sarana Sosial, Kesehatan ▪ Sarana Pendidikan ▪ Jaringan transportasi darat, laut dan udara ▪ Daerah Irigasi ▪ Fasilitas Kantor ▪ Sarana Perdagangan. 	Sebagai parameter dalam menentukan syarat perhitungan nilai Koefisien reproduksi ($Kr \geq 0,900$), dan nilai Koefisien skalabilitas ($Ks \geq 0,600$).
2.	Christaller dalam Glasson (1990:136), Teori tempat sentranya christaller tempat pusat sebagai suatu model penentuan lokasi yang berorientasi pasar, dalam hal ini kota menjadi titik pusat yang melayani wilayah berbentuk hexagonal disekelilingnya dan bersinggungan dengan daerah lain.				
3.	Richardson (1974), Sistem pusat pertumbuhan akan menjalar secara efektif dalam distribusi pelayanan barang dan jasa.				
III.	KAJIAN WILAYAH PENGARUH.				
1.	J.Freidmand, (1979) Adanya sistem keruangan antara daerah pusat dan daerah tepi dimana Wilayah pusat sebagai daerah teritorial yang memiliki kapasitas tinggi dan daerah tepi sebagai subsistem perkembangannya yang mempunyai ketergantungan substansial dengan wilayah pusat.	Sebagai acuan dalam menentukan: Kekuatan keterkaitan antara sentra komunitas dengan pusat pengembangan wilayah. Menentukan kekuatan tempat kedudukan dari setiap pusat kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi jaringan jasa dan transportasi.	Aksesibilitas keterkaitan hubungan yang kuat antar pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan antar wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan Penduduk antar wilayah ▪ Jarak pencapaian antar wilayah Jaringan transportasi darat, laut dan udara 	Sebagai parameter dalam menentukan syarat wilayah pengaruh dengan Indeks Gravitas $P1.P2$ $I = \frac{d_{12}^2}{\dots}$
2.	Parr (1973), Pengaruh kinerja pusat pertumbuhan secara keseluruhan yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsentrasi prasarana pada pusat pertumbuhan/kota ▪ Konsentrasi aktivitas perekonomian. (aglomerasi ekonomi) 				
3.	Daidjoeni, (1998:76), <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kota sebagai suatu elemen dari wilayah yang terjadi dalam suatu sistem hubungan antar kota dan wilayah sekelilingnya. ▪ Kota dan wilayah sekitarnya terdapat relasi yang simbiotis. 				

1	2	3	4	5	6
<p>IV. KAJIAN POTENSI SEKTOR STRATEGIS.</p>					
<p>1.</p>	<p>Sukirno, (1981:155),</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkembangan suatu daerah tidak tergantung pada besarnya peran Kota Pusat ▪ Perkembangan ditentukan oleh potensi sumber daya yang ada. ▪ Adanya ketergantungan antara pusat dan wilayah sekitarnya, interaksi kebutuhan dan interaksi fasilitas pelayanan 	<p>Potensi wilayah dapat ditinjau oleh sektor-sektor yang memiliki bagi aktivitas perekonomian sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan.</p>	<p>Pengaruh kinerja sektor potensi yang mempunyai prospek jangka panjang melalui aktivitas perekonomian wilayah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penentuan sektor basis dan non basis melalui Pendapat Domestik Regional Bruto/PDRB wilayah. ▪ Kajian pengaruh sektor basis secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan wilayah belakang 	<p>Sebagai parameter penentuan sektor basis ≥ 1.</p> <p>Parameter pengaruh yang signifikan secara simultan $\geq 5\%$, dan $\geq 0,900$ secara parsial.</p>
<p>2.</p>	<p>May, (1984:61), Semakin tinggi tingkat potensi pengembangan suatu wilayah akan berdampak kepada daerah yang tingkat pelayanan sosial, ekonomi dan perhubungan lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah yang tingkat potensi perkembangannya rendah.</p> <p>Fal tersebut dikemukakan bahwa, Permasalahan umum pertumbuhan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia adalah disebabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan lahan yang belum optimal ▪ Tingkat pertumbuhan pertesaan dan perkotaan yang tidak seimbang ▪ Kemampuan mengelola sumber daya yang masih rendah belum terjangkau oleh teknologi. ▪ Tingkat pendidikan dan ketrampilan yang relatif rendah. 				
<p>3.</p>	<p>Arsyad (1999), Bahwa cara terbaik yang digunakan dalam pembangunan daerah adalah dengan pengembangan sektor pertanian .dengan demikian sektor pertanian dinilai lamban dalam mendorong pertumbuhan sehingga perlu di ikuti oleh sektor prioritas lainnya seperti agrobisnis dan agro industri dengan bahan bakunya adalah bersumber dari sektor pertanian.</p>				

BAB III PERKEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN ALOR

3.1 Perkembangan Kabupaten Alor Dalam Struktur Wilayah Nasional

Perkembangan wilayah dan kota selama Pembangunan Jangka Panjang I yang telah memacu sektor industri dan perdagangan bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia secara berkesinambungan. Perkembangan wilayah dan kota di Indonesia dapat dilihat sebagai suatu hasil *resultante* kegiatan sosial dan ekonomi dipengaruhi oleh interaksi kebijakan pemerintah dan reaksi masyarakat.

Intensitas perkembangan wilayah dan kota yang berlangsung dengan cepat di bidang industri perdagangan menyebabkan berbagai permasalahan pokok yang ditimbulkan, terutama permasalahan kemiskinan. Data survey sosial ekonomi nasional (2000) menunjukkan bahwa prosentase penduduk miskin daerah perdesaan di propinsi-propinsi Kawasan Timur Indonesia (KTI) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), yaitu 28,06% di KTI dan 17,65% di KBI untuk tahun 1996. Kemudian di tahun 1999 yaitu 32,07% di KTI dan 24,32% di KBI.

Penyebab kemiskinan penduduk baik di kota maupun di desa adalah rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan serta tingkat kesehatan yang menyebabkan rendahnya kemampuan untuk berusaha. Penyebab lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya akses terhadap sarana dan prasarana sosial

ekonomi dan informasi umum. Kondisi tersebut di atas merupakan suatu pendekatan pembangunan dari aspek wilayah dan bersifat sektoral yang menjadi tantangan dan harus dihadapi yaitu menyelesaikan masalah kemiskinan baik di kota maupun di perdesaan.

Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas akan berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, disamping keterbatasan lain dalam hal penguasaan teknologi dalam rangka pengembangan diversifikasi kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selama Repelita IV rata-rata adalah 6,2% pertahun harus ditunjang dengan SDM yang berkualitas, dalam hal ini tantangan yang dihadapi adalah mempersiapkan masyarakat kota dan perdesaan dengan ketrampilan serta penguasaan teknologi agar mampu berperan secara aktif dalam pembangunan.

Ketersediaan sumber daya alam sangat penting untuk meningkatkan laju pembangunan mengingat pemanfaatan sumber daya perlu dilakukan secara hati-hati dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dengan melihat ketersediaan daya dukung atau meningkatnya lahan pertanian di daerah pingiran kota dan kepastian hukum yang akan menegakan produk RUTR karena kurang adanya ketegasan dalam pengendalian. Daya dukung juga berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya air terutama pada daerah perkotaan yang mulai mendekati tingkat batas dari daerah tangkapan. Tantangan yang dihadapi adalah mengatur penggunaan dan pengawasan tanah (sumber daya air), melestarikan lingkungan hidup, penegakan hukum pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab dan pembangunan yang berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan.

Ketimpangan antar wilayah terjadi sebagai bentuk-bentuk polarisasi dalam strategi pengembangan wilayah yang selama enam Pelita telah meletakkan pemerintah pusat sebagai penentu dengan pendekatan konsep pembangunan yang diterapkan saat itu diadopsi dari pemikiran teori *economic base* (Douglass, 1955) dan *growth pole* (Perroux, 1955) mengakibatkan kesenjangan antar wilayah semakin melebar yaitu Kota – Desa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) – Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebagai fenomena global. Di dalam perencanaan pembangunan diketahui bahwa pendekatan pembangunan yang lebih bersifat sektoral kurang memberikan perhatian pada keseimbangan perkembangan antar wilayah tetapi cenderung mengarah kepada munculnya kesenjangan antar wilayah (*regional disparitas*). Tantangan dalam jangka panjang pendekatan sektoral yang kurang memperhatikan aspek *geography* atau *spatial* hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dalam arti fisik maupun sosial ekonomi.

3.2 Perkembangan Wilayah Di Kabupaten Alor

Perkembangan wilayah dan kota semakin pesat terutama pada Wilayah Pembangunan (WP) di kota-kota besar yang terjadi selama kurun waktu dua dasa warsa terakhir telah menimbulkan perkembangan yang tidak merata dalam peningkatan pertumbuhan sehingga mengakibatkan ketimpangan (*disparitas*) seperti yang dialami oleh Kabupaten Alor, dimana terdapat perbedaan tingkat perkembangan antara wilayah pusat pertumbuhan di kota kabupaten dengan daerah belakang yang jauh dari pusat pertumbuhan, dalam hubungan suplai modal yang rendah menyebabkan investasi untuk berbagai produksi tidak berkembang.

Kota Kalabahi merupakan Ibu Kota Kabupaten Alor sekaligus sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan serta kegiatan perekonomian di Kabupaten Alor.

Peran dan fungsi dari Kabupaten Alor dalam konstelasi regional sebagaimana termuat di RUTR (1997) termasuk Kota Orde II dalam sistim Satuan Wilayah Pengembangan (SWP II) dari Propinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki kelebihan:

1. Sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Pulau Flores dan sebagai pusat pertumbuhan pada Satuan Wilayah Pengembangan II dengan wilayah pengembangan antara daerah melalui pelabuhan laut dan pelabuhan udara.
2. Letak yang strategis dari Kota Kalabahi dilalui oleh Jalur Jalan Arteri Primer yang menghubungkan kawasan barat, kawasan timur, kawasan utara dan kawasan selatan serta kecamatan-kecamatan lain dalam satu pulau.
3. Kota Kalabahi sebagai pintu gerbang pada wilayah timur Propinsi Nusa Tenggara Timur juga sebagai bagian perbatasan dengan Negara Timor Leste yang merupakan bagian dari kawasan pertumbuhan nasional.

Pertumbuhan wilayah di Kabupaten Alor pada umumnya masih belum merata secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor mengalami penurunan pada periode 1996 – 1998 yakni 6,63% ditahun 1996, 3,94% di tahun 1997 dan 2,50% pada tahun 1998. Kecilnya sumbangan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan pengaruh krisis ekonomi dan selain itu secara umum sektor pertanian masih dikelola secara tradisional (subsistim) dan belum ada sentuhan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian.

Rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk dan lemahnya sektor industri berimplikasikan pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Alor, sementara angkatan kerja menunjukkan peningkatan pada tahun 1999 mencapai 94.608 orang atau meningkat sebesar 0,85% dibandingkan pada tahun 1998 sebesar 93.800 orang. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia masih rendah yakni 55,30% bila dibandingkan dengan propinsi NTT yang telah mencapai 62,00% pada tahun 1999. Tingkat angka kematian bayi mencapai 67 orang per 1000 kelahiran hidup, angka kematian ibu 25 orang per 1000 kelahiran dan status gizi lebih kecil dari 20%.

Keterbatasan lain yang dihadapi pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan pada sektor pendidikan adalah masalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Alor masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan prosentase tingkat kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) hanya 12,84% dan Sekolah Menengah Umum (SMU) hanya 10,91%.

Kondisi permasalahan wilayah tersebut di atas telah memberikan dampak kepada kesenjangan antar wilayah dilihat dari aspek pelayanan, sarana dan prasarana juga dari aspek perkembangan ekonomi wilayah yaitu:

- Pemusatan fasilitas pelayanan sarana dan prasarana yang berlebihan di kota sebagai pusat pertumbuhan sehingga terjadi polarisasi potensi, pembangunan fisik sarana pendidikan dan kesehatan yang tidak merata antar wilayah sehingga mengurangi aksesibilitas pada daerah belakang.

- Ketidakmerataan dalam pengembangan ekonomi wilayah yang dapat dibedakan antar wilayah dan intra wilayah yang diidentifikasi dalam daerah belakang yang tidak berkembang dengan wilayah maju dibedakan atas: perbedaan pendapatan dan kesempatan kerja dengan indikator pendapatan perkapita dan pola penyebaran penduduk.

Kondisi ketimpangan antar daerah yang maju akan lebih memberikan kesempatan bagi penduduk daerah miskin untuk migrasi guna mendapatkan pekerjaan dan fasilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya penduduk yang melakukan migrasi merupakan penduduk yang kurang terampil dan dalam usia produktif, karena itu akan sangat merugikan daerah belakang. Apabila hal ini tidak dikendalikan, maka kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi bertumpuk di daerah yang maju dan daerah lainnya akan tetap merupakan daerah yang terbelakang.

Terjadinya pemusatan fasilitas pelayanan yang berlebihan di kota kabupaten mengakibatkan polarisasi potensi pembangunan baik berupa sumber daya alam, bahan mentah (produksi agraris) dan tenaga kerja (SDM) yang merupakan potensi dalam penyelenggaraan pembangunan akan mengakses pada beberapa wilayah pembangunan yang tidak merata. Kecenderungan tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap ketimpangan (disparitas) Kota-Desa yang secara eksponensial dari fungsi waktu yang berjalan.

Seperti halnya nampak dari gambaran penyebaran kelengkapan sarana umum di pusat kota kalabahi. Peta 3.1 Kelengkapan sarana fasilitas umum di Kabupaten Alor berikut:

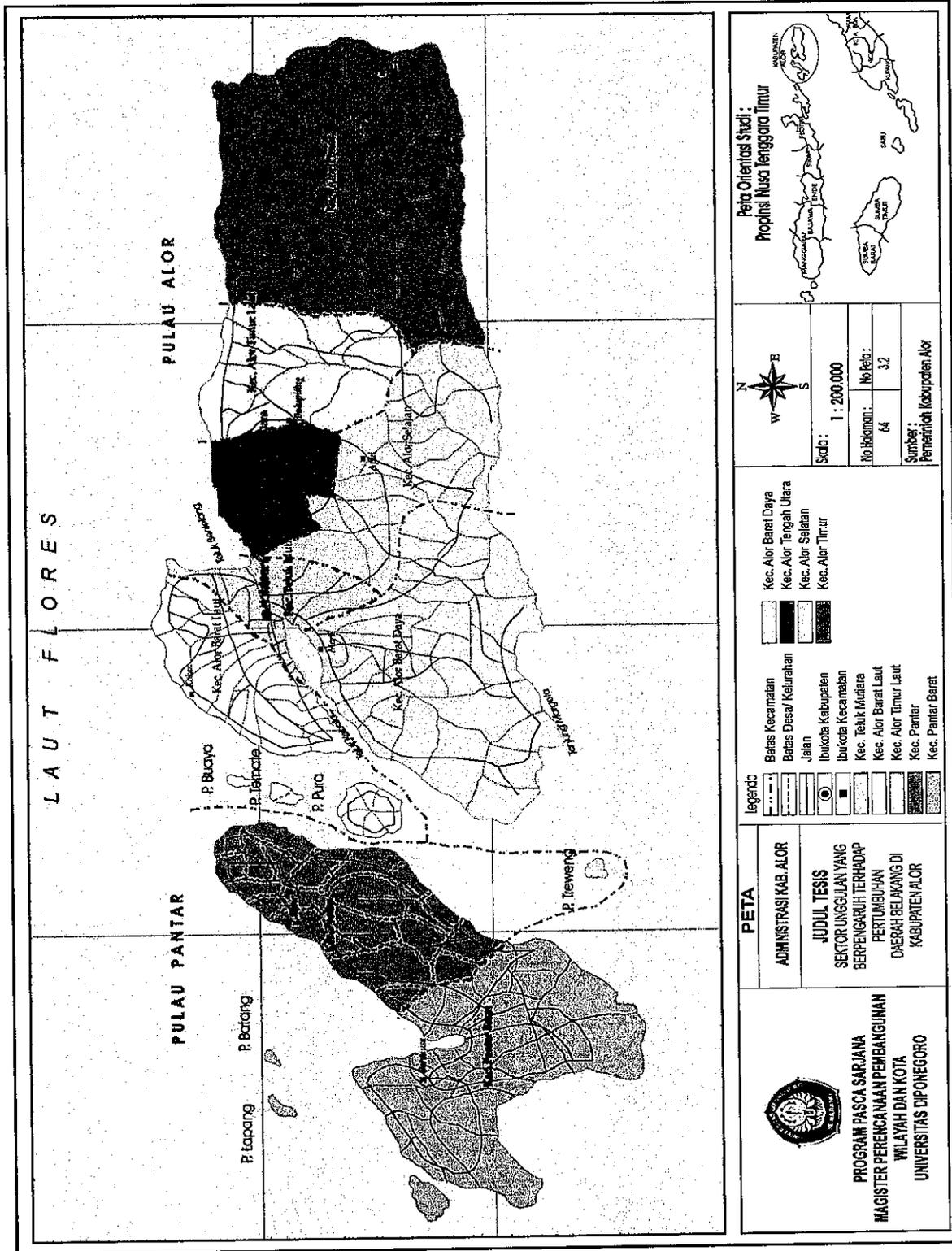
3.3 Gambaran Wilayah Studi

3.3.1 Kondisi Fisik Geografi dan Topografi

Kabupaten Alor merupakan wilayah kepulauan yang meliputi 9 (sembilan) buah pulau, telah dihuni Kepa dan P. Kura) dan 6 buah pulau belum/tidak dihuni oleh penduduk (P. Sika, P. Kapas, P. Lapang, P. Batang, P. Rusa dan P. Kambing). Luas daratan Kabupaten Alor adalah 2.864,64 Km², sedangkan luas perairan adalah 10.973,62 Km². Kabupaten Alor terletak di bagian utara dan paling timur dari wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan posisi geografi: utara 8° - 6° LS, selatan 8° - 36° LS, timur 125° - 48° BT dan barat 125° - 48° BT. Batas wilayah Kabupaten Alor sebelah Timur dengan pulau-pulau Maluku Tenggara Barat, sebelah barat dengan Selat Lomblen, sebelah utara dengan Laut Flores dan sebelah selatan dengan Selat Ombay.

Fauna yang dimiliki Kabupaten Alor terbagi dalam empat kelompok yaitu hewan besar (sapi dan kuda), hewan sedang (babi dan kambing), hewan kecil/unggas (ayam, itik dan burung) dan hewan hutan (rusa, babi, musang, ular, beo dan nuri).

Kondisi topografi dari sebagian besar Pulau Alor adalah bergelombang dengan kemiringan lereng yang cukup terjal, hal ini bukan merupakan hambatan utama pembangunan sarana transportasi untuk mengakses potensi unggulan yang terdapat di daerah sub.pengembangan/daerah belakang. Tidak jarang untuk mendapat alinyemen jalan ideal terpaksa harus memotong bukit yang cukup tinggi dan hal ini tentunya akan membutuhkan biaya besar. Sebagai gambaran wilayah studi dalam Peta 3.2 Wilayah Adiministrasi Kabupaten Alor berikut:



Kemampuan lahan merupakan salah satu dari sejumlah pengelompokan lahan melalui interpretasi dan dibuat terutama untuk keperluan pertanian, namun dapat pula dikembangkan untuk keperluan non pertanian. klasifikasi kemampuan lahan yang dapat digarap (*arable land*) menurut potensi dan penghambatnya agar dapat berproduksi secara lebih lestari.

TABEL III.1
Keadaan Tanah Menurut Kemiringan dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten Alor

No.	Kemiringan (°)	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Wilayah (%)
1	2	3	4
1	0 – 1	98,83	3,45
2	3 – 15	248,94	8,69
3	15 – 40	676,34	23,61
4	> 40	1.840,53	64,25
Jumlah		2.864,64	100,00

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

Tabel III.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Alor memiliki lereng yang cukup terjal yaitu dengan kemiringan lereng lebih dari 40° seluas 1.840,53 Km² atau 64,25% luas daratan, sedangkan wilayah seluas 676,34 Km² atau 23,61% luas daratan memiliki lereng dengan kemiringan antara 15° – 40°. Wilayah seluas 248,94 Km² atau 8,69% luas daratan memiliki lereng dengan kemiringan antara 3° – 15° dan sisanya wilayah seluas 98,83 Km² atau 3,45% luas daratan memiliki lereng dengan kemiringan 0° – 1°.

3.3.2 Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Alor beriklim tropis dengan suhu udara rata - rata 27°C. Perbedaan suhu udara pada siang dan malam hari sangat menyolok terutama terjadi pada bulan Juli sampai dengan Oktober, dimana saat malam hari suhu

udara dapat mencapai 19°C dan siang hari mencapai 34°C, saat itu juga pada umumnya terjadi angin kencang dari semua arah.

Seperti umumnya daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur rata-rata curah hujan tahunan di Kabupaten Alor tergolong rendah. Bulan-bulan yang mengalami curah hujan dengan faktor tingkat basah maksimum hanya terjadi selama enam bulan yaitu bulan Nopember sampai April. Kondisi iklim tropis yang kering kurang mendukung terhadap upaya pengembangan potensi kawasan sawah banyak mengandalkan sumber air terutama pada siklus kondisi iklim yang mempunyai tingkat musim kemarau. Sehingga dari kondisi iklim secara umum akan memberikan kemungkinan peluang terhadap perkembangan pada wilayah kajian lebih sesuai dengan penggalan potensi unggulan dalam upaya pertumbuhan daerah belakang.

TABEL III.2
Kondisi Iklim dan Curah Hujan Kabupaten Alor Tahun 2001

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)	Intensitas Penyinaran (%)
1	2	3	4
Januari	305	14	66
Pebruari	185	16	72
Maret	209	14	73
April	199	16	78
Mei	108	14	84
Juni	5	2	78
Juli	31	9	87
Agustus	1	1	91
September	3	2	89
Oktober	68	10	87
Nopember	236	19	80
Desember	132	16	78

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

Tabel III.2 menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 305 mm selama 14 hari dengan intensitas penyinaran sebanyak 66%

dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan curah hujan 1 mm selama 2 hari dengan intensitas penyinaran sebanyak 91%.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa secara umum kondisi iklim dan curah hujan hampir sama dengan daerah lainnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor pun mengalami empat bulan basah, yaitu Desember, Januari, Pebruari dan Maret. Hujan berawal pada pertengahan Nopember dan berakhir awal april.

3.3.3 Daerah Irigasi dan Tata Guna Lahan

Sektor pertanian di Kabupaten Alor didukung oleh fasilitas sarana irigasi teknik yang berada pada Daerah Irigasi (DI) tersebar di beberapa wilayah cakupan meliputi Kecamatan Pantar 2 DI seluas 1.150 Ha, Kecamatan Alor Barat Laut 4 DI seluas 445 Ha, Kecamatan Teluk Mutiara 2 DI seluas 325 Ha, Kecamatan Alor Barat Daya 4 DI seluas 848 Ha, Kecamatan Alor Selatan 1 DI seluas 125 Ha, Kecamatan Alor Timur Laut 3 DI seluas 775 Ha dan Kecamatan Alor Timur 5 DI seluas 1.822 Ha.

Pendekatan yang mendasari dalam kajian tata guna lahan adalah dengan mengacu kepada total luas lahan sudah dimanfaatkan di Kabupaten Alor meliputi 888,75 Ha lahan telah dimanfaatkan untuk areal persawahan, terdiri dari lahan persawahan yang diusahakan hanya seluas 301,00 Ha dan 587,75 Ha merupakan lahan persawahan yang tidak diusahakan. Lahan kering seluas 285.575,25 Ha berupa bangunan rumah dan pekarangan, perkebunan, ladang, padang rumput, rawa, hutan rakyat, hutan negara dan lain-lain.

Areal yang sementara ini tidak di usahakan untuk aktivitas pertanian maupun perkebunan adalah 587,75 Ha atau 0,21% dari luas pengembangan lahan pertanian yang menyeluruh di Kabupaten Alor. Hal ini di sebabkan karena masih ada kebiasaan ladang berpindah dengan sistim tebas bakar baru di tanam oleh masyarakat yang menyebabkan masih banyak lahan-lahan kurang optimal digarap sebagai lahan tidur.

TABEL III.3
Tata Guna Lahan Kabupaten Alor Tahun 2001

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	Prosentse (%)
1	2	3	4
A	Tanah Sawah		
1	Yang diusahakan	301,00	0,10
	-Satu Kali Tanam	153,00	0,05
	-Dua Kali Tanam	148,00	0,05
2	Tidak diusahakan	587,75	0,21
	Jumlah Lahan Sawah	888,75	0,31
B	Tanah Kering		
1	Bangunan Rumah dan Pekarangan	14.581,00	5,09
2	Kebun/Tegalan	29.596,00	10,33
3	Ladang/Huma	9.609,00	3,35
4	Padang Rumput	10.406,00	3,63
5	Rawa-Rawa	1.485,00	0,52
6	Hutan Rakyat	24.812,00	8,66
7	Tidak diusahakan	71.087,80	24,82
8	Perkebunan	35.507,00	12,39
9	Hutan Negara	22.765,00	7,95
10	Lain-lain	65.726,45	22,94
	Jumlah Lahan Kering	285.575,25	99,69
	Jumlah Total	286.464,00	100,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor, 2002

Adapun arah pengembangan potensi Daerah Irigasi yang telah di operasionalkan bagi sektor pertanian yang pada gilirannya akan di hubungkan dengan sistim transportasi sebagai sarana pendukung dalam pengembangan wilayah belakang. seperti yang digambarkan dalam Peta 3.3 Daerah Irigasi berikut:

3.3.4 Kependudukan

Tahun 2001 jumlah penduduk Kabupaten Alor adalah 168.227 jiwa yang memiliki karakteristik pluralisme dari segi budaya dengan komposisi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk balita (0 – 4 tahun) yaitu berjumlah 21.297 jiwa (12,66%), umur 25 – 29 tahun berjumlah 13.152 jiwa (7,82%) dan umur lebih dari 75 tahun berjumlah 1.922 jiwa (1,14%).

TABEL III.4
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Alor Tahun 2001

No	Umur	Jenis Kelamin		Total	
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	0 - 4	11.040	10.257	21.297	12,66
2	5 - 9	10.944	10.335	21.279	12,65
3	10 - 14	10.589	9.973	20.562	12,22
4	15 - 19	8.446	8.766	17.212	10,23
5	20 - 24	5.869	7.352	13.221	7,86
6	25 - 29	5.877	7.275	13.152	7,82
7	30 - 34	5.713	6.447	12.160	7,23
8	35 - 39	5.097	5.697	10.794	6,41
9	40 - 44	4.999	5.241	10.240	6,09
10	45 - 49	3.431	3.534	6.965	4,14
11	50 - 54	2.824	3.164	5.988	3,56
12	55 - 59	2.364	2.310	4.674	2,78
13	60 - 64	1.839	2.120	3.959	2,35
14	65 - 69	1.289	1.577	2.866	1,7
15	70 - 74	887	1.086	1.973	1,17
16	75 +	870	1.052	1.922	1,14
17	TT	4	9	13	0,01
Kabupaten Alor		82.082	86.195	168.277	100,00

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

Berdasarkan jenis kelamin (*sex ratio*) antara perempuan dan laki-laki menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak yaitu 86.195 jiwa atau sebesar 51,22% Laki-laki 82.082 jiwa atau sebesar 48,78%. Pertumbuhan penduduk pada tahun 1980 sampai dengan 1990 adalah 1,47%, peningkatan laju

pertumbuhan tahun 1990 sampai dengan 2000 sebesar 1,28%. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk seluruh Nusa Tenggara Timur adalah 1,79% dan Indonesia 1,97% pertahun yang mana angka ini masih tergolong rendah.

Proyeksi jumlah penduduk dari tahun ke tahun menurut tabel tersebut dia atas berguna untuk memperkirakan pertumbuhan penduduk dalam mempersiapkan kebutuhan akan sarana dan failitas umum bagi masyarakat di Kabupaten Alor, sehingga dapat di perkirakan berdasarkan standar kebutuhan yang berlaku untuk pembangunan fisik serta kebutuhan investasi dari alokasi pembangunan daerah yang lebih efesien dan efektif.

TABEL III.5
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Alor Tahun 2001

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	2	3		4	5
1	Pantar	9.414	9.830	19.244	11,44
2	Pantar Barat	8.452	9.118	17.570	10,44
3	Alor Barat Daya	11.893	12.631	24.524	14,57
4	Alor Selatan	4.777	5.111	9.888	5,88
5	Alor Timur	4.778	4.837	9.615	5,71
6	Alor Timur Laut	3.966	3.797	7.763	4,61
7	Teluk Mutiara	20.570	20.775	41.345	24,57
8	Alor Barat Laut	11.961	13.369	25.330	15,05
9	Alor Tengah Utara	6.271	6.727	12.998	7,72
	Kabupaten Alor	82.082	86.195	168.277	100,00

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

Kecamatan Teluk Mutiara sebagai pusat pertumbuhan memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebanyak 41.345 jiwa atau 24,57% dari total penduduk Kabupaten Alor, disusul oleh Kecamatan Alor Barat Laut dengan jumlah penduduk 25.330 jiwa atau 15,05%. Kecamatan Alor Timur Laut merupakan

wilayah di Kabupaten Alor yang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 7.763 jiwa atau hanya 4,61% dari total penduduk Kabupaten Alor.

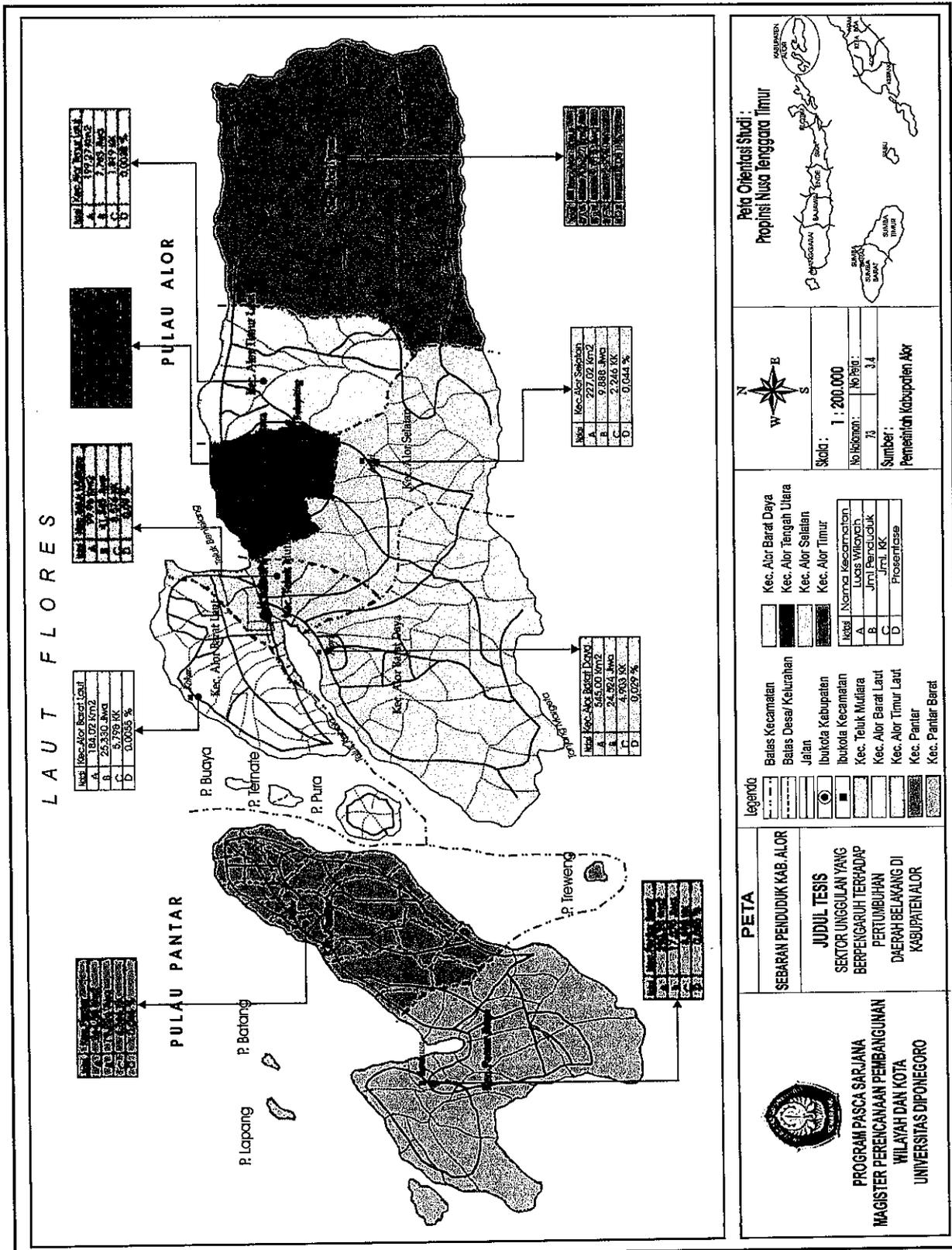
TABEL III.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Alor Tahun 2001

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	2	3	4	6	5
1	Pantar	4.666	19.244	264,30	72,81
2	Pantar Barat	3.898	17.570	490,20	35,84
3	Alor Barat Daya	4.903	24.524	545,00	45,00
4	Alor Selatan	2.246	9.888	227,02	43,56
5	Alor Timur	2.298	9.615	705,27	13,63
6	Alor Timur Laut	1.819	7.763	199,27	38,96
7	Teluk Mutiara	8.576	41.345	99,96	413,62
8	Alor Barat Laut	5.798	25.330	184,02	137,65
9	Alor Tengah Utara	3.023	12.998	149,60	86,89
Jumlah		37.227	168.277	2.864,64	58,74

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

Tingkat kepadatan penduduk paling tinggi terjadi di Kecamatan Teluk Mutiara dengan tingkat kepadatan sebesar 413,62 jiwa/Km² disusul berikutnya adalah Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Alor Tengah Utara yang masing-masing tingkat kepadatan penduduk sebesar 137,65 jiwa/Km² dan 86,89 jiwa/Km². Kecamatan Alor Timur merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah yaitu 13,63 jiwa/Km², sedangkan rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Alor adalah 58,74 jiwa/Km².

Sebagian besar tingkat kepadatan di Kecamatan Teluk Mutiara merupakan pusat dari aglomerasi pendudukan di Kabupaten Alor yang cukup besar untuk satuan kawasan Ibu Kota Kecamatan (IKK), dalam hal ini membutuhkan upaya pengembangan kawasan daerah belakang. Dari uraian tersebut diatas dapat di lihat dalam Peta 3.4 Penyebaran penduduk di Kabupaten Alor berikut:



L A U T F L O R E S

Kec. Alor Barat Daya	19.27 km ²
A	7.263 jiwa
B	1.819 jiwa
C	0.0035 %

Kec. Alor Tengah Utara	24.17 km ²
A	11.114 jiwa
B	1.111 jiwa
C	0.0035 %

Kec. Alor Barat Daya	24.17 km ²
A	25.330 jiwa
B	5.259 jiwa
C	0.0035 %

Kec. Alor Selatan	27.02 km ²
A	9.986 jiwa
B	2.245 jiwa
C	0.0041 %

Kec. Alor Selatan	27.02 km ²
A	9.986 jiwa
B	2.245 jiwa
C	0.0041 %

Kec. Alor Barat Daya	24.17 km ²
A	24.964 jiwa
B	4.503 jiwa
C	0.002 %

Kec. Alor Barat Daya	24.17 km ²
A	24.964 jiwa
B	4.503 jiwa
C	0.002 %

PETA
SEBARAN PENDUDUK KAB. ALOR

JUDUL TESIS
SEKTOR UNGGULAN YANG
BERPENGARUH TERHADAP
PERTUMBUHAN
DAERAH BELAKANG DI
KABUPATEN ALOR

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Legenda:

- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Jalan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Kec. Teluk Mulara
- Kec. Alor Barat Laut
- Kec. Alor Timur Laut
- Kec. Pantar
- Kec. Pantar Barat

Kec. Alor Barat Daya

- Kec. Alor Tengah Utara
- Kec. Alor Selatan
- Kec. Alor Timur

Kec. Alor Selatan

- Kec. Alor Barat Daya
- Kec. Alor Tengah Utara
- Kec. Alor Selatan
- Kec. Alor Timur

Kec. Alor Barat Daya

- Kec. Alor Tengah Utara
- Kec. Alor Selatan
- Kec. Alor Timur

Reja Orientasi Studi:
Propinsi Nusa Tenggara Timur

Skala: 1 : 200.000

No. Halaman: 1 / 1
No. Peta: 3.4

Sumber:
Pemerintah Kabupaten Alor

Legenda:

- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Jalan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Kec. Teluk Mulara
- Kec. Alor Barat Laut
- Kec. Alor Timur Laut
- Kec. Pantar
- Kec. Pantar Barat

Kec. Alor Barat Daya

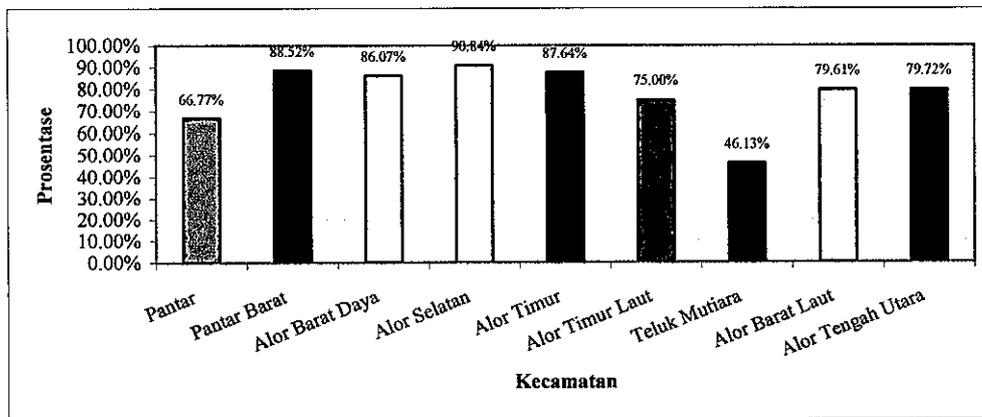
- Kec. Alor Tengah Utara
- Kec. Alor Selatan
- Kec. Alor Timur

Kec. Alor Selatan

- Kec. Alor Barat Daya
- Kec. Alor Tengah Utara
- Kec. Alor Selatan
- Kec. Alor Timur

Kec. Alor Barat Daya

- Kec. Alor Tengah Utara
- Kec. Alor Selatan
- Kec. Alor Timur



GAMBAR 3.1

Tingkat Kesejahteraan Keluarga dilihat dari indikator Pra Sejahtera

Sumber: Kantor BKKBN Kabupaten Alor tahun 2002

Berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga dilihat dari indikator keluarga Pra Sejahtera, Kecamatan Teluk Mutiara hanya memiliki 46,13% keluarga yang berada di kelompok miskin dan Kecamatan Pantar berada pada urutan ke dua dengan 66,77% keluarga miskin, sedangkan kecamatan lain memiliki tingkat prosentase yang lebih tinggi bahkan di Kecamatan Alor Selatan mencapai 90,84% keluarga miskin.

3.3.5 Kondisi Sosial Ekonomi

Kajian berikut akan membahas kondisi sosial dan ekonomi dari wilayah studi di Kabupaten Alor:

3.3.5.1 Aspek Sosial

a. Pendidikan

Kondisi sosial masyarakat yang menjadi perhatian dalam ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Alor, yang disesuaikan dengan kebutuhan akan masing-masing unit sarana pendidikan sesuai prediksi jumlah penduduk usia sekolah sebagai sasaran pelayanan pemerataan di setiap wilayah.

TABEL III.7
Rasio Fasilitas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun 2001

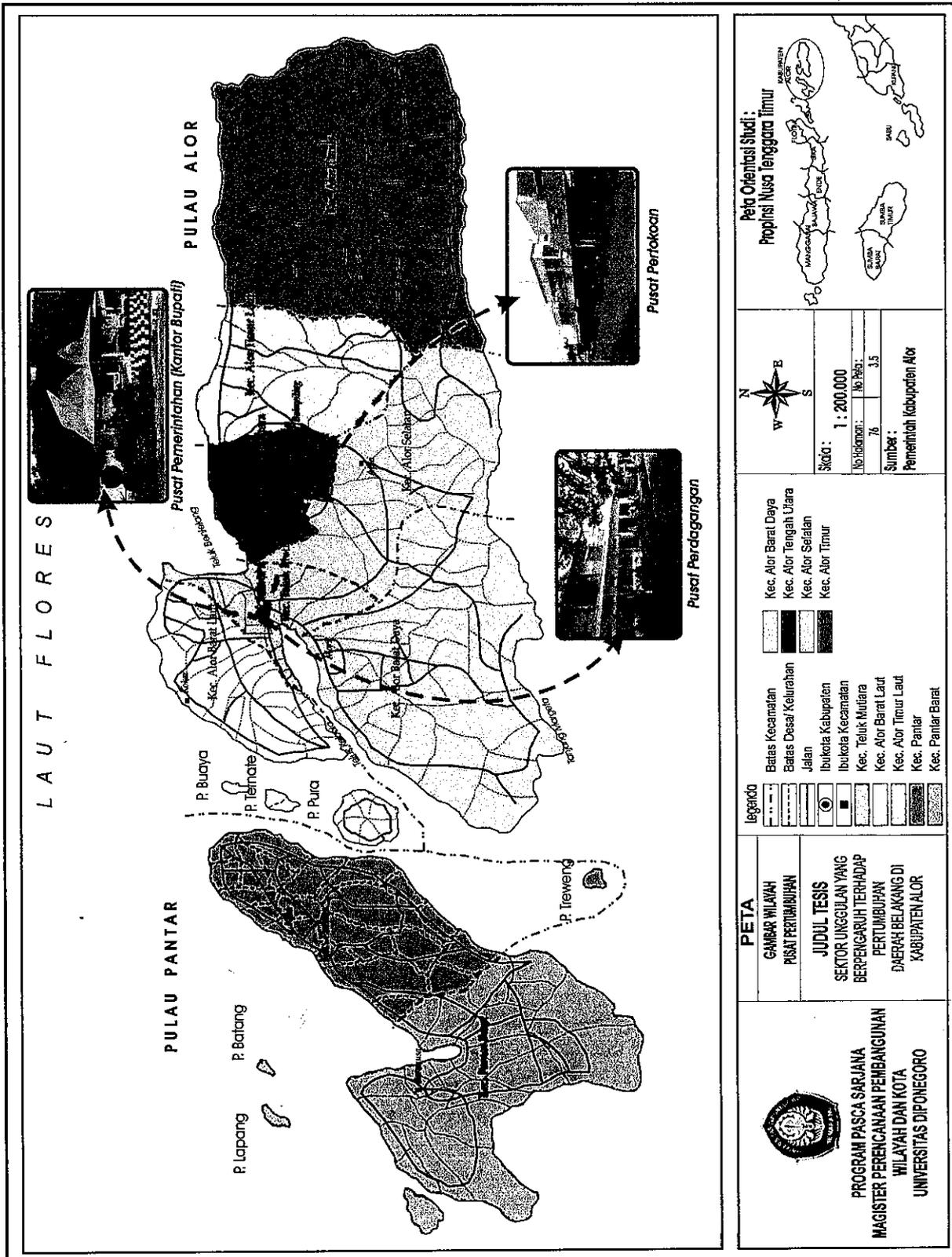
No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Rasio Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial/1000 Penduduk
1	2	3	4
1	Taman Kanak-kanak	30	5,61
2	Sekolah Dasar/MI+SDLB	218	0,77
3	SLTP+MTs	33	5,10
4	SMU+MA+SMK	10	16,83
5	Perguruan Tinggi	0	0,00

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

Pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Alor terlihat masih rendah. Tabel III.7 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Alor belum menyediakan fasilitas pendidikan setingkat perguruan tinggi. Penyediaan fasilitas pendidikan Taman Kanak-Kanak sebanyak 30 bangunan sekolah dengan ratio 5,61 artinya satu bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak digunakan untuk melayani 5.610 penduduk Kabupaten Alor. Bangunan sekolah setingkat sekolah dasar sebanyak 218 bangunan sekolah dengan rasio 0,77. Sedangkan setingkat SLTP disediakan sebanyak 33 bangunan sekolah dengan rasio 5,10 dan setingkat SMU hanya disediakan 10 bangunan sekolah dengan rasio 16,83. Kondisi ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil jumlah bangunan sekolah yang disediakan oleh pemerintah.

Pemanfaatan fungsi akan mencakup luasan wilayah yang dapat melampaui beberapa kawasan pertumbuhan secara efektif dengan perkembangan kota sebagai pusat aglomerasi penduduk yang menempati posisi strategis, sehingga sudah memerlukan penataan fungsi ruang seefisiensi mungkin. Dimana Kota Kalabahi sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan lebih dominan perannya seperti dalam Peta.3.5 Zona Pusat Pertumbuhan berikut:

UPT-PUSTAK-UNDIP



TABEL III.8
Jumlah Bangunan Sekolah Kabupaten Alor Tahun 2001

No	Kecamatan	SD	MI	SMP	MTs	SMU	STM	SMEA	MA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pantar	47	10	5	2	2	0	0	0
2	Pantar Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Alor Barat Daya	27	3	5	0	0	0	0	0
4	Alor Selatan	40	0	2	0	0	0	0	0
5	Alor Timur	32	0	3	0	0	0	0	0
6	Alor Timur Laut	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Teluk Mutiara	23	1	10	1	5	1	1	1
8	Alor Barat Laut	28	7	5	0	0	0	0	0
9	Alor Tengah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	197	21	30	3	7	1	1	1

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

Tabel III.8 menunjukkan Kecamatan Teluk Mutiara sebagai pusat pertumbuhan memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik dengan jumlah bangunan sekolah yang paling banyak, bahkan untuk tingkat SMU sederajat dari sepuluh bangunan sekolah delapan diantaranya berada di Kecamatan Mutiara.

TABEL III.9
Tingkat Pendidikan Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas Kabupaten Alor Tahun 2000

No	Jenis Fasilitas	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	2.051	4.172	6.223	4,92
2	Tidak/Belum Tamat SD	17.612	19.486	37.098	29,30
3	SD/MI/Sederajat	23.342	28.005	51.347	40,55
4	SLTP/MTs/Sederajat	9.529	6.733	16.262	12,84
5	SMU/MA/Sederajat	6.439	3.361	9.800	7,74
6	SMK/Setingkat SMU	2.641	1.368	4.009	3,17
7	Diploma I/II	297	176	473	0,37
8	Diploma III	629	253	882	0,70
9	Diploma IV	518	0	518	0,41
	Jumlah	63.058	63.554	126.612	100,00

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

Tingkat pendidikan formal di Kabupaten Alor secara umum masih rendah, dimana tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk pada tahun 2000 adalah

tingkat tidak/belum sekolah sebesar 4,92%, tidak/belum tamat SD sebesar 29,30%, tamat SD sebesar 40,55%, tamat SLTP sebesar 12,84%, tamat SMU sebesar 10,91% dan tamat Akademi/Universitas sebesar 1,48%. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dihadapkan pada kurang tersedianya fasilitas pendidikan tingkat menengah (SMU). Saat ini konsentrasi sekolah menengah umumnya hanya terdapat di ibukota Kabupaten, sehingga kondisi ini menimbulkan keberatan bagi sebagian besar penduduk yang berada di desa untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan lebih tinggi.

b. Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Alor dapat dilihat pada tabel III.10 dibawah ini.

TABEL III.10
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Alor Tahun 2001

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Balai Pengobatan	Posyandu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pantar	0	2	3	0	42
2	Pantar Barat	0	2	5	0	42
3	Alor Barat Daya	0	2	4	0	45
4	Alor Selatan	0	3	7	0	42
5	Alor Timur	0	2	4	0	33
6	Alor Timur Laut	0	1	2	1	23
7	Teluk Mutiara	1	1	2	3	38
8	Alor Barat Laut	0	1	8	0	61
9	Alor Tengah Utara	0	1	5	0	10
	Jumlah	1	15	40	4	336

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

Fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Alor hanya satu bangunan Rumah Sakit untuk melayani 168.277 penduduk Kabupaten Alor sedangkan Puskesmas yang tersedia sebanyak 15 unit dengan dibantu 40

Puskesmas Pembantu dan 4 Balai Pengobatan. Posyandu yang tersedia di Kabupaten Alor sebanyak 336 unit dengan rasio 0,50 artinya 1 unit posyandu digunakan untuk melayani 500 penduduk Kabupaten Alor.

3.3.5.2 Aspek Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian di Kabupaten Alor bersumber pada kegiatan pertanian termasuk kegiatan kehutanan, peternakan, hortikultura dan perikanan. Hal ini dapat terlihat dari struktur tenaga kerja pada tahun 2001, dimana jumlah terbesar merupakan penduduk yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 61.776 jiwa atau 82,53% dari total jumlah angkatan kerja (usia 10 tahun ke atas) sebesar 74.853 jiwa.

TABEL III.11
Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas
Menurut Lapangan Kerja dan Jenis Kelamin Kabupaten Alor 2001

No	Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	
1	Primer	32.894	28.882	61.776	82,53
2	Sekunder	1.896	465	2.361	14,32
3	Tersier	7.644	3.072	10.716	3,15
	Jumlah	42.434	32.419	74.853	100,00

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

Mata pencarian penduduk secara menyeluruh adalah bertani, hingga tahun 2001 sektor pertanian masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Alor, menurut lapangan kerja usaha menunjukkan bahwa dari 74.853 pekerja, 61.776 orang (82,53%) bekerja di sektor primer (pertanian), disusul pekerja pada sektor tersier (perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa) yaitu sebanyak 10.716 orang (14,32%) dan sektor sekunder (pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas dan air, konstruksi) yaitu sebanyak 2.361 orang (3,15%). Meskipun lapangan usaha

pertanian dari sektor pertanian masih mendominasi struktur ekonomi tetapi sumbangan terhadap sektor ekonomi masih belum dapat berpengaruh dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Alor.

Pendapatan perkapita Kabupaten Alor masih relatif rendah bila dibandingkan dengan wilayah kabupaten tetangga di NTT dan Nasional. Tahun 1999 pendapatan perkapita Nasional sebesar Rp.4.780.353,- dan pendapatan perkapita NTT sebesar Rp.1.397.805,-, sedangkan pendapatan perkapita Kabupaten Alor hanya sebesar Rp.1.270.334,-.

Pendapatan perkapita masyarakat Alor terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 1999 pendapatan perkapita mengalami pertumbuhan sebesar 31,24% dari Rp.967.940,- di tahun 1998 meningkat menjadi Rp.1.270.334,- di tahun 1999 dan pada tahun 2000 pendapatan perkapita Kabupaten Alor meningkat lagi menjadi Rp.1.377.137,- (mengalami pertumbuhan 8,41%).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 2,50%, tahun 1999 kembali mengalami penurunan sebesar 0,44% dan tahun 2000 baru mengalami pertumbuhan sebesar 4,33%. Tahun 1999 stabilitas ekonomi Kabupaten Alor belum menunjukkan arah yang positif, hal ini berbeda dengan sebagian besar kabupaten lain di Propinsi NTT telah menunjukkan arah stabilitas ekonomi yang positif. Propinsi NTT untuk tahun 1999 menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,74%, bahkan untuk Kabupaten Timur Tengah Utara menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,57%.

PDRB Kabupaten Alor tahun 2001 sebesar Rp.115.047.384.000,- didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar Rp.45.163.243.000,- atau 39,26%, disusul sektor jasa-jasa sebesar Rp.29.850.552.000,- atau 25,95%, kemudian sektor perdagangan, restoran dan hotel yang memberikan kontribusi sebesar Rp.16.679.361.000,- atau 14,50%. Sektor listrik dan air minum hanya memberikan kontribusi sebesar 0,61% pada PDRB tahun 2001 yaitu sebesar Rp.698.943.000,-. Untuk lebih jelasnya tentang kontribusi masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel III.12 di bawah ini.

TABEL III.12
PDRB Kabupaten Alor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001

No	Lapangan Usaha (Sektor)	PDRB Tahun 2001	
		Rp.	%
1	2	3	4
I	Pertanian	45.163.243.000	39,26
II	Pertambangan & Penggalian	1.608.280.000	1,40
III	Industri	2.479.952.000	2,16
IV	Listrik & Air Minum	698.943.000	0,61
V	Bangunan & Konstruksi	6.561.041.000	5,70
VI	Perdagangan, Restoran & Hotel	16.679.361.000	14,50
VII	Pengangkutan & Komunikasi	6.757.380.000	5,87
VIII	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5.248.632.000	4,56
IX	Jasa-Jasa	29.850.552.000	25,95
P D R B		115.047.384.000	100,00

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

Sektor industri meskipun hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.479.952.000,- atau 2,16% dari PDRB Kabupaten Alor tetapi mampu menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai investasi yang cukup tinggi. Tenaga kerja yang diserap di sektor industri mencapai 4.370 orang dengan nilai investasi sebesar Rp.1.048.872.000,-. Industri di Kabupaten Alor terbagi dalam lima kelompok yaitu industri Hasil Pertanian & Kehutanan, Aneka, Kimia, Logam dan Mesin

Reparasi dengan jumlah perusahaan sebanyak 1.805 perusahaan dan nilai produksi mencapai Rp. 3.940.000.000,-.

TABEL III.13
Industri Menurut Jenis, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi

No	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Investasi	Nilai Produksi
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Pertanian & Kehutanan	790	1.845	549.451.000	1.700.000.000
2	Aneka	690	1.393	160.600.000	1.668.000.000
3	Kimia	298	1.041	261.645.000	309.000.000
4	Logam	6	34	625.000	25.000.000
5	Mesin Reparasi	21	57	76.551.000	238.000.000
	Jumlah	1.805	4.370	1.048.872	3.940.000.000

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

Dilihat dari sektor perhotelan, Kabupaten Alor hanya memiliki lima buah hotel yang hanya didukung dengan 24 orang tenaga.

TABEL III.14
Perhotelan

No	Hotel	Kamar	Tempat Tidur	Tenaga Kerja
1	2	3	4	5
1	Adi Dharma	25	61	5
2	Melati	13	34	5
3	Marlina	10	20	4
4	Pelangi Indah	31	64	6
5	Nusa Kenari	7	13	4
	Jumlah	86	192	24

Sumber: Alor Dalam Angka, 2002

3.3.6 Sarana Transportasi

Hubungan yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lain membuat peranan transportasi menjadi sangat penting, hal ini karena transportasi dapat menyebabkan pergerakan penduduk menjadi semakin tinggi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pola distribusi penduduk. Kondisi transportasi di Kabupaten Alor terdiri dari jaringan jalan darat, laut dan udara.

3.3.6.1 Sarana Transportasi Darat

Jalan merupakan prasarana untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Semakin meningkat usaha pembangunan maka akan semakin menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar perdagangan antar daerah.

Panjang jalan raya di Kabupaten Alor sampai saat ini adalah 172,20 Km untuk jalan propinsi dan jalan kabupaten 1.108,03 Km, dari jumlah tersebut yang sudah beraspal baru 513,24 Km (37,32%), perkerasan sirtu 81,35 Km (5,91%) dan sisanya sepanjang 780,84 Km (56,77%) masih berupa jalan tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Alor masih jauh dari memadai.

Untuk menjamin prinsip-prinsip tata ruang yang baik sehingga faktor akses jalan merupakan satu-satunya sumbu penghubung ke sumua arah pengembangan wilayah di Kabupaten Alor,sesuai tabel berikut:

TABEL III.15
Rasio Aksesibilitas Fungsi Jalan per Kecamatan
Kabupaten Alor Tahun 2001

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tipe Fasilitas Sarana					
			Tingkat Pengelolaan			Rasio dari Tingkat Pengelolaan		
			Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pantar	264,30	-	4,50	100,40	-	0,02	0,38
2	Pantara Barat	490,20	-	5,80	160,00	-	0,02	0,55
3	Alor Darat Daya	545,00	-	6,70	176,20	-	0,01	0,32
4	Alor Selatan	227,02	-	24,00	81,63	-	0,11	0,36
5	Alor Timur	705,27	-	46,30	143,50	-	0,07	0,20
6	Alor Timur Laut	199,27	-	23,78	106,70	-	0,12	0,54
7	Alor Barat Laut	99,96	-	12,00	108,60	-	0,12	1,09
8	Teluk Mutiara	184,02	-	31,72	128,20	-	0,17	0,70
9	Alor Tengah Utara	149,60	-	17,40	102,80	-	0,12	0,69
	Jumlah	2.864,64	-	172,20	1.108,03	-		

Sumber Data Dinas Kimpraswil kabupaten Alor, 2002

3.3.6.2 Transportasi Laut

Selain transportasi darat, Kabupaten Alor juga memiliki sarana transportasi melalui laut. Untuk transportasi perhubungan laut berpusat di Kota Kalabahi melalui pelabuhan domestik, tetapi ada juga pelabuhan-pelabuhan rakyat yang dilayani dengan menggunakan kapal motor kayu dengan daya angkut antar 50 sampai dengan 100 orang penumpang. Pelabuhan rakyat hanya melayani antar kecamatan dengan kecamatan lainnya.

Perhubungan laut yang dilayani oleh PT. Peln sebagai pelayaran nasional adalah menyinggahi beberapa kota besar di wilayah timur. Salah satu pelabuhan singgah adalah pelabuhan di Kabalahi dengan menggunakan beberapa kapal penumpang seperti KM. Awu, KM. Sirimau dan KM. Tatamailau yang bersandar setiap 2 (dua) minggu sekali, sedangkan ASDP memberikan pelayanan berupa Kapal Ferry dengan pelabuhan tujuan Kupang, Atapupu (Belu), Lewoleba, Lembata dan Larantuka (Flores).

Perhubungan laut sangat besar pengaruhnya untuk Kabupaten Alor karena prasarana ini mendukung kegiatan bongkar muat barang keluar pulau Alor dan pengiriman hasil bumi keluar daerah, misalnya Kupang, Makasar dan Surabaya, untuk kebutuhan Kabupaten Alor khususnya dan antar Kabupaten di Nusa Tenggara Timur, disamping aktifitas pelayaran juga letak dan posisi dari pelabuhan merupakan tempat transit yang aman bagi kapal-kapal yang akan mengisi kebutuhan air dalam pelayaran samudra.

3.3.6.3 Transportasi Udara

Sedangkan untuk perhubungan lewat udara melalui lapangan terbang Mali yang disinggahi oleh pesawat jenis Casca/Twin Otther dengan jurusan Kalabahi – Kupang pulang pergi dalam waktu 3 (tiga) Kali dalam seminggu. Jalur penerbangan tersebut menghubungkan Kota Kalabahi dengan Kota Kupang (Ibu Kota Propinsi) dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Diharapkan di masa mendatang landasan pacunya dapat diperlebar untuk memberikan kesempatan kepada pesawat yang lebih besar untuk mendarat guna dapat meningkatkan pendapatan daerah yang lebih besar.

Selama tahun 2001, lalu lintas pesawat udara yang datang/berangkat melalui Bandar Udara Mali tercatat untuk keberangkatan pesawat sebanyak 117 kali, sedangkan untuk penumpang yang berangkat sebanyak 1.208 orang dan jumlah penumpang yang datang sebanyak 1.122 orang, jumlah penumpang yang berangkat maupun datang terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Kenaikan ini disebabkan oleh semakin banyaknya investor yang datang untuk melihat potensi yang ada di Kabupaten Alor.

BAB IV

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAERAH BELAKANG DI KABUPATEN ALOR

Untuk mengetahui peningkatan pertumbuhan sektor unggulan yang berpengaruh dari masing-masing kecamatan dilakukan melalui empat tahap analisis. Analisis pertama adalah analisis struktur ruang wilayah Kabupaten Alor dengan alat analisis Skalogram untuk mengetahui hierarki dari setiap kecamatan yang meliputi beberapa orde. Analisis kedua adalah analisis wilayah pengaruh dengan alat analisis Indeks Gravitasi untuk mengukur kekuatan keterkaitan antara sentra komoditas dengan pusat pengembangan wilayah. Analisis ketiga adalah analisis tingkat perkembangan wilayah dengan alat uji Indeks Williamson untuk mengetahui apakah kesenjangan yang terjadi antar wilayah kecamatan di Kabupaten Alor masih berada pada batas yang wajar ataukah tidak. Analisis keempat adalah analisis tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah yang terbagi dalam dua tahap pengujian yaitu tahap pertama dengan alat analisis *Location Quotient* (LQ) berdasarkan PDBR kecamatan sehingga akan diketahui sektor basis dari sembilan sektor ekonomi yang dimiliki oleh setiap kecamatan, tahap kedua akan diuji pengaruh sektor basis terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Alor yang diukur dengan besarnya Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) dengan alat analisis regresi berganda sehingga akan diketahui apakah pengaruh tersebut signifikan ataukah tidak.

4.1 Analisis Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Alor

Struktur ruang wilayah Kabupaten Alor ditentukan melalui analisis hierarki pusat pelayanan yang bertujuan untuk mengetahui derajat hierarki wilayah berdasarkan orde kota yang merupakan pusat aktivitas dari masyarakat Kabupaten Alor. Pusat pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah wilayah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian dan pelayanan sosial bagi daerah sekitarnya dan daerah *hinterlandnya*.

Penentuan hierarki pusat pelayanan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Skalogram dan sebagai responden diambil kecamatan-kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Alor yaitu sebanyak sembilan kecamatan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pantar, Pantar Barat, Alor Darat Daya, Alor Selatan, Alor Timur, Alor Timur Laut, Teluk Mutiara, Alor Barat Laut dan Alor Tengah Utara. Teknik analisis yang dilakukan adalah dengan mendata dan mentabelkan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi yang berada di setiap kecamatan. Untuk mempermudah analisis dilakukan pembobotan terhadap fasilitas sosial dan ekonomi sebagai berikut :

1. Kecamatan yang memiliki fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi diberi bobot dengan nilai 1.
2. Kecamatan yang tidak memiliki fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi diberi bobot dengan nilai 0.

Nilai bobot dari setiap fasilitas yang dimiliki tiap kecamatan dijumlahkan dalam arah baris dan kolom, untuk diperoleh nilai skoring. Nilai skoring yang ada pada baris dan kolom, diurutkan mulai dari nilai skoring tertinggi hingga terendah.

Langkah selanjutnya adalah dengan perhitungan jumlah nilai *error* yaitu dengan menilai kelengkapan fasilitas yang terdapat dalam kolom tabel Skalogram. Fasilitas yang terdapat di setiap kecamatan belum lengkap menyebabkan masih terdapat fasilitas dengan nilai 0 yang terdapat diantara fasilitas dengan nilai 1, sehingga dalam analisis ini terdapat nilai *error* sejumlah 12 dari 9 kecamatan sebagai responden dengan 20 jenis fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi.

Untuk menguji keakuratan data yang digunakan dalam analisis ini dilakukan dengan menghitung nilai koefisien reproduksi (Kr) dan nilai koefisien skalabilitas (Ks). Syarat nilai Kr yang dapat diterima adalah $> 0,900$, sedangkan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai Kr sebesar 0,933 yang berarti nilai Kr $> 0,900$. Hasil perhitungan nilai Ks diperoleh nilai sebesar 0,631 sedangkan syarat Ks yang dapat diterima adalah $> 0,600$, hal ini berarti nilai Ks yang diperoleh $> 0,600$. Berdasarkan hasil perhitungan Kr dan Ks di atas maka dapat disimpulkan tabel Skalogram yang telah dibuat dapat diterima.

Hasil pengujian terhadap Kr dan Ks menunjukkan bahwa tabel Skalogram dapat diterima kelayakannya, langkah selanjutnya adalah membagi tiga orde hierarki untuk menentukan derajat kekotaan untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Alor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 di bawah ini.

TABEL IV.1
Hierarki Kecamatan di Kabupaten Alor

No	Hierarki	Kecamatan
1	2	3
1	I	Teluk Mutiara, Pantar
2	II	Alor Barat Daya, Alor Barat Laut, Alor Timur
3	III	Alor Selatan, Pantar Barat, Alor Timur Laut, Alor Tengah Utara

Sumber : data sekunder, diolah

Tabel IV.1 di atas menunjukkan perhitungan masing-masing hierarki wilayah sebagai berikut:

- a) Hierarki I meliputi Kecamatan Teluk Mutiara dan Kecamatan Pantar sebagai pusat pertumbuhan dengan nilai skoring berkisar antara 16,01 hingga 20,00. Kecamatan Teluk Mutiara dengan nilai skoring sebesar 20, artinya dari 20 jenis fasilitas pelayanan yang diajukan dalam penelitian sebagai pernyataan yaitu meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, daerah irigasi, kantor, transportasi dan perdagangan semua tersedia di Kecamatan Teluk Mutiara, sedangkan Kecamatan Pantar dengan nilai skoring sebesar 17 yang berarti dari 20 jenis fasilitas pelayanan yang diajukan sebagai pernyataan dalam penelitian di Kecamatan Pantar tersedia 17 jenis fasilitas pelayanan.
- b) Hierarki II meliputi Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Alor Timur dengan nilai skoring berkisar antara 12,01 hingga 16,00.
- c) Hierarki III meliputi Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Alor Timur Laut dan Kecamatan Alor Tengah Utara dengan nilai skoring berkisar antara 8,00 hingga 12,00.

Dari kajian hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan lebih diprioritaskan pada wilayah yang strategis sebagai pusat pertumbuhan, baru kemudian diarahkan pada wilayah belakang yang kurang berkembang. Hal ini terlihat dari jumlah fasilitas sarana dan prasarana fisik yang lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Teluk Mutiara dan Kecamatan Pantar sebagai wilayah yang berada pada Orde I.

Dengan demikian terlihat bahwa wilayah pusat pertumbuhan yang lebih mendapatkan prioritas sebagai wilayah pusat pemerintahan dan Jasa di Kecamatan Teluk Mutiara sedangkan Kecamatan Pantar sebagai wilayah pusat sentra dan pengumpul komoditas ekonomi lokal di Kabupaten Alor.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara Kecamatan Teluk Mutiara dan Kecamatan Pantar sebagai pusat kegiatan dengan kecamatan lain di Kabupaten Alor dilihat dari kelengkapan fasilitas sosial dan ekonomi yang dimiliki. Kecamatan Teluk Mutiara memiliki semua fasilitas yang diajukan sebagai pernyataan dalam penelitian ini mulai dari fasilitas pendidikan hingga fasilitas perdagangan sedangkan Kecamatan Pantar memiliki 17 fasilitas pelayanan. Meskipun fasilitas pendidikan yang dimiliki Kecamatan Teluk Mutiara hanya sampai pada tingkat SMU sederajat dan tidak memiliki setingkat perguruan tinggi dan fasilitas perdagangan yang dimiliki hanya berupa pasar tradisional dan tidak ada fasilitas perdagangan yang lebih modern, misalnya supermarket, tetapi dibandingkan dengan kecamatan lain fasilitas tersebut sudah lebih baik. Bahkan untuk fasilitas kesehatan yaitu berupa rumah sakit hanya ada di Kecamatan Teluk Mutiara, meskipun jumlahnya hanya satu dengan ditunjang kualitas peralatan yang masih sederhana. Tujuh dari sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Alor berada pada orde hierarki II dan III. Hal ini menunjukkan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi yang tersedia sangat dirasakan kurang bagi kecamatan selain Kecamatan Teluk Mutiara dan Pantar. Bahkan Kecamatan Alor Tengah Utara hanya memiliki delapan dari 20 jenis fasilitas yang ada. Fasilitas pendidikan sama sekali tidak tersedia di Kecamatan Pantar Barat, Alor Timur Laut dan Alor

Tengah Utara baik itu setingkat SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi sehingga masyarakat Kecamatan tersebut apabila hendak sekolah harus pergi ke kecamatan lain yang menyediakan fasilitas pendidikan, hal ini tentunya membutuhkan biaya yang lebih mahal dan waktu yang lebih lama untuk mencapai sekolah tersebut. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Kecamatan Pantar Barat, Alor Timur Laut dan Alor Tengah Utara harus dapat menerima dampak yang ditimbulkan sehubungan dengan peningkatan status dari perwakilan kecamatan menjadi kecamatan penuh sehingga diperlukan inventarisasi sarana prasarana yang dimiliki kecamatan tersebut belum optimal.

4.2 Analisis Wilayah Pengaruh

Analisis wilayah pengaruh menggunakan model Indeks Gravitasi yang berkaitan dengan analisis Skalogram Guttman. Analisis model gravitasi ini digunakan untuk : (1) mengukur kekuatan keterkaitan antara sentra komoditas dengan pusat pengembangan wilayah, (2) menentukan kekuatan tempat kedudukan dari setiap pusat kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi sentra komoditas dalam sistim jaringan jasa, distribusi dan transportasi.

Kelemahan metode ini adalah karena pada kenyatannya bobot dari jarak tidak dapat berfungsi utuh sebagai faktor determinan besarnya interaksi. Jika muncul perubahan pada bobot atau jarak, daya tarik antara dua kota akan berubah (Daldjoeni, 1997 :2004) oleh karena itu, penentuan wilayah pengaruh dengan menggunakan rumus Model Gravitasi dalam penelitian ini dibatasi hanya untuk

memberikan suatu indikasi dari analisa sebelumnya yaitu menentukan pusat-pusat pelayanan secara hierarki di Kabupaten Alor.

Data yang dibutuhkan untuk analisis ini adalah jarak antara ibu kota kecamatan dan jumlah penduduk, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV.2
Jumlah Penduduk dan Jarak Antar Ibu Kota Kecamatan

No	Kec.	Jarak (KM) antar Kota Kecamatan									Jumlah Penduduk
		P	PB	ABD	AS	AT	ATL	TM	ABL	ATU	
1	P	-	41,70	64,50	107,50	177,50	113,50	47,50	42,30	56,50	19.414
2	PB	41,70	-	68,50	124,50	194,50	130,50	64,50	94,50	73,50	19.312
3	ABD	64,50	68,50	-	43,00	68,00	48,00	17,00	45,00	26,00	24.210
4	AS	107,50	124,50	43,00	-	39,79	29,00	60,00	88,00	69,00	10.102
5	AT	177,50	194,50	68,00	39,79	-	54,00	85,00	113,00	76,00	11.982
6	ATL	113,50	130,50	48,00	29,00	54,00	-	31,00	59,00	22,00	10.821
7	TM	47,50	64,50	17,00	60,00	85,00	31,00	-	28,00	9,00	41.235
8	ABL	42,30	94,50	45,00	88,00	113,00	59,00	28,00	-	37,00	27.130
9	ATU	56,50	73,50	26,00	69,00	76,00	22,00	9,00	37,00	-	12.046

Sumber : data sekunder, diolah

Berdasarkan rumus Indeks Gravitasi di atas diperoleh hasil seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

TABEL IV.3
Indeks Gravitasi

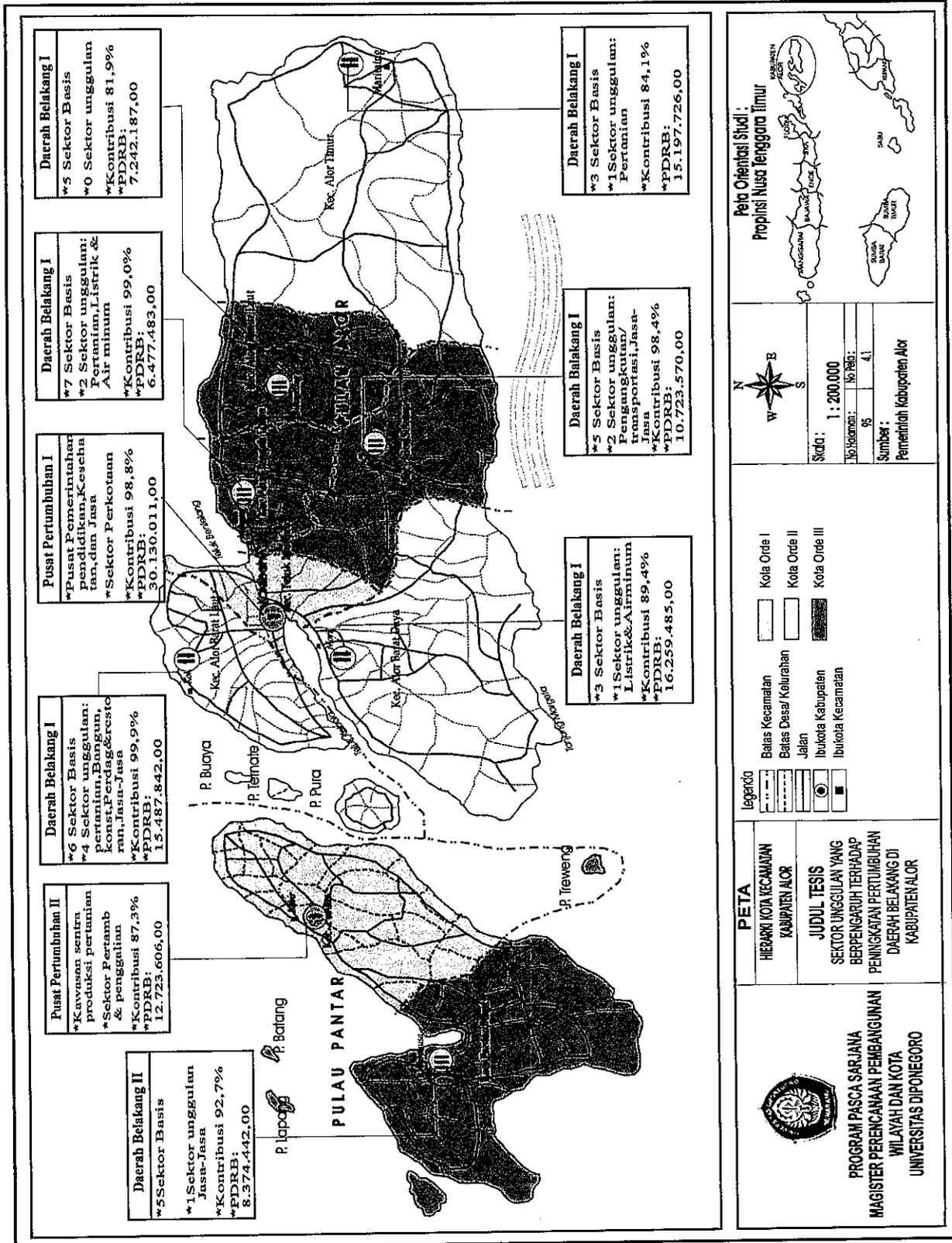
No	Kec.	P	PB	ABD	AS	AT	ATL	TM	ABL	ATU
1	P	-	2,156	1,130	0,170	0,074	0,163	3,548	2,944	0,733
2	PB	2,156	-	0,996	0,126	0,061	0,123	1,914	0,587	0,431
3	ABD	1,130	0,996	-	1,323	0,627	1,137	34,543	3,244	4,314
4	AS	0,170	0,126	1,323	-	0,765	1,300	1,157	0,354	0,256
5	AT	0,074	0,061	0,627	0,765	-	0,445	0,684	0,255	0,250
6	ATL	0,163	0,123	1,137	1,300	0,445	-	4,643	0,843	2,693
7	TM	3,548	1,914	34,543	1,157	0,684	4,643	-	14,269	61,323
8	ABL	2,944	0,587	3,244	0,354	0,255	0,843	14,269	-	2,387
9	ATU	0,733	0,431	4,314	0,256	0,250	2,693	61,323	2,387	-

Sumber : data sekunder, diolah

Hasil analisis hierarkhi dengan Skalogram menunjukkan terdapat dua kecamatan sebagai pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Pantar dan Kecamatan Teluk Mutiara. Berdasarkan Indeks Gravitasi, Kecamatan Pantar sebagai pusat

pertumbuhan pertama pengaruhnya lebih kuat terhadap Kecamatan Pantar Barat sebagai daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan lebih besarnya indeks yang terbentuk antara Kecamatan Pantar Barat dengan Kecamatan Pantar dibandingkan dengan Kecamatan Teluk Mutiara, sedangkan Kecamatan Teluk Mutiara sebagai wilayah pusat pertumbuhan kedua dengan wilayah terpengaruh meliputi Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Tengah Utara. Keterkaitan antara Kecamatan Teluk Mutiara dengan Kecamatan Alor Timur cenderung lemah, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Gravitasi yang terbentuk di bawah 1 yaitu hanya sebesar 0,684. Kondisi ini disebabkan karena jauhnya jarak antara ibukota kedua kecamatan tersebut yang kurang di tunjang dengan sarana penghubung secara optimal, sehingga sarana komunikasi dan transportasi mengalami kesulitan. Hal ini akan berdampak pada perkembangan Kecamatan Alor Timur yang akan mengalami stagnasi akibat tidak tersedianya sarana komunikasi dan transportasi yang memadai yang menghubungkan kecamatan tersebut dengan Kecamatan Teluk Mutiara sebagai pusat pertumbuhan.

Tinjauan dari penentuan hierarki kota sebagai pusat pelayanan aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat sedangkan wilayah pengaruh diarahkan dalam rangka keterkaitan terhadap jangkauan aksesibilitas untuk meningkatkan pusat pelayanan bagi wilayah pengaruh sebagai upaya yang optimal dalam kebijakan spasial (keruangan) di Kabupaten Alor, yang selanjutnya dikelompokkan dalam 2 (dua) Satuan Wilayah Pengembangan dan 3 (tiga) Sub Kawasan Pengembangan sebagai berikut:



Daerah Belakang I
 *5 Sektor Basis
 *0 Sektor unggulan
 *Kontribusi 81,9%
 *PDRB: 7.242.187,00

Daerah Belakang I
 *7 Sektor Basis
 *2 Sektor unggulan: Pertanian, Listrik & Air minum
 *Kontribusi 99,0%
 *PDRB: 6.477.483,00

Pusat Pertumbuhan I
 *Pusat Pemerintahan pendidikan, Kesehatan, dan jasa
 *Sektor Perikanan
 *Kontribusi 98,8%
 *PDRB: 30.130.011,00

Daerah Belakang I
 *6 Sektor Basis
 *4 Sektor unggulan: pertanian, Bangunan, konst. Perdag & restoran, Jasa-Jasa
 *Kontribusi 99,9%
 *PDRB: 15.487.842,00

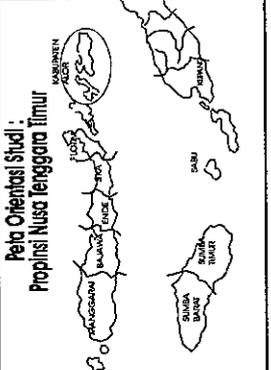
Pusat Pertumbuhan II
 *Kawasan sentra produksi pertanian
 *Sektor Pertamb & penggalan
 *Kontribusi 87,3%
 *PDRB: 12.723.606,00

Daerah Belakang II
 *5 Sektor Basis
 *1 Sektor unggulan Jasa-Jasa
 *Kontribusi 92,7%
 *PDRB: 8.374.442,00

Daerah Belakang I
 *3 Sektor Basis
 *1 Sektor unggulan: Pertanian
 *Kontribusi 84,1%
 *PDRB: 15.197.726,00

Daerah Belakang I
 *5 Sektor Basis
 *2 Sektor unggulan: Pengangkutan/ transportasi, Jasa
 *Kontribusi 98,4%
 *PDRB: 10.723.570,00

Daerah Belakang I
 *3 Sektor Basis
 *1 Sektor unggulan: Listrik & Air minum
 *Kontribusi 89,4%
 *PDRB: 16.259.485,00



Skala: 1 : 200.000
 No. Skala: 95
 No. Peta: 41
 Sumber: Pemerintah Kabupaten Alor

legenda

- Kota Orde I
- Kota Orde II
- Kota Orde III
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Jalan
- Ibu kota Kabupaten
- Ibu kota Kecamatan

PIETA
 HIERAKI KOTA KECAMATAN KABUPATEN ALOR
 JUDUL TESIS
 SEKTOR UNGGULAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAERAH BELAKANG DI KABUPATEN ALOR

PROGRAM PASCA SARJANA
 MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

A. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yaitu:

- 1) Satuan Wilayah Pengembangan I (SWP I) berpusat di Kecamatan Pantar, dengan wilayah pengembangannya Kecamatan Pantar Barat.
- 2) Satuan Wilayah Pengembangan II (SWP II) berpusat di Kecamatan Teluk Mutiara, dengan wilayah pengembangan Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timut Laut, dan Kecamatan Alor Tengah Utara.

B. Sub Kawasan Pengembangan (SKP) yaitu:

- 1) Sub Kawasan Pengembangan I (SKP I) meliputi Kecamatan Pantar Barat berpusat di Kabir IKK Pantar Barat.
- 2) Sub Kawasan Pengembangan II (SKP II) meliputi Kecamatan Alor Selatan, Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Barat Laut, berpusat di Apui IKK Kecamatan Alor Selatan.
- 3) Sub Kawasan Pengembangan III (SKP III) meliputi Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Alor Tengah Utara, berpusat di Maritaing IKK Kecamatan Alor Timur.

Pembagian wilayah pengembangan ini dapat dilihat pada Peta 4.1 Hierarki Kota Kecamatan Kabupaten Alor berdasarkan potensi wilayah riel dilihat dari kontribusi sektor unggulan perkecamatan yang merupakan wilayah belakang. Penilaian terhadap Pusat pertumbuhan hanya di pengaruhi oleh faktor kondisi geografis.

4.3 Analisis Tingkat Kesenjangan Antar Wilayah

Analisis tingkat perkembangan antar wilayah dilakukan untuk mengetahui tingkat kesenjangan yang terjadi antar wilayah melalui pendapatan perkapita wilayah dengan menggunakan Indeks Williamson (V_w). Indeks Williamson menggambarkan ukuran relatif pendapatan perkapita kecamatan terhadap rata-rata daerah wilayah Kabupaten Alor dimana tiap-tiap deviasi tingkat kecamatan dibagi sumbangannya dengan penduduk wilayah Kabupaten Alor secara keseluruhan.

Data yang digunakan adalah data PDRB dari sembilan kecamatan dan Kabupaten Alor dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 berdasarkan harga konstan tahun 1993 dan data tentang jumlah penduduk sembilan kecamatan dan Kabupaten Alor tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.

Tingkat kesenjangan antar wilayah yang diukur dari Indeks Williamson yang dihasilkan dari perhitungan PDRB dan jumlah penduduk kecamatan terhadap Kabupaten Alor ditetapkan berkisar di bawah angka 0,4 – 0,5, yang berarti kesenjangan antar wilayah yang terjadi dinilai masih wajar.

Hasil analisis Indeks Williamson yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel IV.4 dibawah ini.

TABEL IV.4
Analisis Indeks Williamson

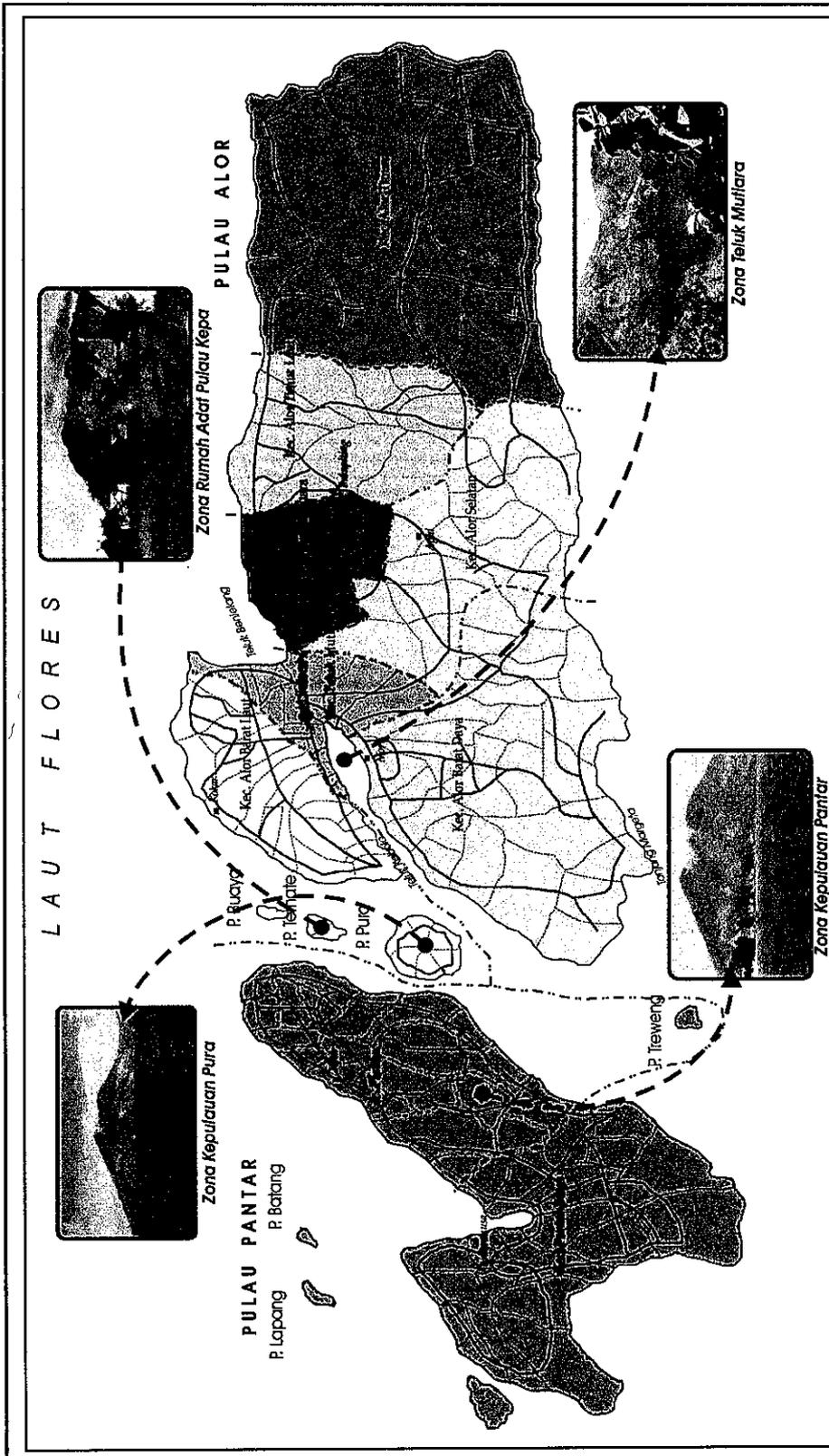
Tahun	V_w	Pertumbuhan
1	2	3
1999	0,331	-
2000	0,310	-6,344
2001	0,306	-1,290
2002	0,295	-3,595
2003	0,294	-0,339

Sumber : data sekunder, diolah

Tabel IV.4 menunjukkan hasil analisis Indeks Williamson pada tahun 1999 hingga tahun 2003 masih berada di bawah nilai yang telah ditetapkan yaitu antara 0,4 – 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa kesenjangan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Alor masih wajar. Pada tahun 1999 kesenjangan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Alor cukup tinggi dan mendekati nilai aman yaitu sebesar 0,331. Tahun 2000 kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Alor mengalami penurunan sebesar 6,344% menjadi sebesar 0,310. Kesenjangan yang terjadi terus mengalami penurunan hingga tahun 2003 Indeks Williamson hanya menunjukkan sebesar 0,294.

Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antar wilayah yang diukur dari PDRB dan jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini berarti pendapatan per kapita dari daerah belakang semakin baik dan semakin dapat mengimbangi pendapatan per kapita Kecamatan Teluk Mutiara sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Alor.

Kondisi geografis serta alam Kabupaten Alor sebagai wilayah kepulauan turut mempengaruhi terhadap ketidak keseimbangan pertumbuhan yang tidak seimbang dimana alasan pokok kecenderungan dari kegiatan ekonomi yang berlebihan di pusat Kota Kalabahi secara intensif sehingga telah memacu investasi pada pusat pertumbuhan, dan telah menguntungkan perkembangan kota yang lebih maju dari pada pertumbuhan wilayah belakang yang secara periodik mempengaruhi upaya mengurangi tingkat kesenjangan dengan kemampuan investasi jangka panjang. Seperti nampak dalam Peta 4.2 Zona Daerah Belakang di Kabupaten Alor.



<p>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>PETA</p> <p>GAMBAR ZONA WILAYAH BELANG KAB. ALOR</p> <p>JUDUL TESIS</p> <p>SEKTOR UNGGULAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERTUMBUHAN DAERAH BELAKANG DI KABUPATEN ALOR</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan Jalan Ibu Kota Kabupaten Ibu Kota Kecamatan Kec. Teluk Mutiara Kec. Alor Barat Laut Kec. Alor Timur Laut Kec. Pantar Kec. Pantar Barat 	<p>Kec. Alor Barat Daya</p> <p>Kec. Alor Tengah Utara</p> <p>Kec. Alor Selatan</p> <p>Kec. Alor Timur</p>	<p>Peta Orientasi Studi:</p> <p>Propinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<p>Skala: 1 : 200.000</p> <p>No. Hakamim: 98</p> <p>No. Field: 42</p> <p>Sumber: Pemerintah Kabupaten Alor</p>	<p>Peta Orientasi Studi:</p> <p>Propinsi Nusa Tenggara Timur</p>
---	---	--	---	---	---	---

4.4 Analisis Potensi Sektor Strategis Kabupaten Alor

Analisis potensi strategis Kabupaten Alor terbagi dalam dua pengujian yaitu analisis sektor ekonomi basis wilayah dengan alat uji *Location Quotient* (LQ) dan sektor unggulan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan daerah belakang dengan alat uji regresi berganda.

4.4.1 Analisis Sektor Ekonomi Basis Wilayah

Analisis tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah digunakan untuk mengetahui potensi setiap wilayah kecamatan diukur dari sembilan sektor ekonomi yang merupakan kontributor PDRB di Kabupaten Alor yaitu sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel, Pengangkutan & Komunikasi, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa. Alat analisis yang dipergunakan adalah *Location Quotient* (LQ) bertujuan untuk mengidentifikasi sektor basis yang strategis dengan pendekatan peranan sembilan sektor ekonomi pada setiap kecamatan, yaitu dengan membandingkan kontribusi sektor yang ada pada setiap kecamatan terhadap sektor yang sama pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Kabupaten Alor. Sektor-sektor ekonomi yang berperan secara dominan menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut sangat mendukung peningkatan pertumbuhan daerah belakang yang bersangkutan.

Data yang dibutuhkan dalam menghitung nilai LQ adalah data PDRB dari sembilan kecamatan di Kabupaten Alor tahun 2003 berdasarkan harga konstan tahun 1993. Hasil dari analisis LQ adalah diketahuinya sektor basis dan sektor non basis yang dimiliki setiap kecamatan di Kabupaten Alor.

1. Kecamatan Pantar

Hasil analisis *Location Quotient* dari sembilan sektor ekonomi berdasarkan PDRB tahun 2003 Kecamatan Pantar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.5
Analisis Location Quotient

Sektor Ekonomi	LQ	Keterangan
1	2	3
Pertanian	1,376	Sektor Basis
Pertambangan & Penggalian	1,274	Sektor Basis
Industri	0,506	Sektor Non Basis
Listrik & Air Minum	0,991	Sektor Non Basis
Bangunan & Konstruksi	0,592	Sektor Non Basis
Perdagangan, Restoran & Hotel	0,534	Sektor Non Basis
Pengangkutan & Komunikasi	0,958	Sektor Non Basis
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,970	Sektor Non Basis
Jasa-Jasa	0,970	Sektor Non Basis

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sembilan sektor ekonomi, hanya dua sektor yang menjadi sektor basis yang dimiliki oleh Kecamatan Pantar yaitu sektor Pertanian dan Pertambangan & Penggalian, hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ yang lebih besar dari angka 1, sedangkan tujuh sektor ekonomi yang lain merupakan sektor non basis, hal ini karena nilai LQ yang terbentuk di bawah angka 1.

Sektor Pertanian yang menjadi sektor basis memberikan kontribusi terbesar dari PDRB Kecamatan Pantar yaitu sebesar 53,70% dari total PDRB Kecamatan Pantar yang sebesar Rp.12.723.606.000,-, sedangkan sektor Pertambangan & Penggalian memberikan kontribusi sebesar 1,39% dari total PDRB Kecamatan Pantar.

Meskipun sektor Pertanian dan Pertambangan & Penggalian merupakan sektor basis, tetapi secara statistik belum tentu memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, oleh karena itu lebih lanjut akan diuji secara statistik yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

2. Kecamatan Pantar Barat

Hasil analisis *Location Quotient* dari sektor-sektor ekonomi berdasarkan PDRB tahun 2003 Kecamatan Pantar Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.6
Analisis Location Quotient

Sektor Ekonomi	LQ	Keterangan
1	2	3
Pertanian	0,892	Sektor Non Basis
Pertambangan & Penggalian	1,207	Sektor Basis
Industri	1,083	Sektor Basis
Listrik & Air Minum	1,141	Sektor Basis
Bangunan & Konstruksi	0,848	Sektor Non Basis
Perdagangan, Restoran & Hotel	0,762	Sektor Non Basis
Pengangkutan & Komunikasi	0,753	Sektor Non Basis
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,085	Sektor Basis
Jasa-Jasa	1,521	Sektor Basis

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sembilan sektor ekonomi, terdapat lima sektor yang menjadi sektor basis yang dimiliki oleh Kecamatan Pantar Barat yaitu sektor Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa, hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ yang lebih besar dari angka 1, sedangkan empat sektor ekonomi yang lain merupakan sektor non basis, hal ini karena nilai LQ yang terbentuk di bawah angka 1.

Sektor Pertambangan & Penggalian yang menjadi sektor basis memberikan kontribusi sebesar 1,32% dari total PDRB Kecamatan Pantar Barat yang sebesar

Rp.8.374.442.000,-, sektor Industri memberikan kontribusi sebesar 2,04% dan sektor Listrik & Air Minum memberikan kontribusi sebesar 0,57%. Sedangkan sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan memberikan kontribusi sebesar 4,38% dan sektor Jasa-Jasa memberikan kontribusi sebesar 39,59%.

Meskipun sektor Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa merupakan sektor basis, tetapi secara statistik belum tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, oleh karena itu lebih lanjut akan diuji secara statistik yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

3. Kecamatan Alor Barat Daya

Hasil analisis *Location Quotient* dari sektor-sektor ekonomi berdasarkan PDRB dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2003 Kecamatan Alor Barat Daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.7
Analisis Location Quotient

Sektor Ekonomi	LQ	Keterangan
1	2	3
Pertanian	1,280	Sektor Basis
Pertambangan & Penggalian	1,736	Sektor Basis
Industri	0,462	Sektor Non Basis
Listrik & Air Minum	1,015	Sektor Basis
Bangunan & Konstruksi	0,807	Sektor Non Basis
Perdagangan, Restoran & Hotel	0,926	Sektor Non Basis
Pengangkutan & Komunikasi	0,621	Sektor Non Basis
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,629	Sektor Non Basis
Jasa-Jasa	0,990	Sektor Non Basis

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sembilan sektor ekonomi, terdapat tiga sektor yang menjadi sektor basis yang dimiliki oleh Kecamatan Alor Barat Daya yaitu sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian dan Listrik & Air Minum, hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ yang lebih besar dari angka 1, sedangkan enam sektor ekonomi yang lain merupakan sektor non basis, hal ini karena nilai LQ yang terbentuk di bawah angka 1.

Sektor Pertanian yang menjadi sektor basis memberikan kontribusi sebesar 49,96% dari total PDRB Kecamatan Alor Barat Daya yang sebesar Rp.16.524.485.000,-, sektor Pertambangan & Penggalian memberikan kontribusi sebesar 1,89% dan sektor Listrik & Air Minum memberikan kontribusi sebesar 0,51%.

Meskipun sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian dan Listrik & Air Minum merupakan sektor basis, tetapi secara statistik belum tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, oleh karena itu lebih lanjut akan diuji secara statistik yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

4. Kecamatan Alor Selatan

Hasil analisis *Location Quotient* dari sektor-sektor ekonomi berdasarkan PDRB dalam kurun aktu tahun 1999 sampai dengan 2003 Kecamatan Alor Selatan yang memiliki potensi basis ekonomi dalam menunjang pertumbuhan wilayah belakang. Dimana konsiderasi dari penentuan sektor basis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.8
Analisis Location Quotient

Sektor Ekonomi	LQ	Keterangan
1	2	3
Pertanian	0,963	Sektor Non Basis
Pertambangan & Penggalian	0,721	Sektor Non Basis
Industri	0,657	Sektor Non Basis
Listrik & Air Minum	1,033	Sektor Basis
Bangunan & Konstruksi	1,457	Sektor Basis
Perdagangan, Restoran & Hotel	0,745	Sektor Non Basis
Pengangkutan & Komunikasi	1,405	Sektor Basis
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,390	Sektor Basis
Jasa-Jasa	1,193	Sektor Basis

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sembilan sektor ekonomi, terdapat lima sektor yang menjadi sektor basis yang dimiliki oleh Kecamatan Alor Selatan yaitu sektor Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Pengangkutan & Komunikasi, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa, hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ yang lebih besar dari angka 1, sedangkan empat sektor ekonomi yang lain merupakan sektor non basis, hal ini karena nilai LQ yang terbentuk di bawah angka 1.

Sektor Listrik & Air Minum yang menjadi sektor basis memberikan kontribusi sebesar 0,51% dari total PDRB Kecamatan Alor Barat Daya yang sebesar Rp.10.723.570.000,-, sektor Bangunan & Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 6,68% dan sektor Pengangkutan & Komunikasi memberikan kontribusi sebesar 7,18%. Sedangkan sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan memberikan kontribusi sebesar 5,61% dan sektor Jasa-Jasa memberikan kontribusi sebesar 31,06%.

Meskipun sektor Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Pengangkutan & Komunikasi, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-

Jasa merupakan sektor basis, tetapi secara statistik belum tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, oleh karena itu lebih lanjut akan diuji secara statistik yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

5. Kecamatan Alor Timur

Hasil analisis *Location Quotient* dari sektor-sektor ekonomi berdasarkan PDRB tahun 2003 Kecamatan Alor Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL IV.9
Analisis Location Quotient

Sektor Ekonomi	LQ	Keterangan
1	2	3
Pertanian	1,444	Sektor Basis
Pertambangan & Penggalian	0,831	Sektor Non Basis
Industri	0,758	Sektor Non Basis
Listrik & Air Minum	0,768	Sektor Non Basis
Bangunan & Konstruksi	1,079	Sektor Basis
Perdagangan, Restoran & Hotel	0,469	Sektor Non Basis
Pengangkutan & Komunikasi	1,005	Sektor Basis
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,733	Sektor Non Basis
Jasa-Jasa	0,846	Sektor Non Basis

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sembilan sektor ekonomi, terdapat tiga sektor yang menjadi sektor basis yang dimiliki oleh Kecamatan Alor Timur yaitu sektor Pertanian, Bangunan & Konstruksi dan Pengangkutan & Komunikasi, hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ yang lebih besar dari angka 1, sedangkan enam sektor ekonomi yang lain merupakan sektor non basis, hal ini karena nilai LQ yang terbentuk di bawah angka 1.

Sektor Pertanian yang menjadi sektor basis memberikan kontribusi sebesar 56,35% dilihat dari total PDRB Kecamatan Alor Timur yang sebesar

Rp.15.197.726.000,-, sektor Bangunan & Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 4,95% dan sektor Pengangkutan & Komunikasi memberikan kontribusi sebesar 5,14%.

Meskipun sektor Pertanian, Bangunan & Konstruksi dan Pengangkutan & Komunikasi merupakan sektor basis, tetapi secara statistik belum tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, oleh karena itu lebih lanjut akan diuji secara statistik yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

6. Kecamatan Alor Timur Laut

Hasil analisis *Location Quotient* dari sektor-sektor ekonomi berdasarkan PDRB dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2003 Kecamatan Alor Timur Laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.10
Analisis Location Quotient

Sektor Ekonomi	LQ	Keterangan
1	3	4
Pertanian	1,223	Sektor Basis
Pertambangan & Penggalian	1,473	Sektor Basis
Industri	1,340	Sektor Basis
Listrik & Air Minum	2,060	Sektor Basis
Bangunan & Konstruksi	1,290	Sektor Basis
Perdagangan, Restoran & Hotel	0,867	Sektor Non Basis
Pengangkutan & Komunikasi	0,885	Sektor Non Basis
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,886	Sektor Non Basis
Jasa-Jasa	0,854	Sektor Non Basis

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sembilan sektor ekonomi, terdapat lima sektor yang menjadi sektor basis yang dimiliki oleh Kecamatan Alor Timur Laut yaitu sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air

Minum dan Bangunan & Konstruksi, hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ yang lebih besar dari angka 1, sedangkan empat sektor ekonomi yang lain merupakan sektor non basis, hal ini karena nilai LQ yang terbentuk di bawah angka 1.

Sektor Pertanian yang menjadi sektor basis memberikan kontribusi sebesar 47,73% dari total PDRB Kecamatan Alor Timur Laut yang sebesar Rp.7.242.187.000,-, sektor Pertambangan & Penggalian memberikan kontribusi sebesar 1,61% dan sektor Industri memberikan kontribusi sebesar 2,52%. Sedangkan sektor Listrik & Air Minum memberikan kontribusi sebesar 1,02% dan sektor Jasa-Jasa memberikan kontribusi sebesar 5,92%.

Meskipun sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum dan Bangunan & Konstruksi merupakan sektor basis, tetapi secara statistik belum tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, oleh karena itu lebih lanjut akan diuji secara statistik yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

7. Kecamatan Teluk Mutiara

Hasil analisis *Location Quotient* dari sektor-sektor ekonomi berdasarkan PDRB dalam kurun aktu tahun 1999 sampai dengan 2003 Kecamatan Teluk Mutiara sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Alor, yang selanjutnya akan merupakan perspektif dari perkembangan daerah belakang. Adapun kajian terhadap perkembangan potensi basis ekonomi yang dimiliki dalam menunjang pusat pertumbuhan. Dimana konsidi dari penentuan sektor basis tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan pada daerah belakang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.11
Analisis Location Quotient

Sektor Ekonomi	LQ	Keterangan
1	2	3
Pertanian	0,358	Sektor Non Basis
Pertambangan & Penggalian	1,223	Sektor Basis
Industri	2,372	Sektor Basis
Listrik & Air Minum	1,536	Sektor Basis
Bangunan & Konstruksi	1,778	Sektor Basis
Perdagangan, Restoran & Hotel	2,424	Sektor Basis
Pengangkutan & Komunikasi	1,904	Sektor Basis
Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,944	Sektor Basis
Jasa-Jasa	0,897	Sektor Non Basis

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sembilan sektor ekonomi, terdapat tujuh sektor yang menjadi sektor basis yang dimiliki oleh Kecamatan Teluk Mutiara yaitu sektor Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel, Pengangkutan & Komunikasi dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ yang lebih besar dari angka 1, sedangkan dua sektor ekonomi yang lain merupakan sektor non basis, hal ini karena nilai LQ yang terbentuk di bawah angka 1.

Sektor Pertambangan & Penggalian yang menjadi sektor basis memberikan kontribusi sebesar 1,33% dari total PDRB Kecamatan Teluk Mutiara yang sebesar Rp.30.130.011.000,-, sektor Industri memberikan kontribusi sebesar 4,46% dan sektor Listrik & Air Minum memberikan kontribusi sebesar 0,76%. Sedangkan sektor Bangunan & Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 8,15%, sektor Perdagangan, Restoran & Hotel memberikan kontribusi sebesar 30,38%, sektor Pengangkutan & Komunikasi memberikan kontribusi sebesar 9,74% dan sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan memberikan kontribusi sebesar 7,85%.

Meskipun sektor Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel, Pengangkutan & Komunikasi dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan merupakan sektor basis, tetapi secara statistik belum tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, oleh karena itu lebih lanjut akan diuji secara statistik yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

8. Kecamatan Alor Barat Laut

Hasil analisis *Location Quotient* dari sektor-sektor ekonomi berdasarkan PDRB dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2003 Kecamatan Alor Barat Laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.12
Analisis Location Quotient

Sektor Ekonomi	LQ	Keterangan
1	3	4
Pertanian	1,158	Sektor Basis
Pertambangan & Penggalian	1,227	Sektor Basis
Industri	0,553	Sektor Non Basis
Listrik & Air Minum	1,002	Sektor Basis
Bangunan & Konstruksi	1,223	Sektor Basis
Perdagangan, Restoran & Hotel	1,009	Sektor Basis
Pengangkutan & Komunikasi	0,698	Sektor Non Basis
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,644	Sektor Non Basis
Jasa-Jasa	1,057	Sektor Basis

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sembilan sektor ekonomi, terdapat enam sektor yang menjadi sektor basis yang dimiliki oleh Kecamatan Alor Barat Laut yaitu sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel dan Jasa-Jasa, hal ini

ditunjukkan dengan nilai LQ yang lebih besar dari angka 1, sedangkan tiga sektor ekonomi yang lain merupakan sektor non basis, hal ini karena nilai LQ yang terbentuk di bawah angka 1.

Sektor Pertanian yang menjadi sektor basis memberikan kontribusi sebesar 45,19% dari total PDRB Kecamatan Alor Barat Laut yang sebesar Rp.15.487.842.000,-, sektor Pertambangan & Penggalian memberikan kontribusi sebesar 1,34% dan sektor Listrik & Air Minum memberikan kontribusi sebesar 0,50%. Sedangkan sektor Bangunan & Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 5,61%, sektor Perdagangan, Restoran & Hotel memberikan kontribusi sebesar 12,64% dan sektor Jasa-Jasa memberikan kontribusi sebesar 27,51%.

Meskipun sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel dan Jasa-Jasa merupakan sektor basis, tetapi secara statistik belum tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, oleh karena itu lebih lanjut akan diuji secara statistik yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

9. Kecamatan Alor Tengah Utara

Hasil analisis *Location Quotient* dari sektor-sektor ekonomi berdasarkan PDRB dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2003 Kecamatan Alor Tengah Utara yang memiliki potensi basis ekonomi dalam menunjang pertumbuhan wilayah belakang. Dimana konsiderasi dari penentuan sektor basis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.13
Analisis Location Quotient

Sektor Ekonomi	LQ	Keterangan
1	3	4
Pertanian	1,065	Sektor Basis
Pertambangan & Penggalian	2,504	Sektor Basis
Industri	1,504	Sektor Basis
Listrik & Air Minum	1,866	Sektor Basis
Bangunan & Konstruksi	1,765	Sektor Basis
Perdagangan, Restoran & Hotel	0,622	Sektor Non Basis
Pengangkutan & Komunikasi	1,202	Sektor Basis
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,218	Sektor Basis
Jasa-Jasa	0,960	Sektor Non Basis

Sumber: data sekunder, diolah

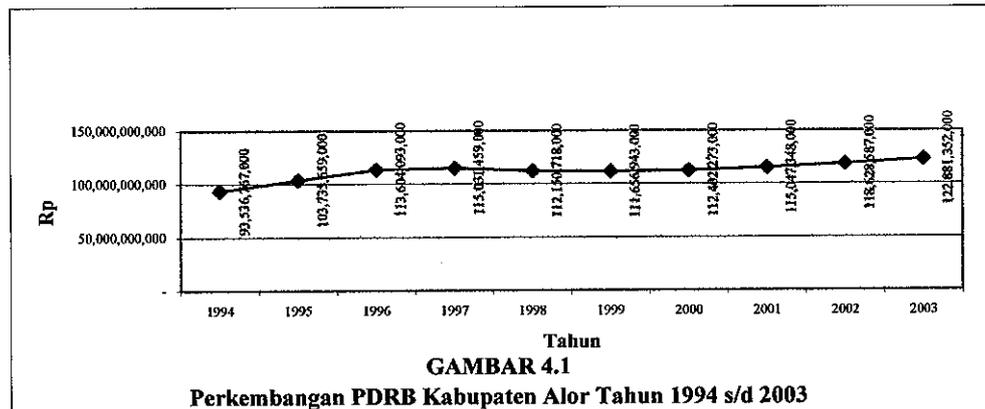
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sembilan sektor ekonomi, terdapat tujuh sektor yang menjadi sektor basis yang dimiliki oleh Kecamatan Alor Tengah Utara yaitu sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Pengangkutan & Komunikasi dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ yang lebih besar dari angka 1, sedangkan dua sektor ekonomi yang lain merupakan sektor non basis, hal ini karena nilai LQ yang terbentuk di bawah angka 1.

Sektor Pertanian yang menjadi sektor basis memberikan kontribusi sebesar 41,57% dari total PDRB Kecamatan Alor Tengah Utara yang sebesar Rp.6.477.483.000,-, sektor Pertambangan & Penggalian memberikan kontribusi sebesar 2,73% dan sektor Industri memberikan kontribusi sebesar 2,83%. Sedangkan sektor Listrik & Air Minum memberikan kontribusi sebesar 0,93%, sektor Bangunan & Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 8,10%, sektor Pengangkutan & Komunikasi dan Keuangan memberikan kontribusi sebesar 6,15% dan sektor Persewaan & Jasa Perusahaan memberikan kontribusi sebesar 4,91%.

Meskipun sektor sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Pengangkutan & Komunikasi dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan merupakan sektor basis, tetapi secara statistik belum tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, oleh karena itu lebih lanjut akan diuji secara statistik yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

4.4.2 Sektor Unggulan yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Daerah Belakang

Data yang dibutuhkan dalam menghitung sektor unggulan yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang adalah data PDRB dari sembilan kecamatan di Kabupaten Alor mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 2003 berdasarkan harga konstan tahun 1993.



Sumber: Kabupaten Alor Dalam Angka, 2001

Sebagaimana hubungan yang akan dipergunakan untuk mengetahui pengaruh dari kontribusi sektor-sektor unggulan maka dalam pengujian tersebut akan dilakukan berdasarkan tingkat pertumbuhan dari PDRB masing-masing kecamatan yang merupakan variabel terikat, dengan kontribusi dari sektor-sektor

yang berpengaruh di masing-masing wilayah kecamatan dalam hal ini sebagai variabel bebas yang berperan dalam peningkatan pertumbuhan daerah belakang di daerah belakang.

Alat analisis yang digunakan untuk menguji apakah sektor basis berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang adalah analisis regresi berganda. Untuk menguji pengaruh secara partial dilakukan dengan uji t dan untuk menguji pengaruh secara simultan atau bersama-sama dilakukan dengan uji F, bila nilai signifikan yang terbentuk di bawah 5% maka pengaruh sektor basis terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang adalah signifikan dan bila nilai signifikan yang terbentuk di atas 5% maka pengaruh sektor basis terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang adalah tidak signifikan. Sebelum analisis regresi berganda dilakukan harus memenuhi asumsi klasik yang mendasari analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data dan uji multikolinearitas.

Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, bila nilai signifikan yang terbentuk di atas 5% maka data dapat dikatakan normal, sebaliknya bila nilai signifikan yang terbentuk di bawah 5% maka data dapat dikatakan asumsi normalitas tidak terpenuhi. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat matrik korelasi, bila korelasi yang terbentuk di atas 0,900 maka dapat dikatakan korelasi antar variabel bebas tinggi dan asumsi multikolinearitas tidak terpenuhi, sebaliknya bila korelasi yang terbentuk di bawah 0,900 maka dapat dikatakan korelasi antar variabel bebas rendah dan asumsi multikolinearitas terpenuhi.

1. Kecamatan Pantar

Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, apabila nilai signifikan yang terbentuk di atas 5% maka data terdistribusi secara normal, sebaliknya bila di bawah 5% maka tidak terdistribusi secara normal.

TABEL IV.14
Uji Normalitas Data

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
1	2	3	4
PDRB	0,580	0,890	Normal
Pertanian	0,556	0,917	Normal
Pertambangan & Penggalian	0,588	0,879	Normal

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil uji Kolmogoro-Smirnov terhadap variabel PDRB (0,890), Pertanian (0,917) dan Pertambangan & Penggalian (0,879) menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai signifikansi di bawah 5%, hal ini berarti data yang dimiliki terdistribusi secara normal dan analisis regresi berganda layak untuk digunakan.

Pengujian terhadap korelasi antar variabel bebas dilakukan dengan melihat matrik korelasi, jika antar variabel bebas ada korelasi yang tinggi (umumnya di atas 0,900) maka hal ini menunjukkan indikasi terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas.

TABEL IV.15
Uji Multikolinearitas

Variabel	Pertanian	Pertambangan & Penggalian
Pertanian	1,000	-0,437
Pertambangan & Penggalian	-0,437	1,000

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel matrik korelasi di atas menunjukkan korelasi yang terbentuk antara variabel Pertanian dan Pertambangan & Penggalian adalah sebesar $-0,437$ atau di

bawah 0,900, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas sehingga analisis regresi dapat digunakan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap asumsi yang mendasari analisis regresi berganda dan tidak ditemukan adanya penyimpangan dimana data yang tersedia terdistribusi secara normal dan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas, tahap selanjutnya adalah melihat pengaruh secara partial variabel bebas terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang yang diukur dengan PDRB.

TABEL IV.16
Analisis Pengaruh Secara Partial

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
1	2	3	4
Pertanian	7,697	0,000	Signifikan
Pertambangan & Penggalian	1,479	0,183	Tidak

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,000 atau di bawah 5%.
2. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pertambangan & Penggalian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,183 atau di atas 5%. Adapun pengujian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan sektor ekonomi wilayah di Kecamatan Pantar.

Hasil pengujian pengaruh secara simultan variabel sektor Pertanian dan Pertambangan & Penggalian terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.17
Analisis Pengaruh Secara Simultan

Model	F hitung	Sig.	Keterangan	R ²
1	2	3	4	5
Regresi	31,806	0,000	Signifikan	0,873

Sumber: data sekunder, diolah

Pengujian pengaruh secara simultan menunjukkan nilai signifikan yang terbentuk adalah sebesar 0,000 atau di bawah 5%, maka dapat disimpulkan secara simultan variabel sektor Pertanian dan Pertambangan & Penggalian berpengaruh secara signifikan terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang. Variabel Pertanian dan Pertambangan & Penggalian memberikan kontribusi sebesar 0,873 atau 87,3% terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang sedangkan sisanya sebesar 12,7% dipengaruhi oleh faktor lain selain kedua variabel bebas tersebut di atas.

2. Kecamatan Pantar Barat

Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, apabila nilai signifikan yang terbentuk di atas 5% maka data terdistribusi secara normal, sebaliknya bila di bawah 5% maka tidak terdistribusi secara normal.

Dalam pengujian tersebut dimaksudkan untuk melihat keterkaitan antara hasil analisis dengan kebutuhan data tersebut telah memenuhi syarat dalam periode waktu yang akan dikaji.

TABEL IV.18
Uji Normalitas Data

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
1	2	3	4
PDRB	0,885	0,414	Normal
Pertambangan & Penggalian	0,922	0,363	Normal
Industri	0,605	0,857	Normal
Listrik & Air Minum	0,933	0,349	Normal
Keuangan, Sewa & Jasa	1,052	0,219	Normal
Jasa-Jasa	0,523	0,948	Normal

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil uji Kolmogoro-Smirnov terhadap variabel PDRB (0,414), Pertambangan & Penggalian (0,363), Industri (0,857), Listrik & Air Minum (0,349), Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (0,219) dan Jasa-Jasa (0,948) menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai signifikansi di bawah 5%, hal ini berarti data yang dimiliki terdistribusi secara normal dan analisis regresi berganda layak untuk digunakan.

Pengujian terhadap korelasi antar variabel bebas dilakukan dengan melihat matrik korelasi, jika antar variabel bebas ada korelasi yang tinggi (umumnya di atas 0,900) maka hal ini menunjukkan indikasi terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas.

TABEL IV.19
Uji Multikolinearitas

Variabel	Pertambangan & Penggalian	Industri	Listrik & Air Minum	Keuangan, Persewaan & Jasa	Jasa-Jasa
Pertambangan & Penggalian	1,000	-0,447	0,650	-0,678	0,512
Industri	-0,447	1,000	-0,201	-0,044	-0,489
Listrik & Air Minum	0,650	-0,201	1,000	-0,455	-0,244
Keuangan, Sewa & Jasa	-0,678	-0,044	-0,455	1,000	-0,349
Jasa-Jasa	0,512	-0,489	-0,244	-0,349	1,000

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel matrik korelasi di atas menunjukkan korelasi tertinggi terjadi antara variabel Pertambangan & Penggalian dan Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan yaitu sebesar $-0,678$, sedangkan korelasi terendah terjadi antara variabel Industri dan Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan yaitu sebesar $-0,044$. Meskipun demikian korelasi yang terbentuk antar variabel bebas masih di bawah $0,900$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas sehingga analisis regresi dapat digunakan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap asumsi yang mendasari analisis regresi berganda dan tidak ditemukan adanya penyimpangan dimana data yang tersedia terdistribusi secara normal dan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas, tahap selanjutnya adalah melihat pengaruh secara partial variabel bebas terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang yang diukur dengan PDRB.

TABEL IV.20
Analisis Pengaruh Secara Partial

Variabel	t hitung	Sig.	Ket.
1	2	3	4
Pertambangan & Penggalian	2,497	0,067	Tidak
Industri	1,218	0,290	Tidak
Listrik & Air Minum	1,683	0,168	Tidak
Keuangan, Sewa & Jasa	1,135	0,320	Tidak
Jasa-Jasa	3,532	0,024	Signifikan

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pertambangan & Penggalian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan

pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,067 atau di atas 5%.

2. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,290 atau di atas 5%.
3. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Listrik & Air Minum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,168 atau di atas 5%.
4. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,320 atau di atas 5%.
5. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Jasa-Jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,024 atau di bawah 5%.

Hasil pengujian pengaruh secara simultan variabel sektor Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang yang berpotensi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.21
Analisis Pengaruh Secara Simultan

Model	F hitung	Sig.	Keterangan	R ²
1	2	3	4	5
Regresi	23,806	0,004	Signifikan	0,927

Sumber: data sekunder, diolah

Pengujian pengaruh secara simultan menunjukkan nilai signifikan yang terbentuk adalah sebesar 0,004 atau di bawah 5%, maka dapat disimpulkan secara simultan variabel sektor Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa berpengaruh secara signifikan terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang. Kelima variabel bebas tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,927 atau 92,7% terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang sedangkan sisanya sebesar 7,3% dipengaruhi oleh faktor lain selain kelima variabel tersebut di atas.

3. Kecamatan Alor Barat Daya

Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, apabila nilai signifikan yang terbentuk di atas 5% maka data terdistribusi secara normal, sebaliknya bila di bawah 5% maka tidak terdistribusi secara normal.

TABEL IV.22
Uji Normalitas Data

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
1	2	3	4
PDRB	1,060	0,211	Normal
Pertanian	0,503	0,962	Normal
Pertambangan & Penggalian	0,867	0,440	Normal
Listrik & Air Minum	0,916	0,371	Normal

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil uji Kolmogoro-Smirnov terhadap variabel PDRB (0,211), Pertanian (0,962), Pertambangan & Penggalian (0,440) dan Listrik & Air Minum (0,371) menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai signifikansi di bawah 5%, hal ini berarti data yang dimiliki terdistribusi secara normal dan analisis regresi berganda layak untuk digunakan.

Pengujian terhadap korelasi antar variabel bebas dilakukan dengan melihat matrik korelasi, jika antar variabel bebas ada korelasi yang tinggi (umumnya di atas 0,900) maka hal ini menunjukkan indikasi terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas.

TABEL IV.23
Uji Multikolinearitas

Variabel	Pertanian	Pertambangan & Penggalian	Listrik & Air Minum
Pertanian	1,000	-0,803	-0,727
Pertambangan & Penggalian	-0,803	1,000	0,561
Listrik & Air Minum	-0,727	0,561	1,000

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel matrik korelasi di atas menunjukkan korelasi tertinggi terjadi antara variabel Pertanian dan Pertambangan & Penggalian yaitu sebesar $-0,803$, sedangkan korelasi terendah terjadi antara variabel Pertambangan & Penggalian dan Listrik & Air Minum yaitu sebesar $0,561$. Meskipun demikian korelasi yang terbentuk antar variabel bebas masih di bawah $0,900$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas sehingga analisis regresi dapat digunakan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap asumsi yang mendasari analisis regresi berganda dan tidak ditemukan adanya penyimpangan dimana data yang tersedia terdistribusi secara normal dan tidak terjadi multikolinearitas yang serius

antar variabel bebas, tahap selanjutnya adalah melihat pengaruh secara partial variabel bebas terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang yang diukur dengan PDRB.

TABEL IV.24
Analisis Pengaruh Secara Partial

Variabel	t hitung	Sig.	Ket.
1	2	3	4
Pertanian	0,580	0,583	Tidak
Pertambangan & Penggalian	2,012	0,091	Tidak
Listrik & Air Minum	4,784	0,003	Signifikan

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pertanian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,583 atau di atas 5%.
2. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pertambangan & Penggalian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,091 atau di atas 5%.
3. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Listrik & Air Minum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,003 atau di bawah 5%.

Hasil pengujian pengaruh secara simultan variabel sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian dan Listrik & Air Minum terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.25
Analisis Pengaruh Secara Simultan

Model	F hitung	Sig.	Keterangan	R ²
1	2	3	4	5
Regresi	26,306	0,001	Signifikan	0,894

Sumber: data sekunder, diolah

Pengujian pengaruh secara simultan menunjukkan nilai signifikan yang terbentuk adalah sebesar 0,001 atau di bawah 5%, maka dapat disimpulkan secara simultan variabel sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian dan Listrik & Air Minum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang. Ketiga variabel bebas tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,894 atau 89,4% terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang, sisanya sebesar 10,6% dipengaruhi oleh faktor lain selain ketiga variabel tersebut di atas.

4. Kecamatan Alor Selatan

Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, apabila nilai signifikan yang terbentuk di atas 5% maka data terdistribusi secara normal, sebaliknya bila di bawah 5% maka tidak terdistribusi secara normal.

TABEL IV.26
Uji Normalitas Data

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
1	2	3	4
PDRB	0,651	0,791	Normal
Listrik & Air Minum	1,033	0,236	Normal
Bangunan & Konstruksi	0,550	0,923	Normal
Pengangkutan & Komunikasi	0,573	0,898	Normal
Keuangan, Persewaan & Jasa	0,441	0,990	Normal
Jasa-Jasa	0,492	0,969	Normal

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil uji Kolmogoro-Smirnov terhadap variabel PDRB (0,791), Listrik & Air Minum (0,236), Bangunan & Konstruksi (0,923), Pengangkutan & Komunikasi (0,898), Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (0,990) dan Jasa-Jasa (0,969) menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai signifikansi di bawah 5%, hal ini berarti data yang dimiliki terdistribusi secara normal dan analisis regresi berganda layak untuk digunakan.

Pengujian terhadap korelasi antar variabel bebas dilakukan dengan melihat matrik korelasi, jika antar variabel bebas ada korelasi yang tinggi (umumnya di atas 0,900) maka hal ini menunjukkan indikasi terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas.

TABEL IV.27
Uji Multikolinearitas

Variabel	Listrik & Air Minum	Bangunan & Konstruksi	Pengangkutan & Komunikasi	Keuangan, Persewaan & Jasa	Jasa-Jasa
Listrik & Air Minum	1,000	0,836	-0,088	-0,409	-0,848
Bangunan & Konstruksi	0,836	1,000	-0,341	-0,292	-0,801
Pengangkutan & Komunikasi	-0,088	-0,341	1,000	-0,530	0,154
Keuangan, Persewaan & Jasa	-0,409	-0,292	-0,530	1,000	0,196
Jasa-Jasa	-0,848	-0,801	0,154	0,196	1,000

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel matrik korelasi di atas menunjukkan korelasi tertinggi terjadi antara variabel Listrik & Air Minum dan Jasa-Jasa yaitu sebesar $-0,848$, sedangkan korelasi terendah terjadi antara variabel Listrik & Air Minum dan Pengangkutan & Komunikasi yaitu sebesar $-0,088$. Meskipun demikian korelasi yang terbentuk antar variabel bebas masih di bawah 0,900, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas sehingga analisis regresi dapat digunakan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap asumsi yang mendasari analisis regresi berganda dan tidak ditemukan adanya penyimpangan dimana data yang tersedia terdistribusi secara normal dan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas, tahap selanjutnya adalah melihat pengaruh secara partial variabel bebas terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang yang diukur dengan PDRB.

TABEL IV.28
Analisis Pengaruh Secara Partial

Variabel	t hitung	Sig.	Ket.
1	2	3	4
Listrik & Air Minum	0,632	0,561	Tidak
Bangunan & Konstruksi	0,243	0,820	Tidak
Pengangkutan & Komunikasi	6,067	0,004	Signifikan
Keuangan, Persewaan & Jasa	0,451	0,676	Tidak
Jasa-Jasa	4,958	0,008	Signifikan

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Listrik & Air Minum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,561 atau di atas 5%.
2. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Bangunan & Konstruksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,820 atau di atas 5%.
3. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pengangkutan & Komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan

pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,004 atau di atas 5%.

4. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,676 atau di atas 5%.
5. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Jasa-Jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,008 atau di bawah 5%.

Hasil pengujian pengaruh secara simultan variabel sektor Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Pengangkutan & Komunikasi, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL IV.29
Analisis Pengaruh Secara Simultan

Model	F hitung	Sig.	Keterangan	R ²
1	2	3	4	5
Regresi	114,391	0,000	Signifikan	0,984

Sumber: data sekunder, diolah

Pengujian pengaruh secara simultan menunjukkan nilai signifikan yang terbentuk adalah sebesar 0,000 atau di bawah 5%, maka dapat disimpulkan secara simultan variabel sektor Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Pengangkutan & Komunikasi, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa berpengaruh secara signifikan terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang. Kelima variabel bebas tersebut memberikan kontribusi sebesar

0,984 atau 98,4% terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang sedangkan sisanya sebesar 1,6% dipengaruhi oleh faktor lain selain kelima variabel tersebut di atas.

5. Kecamatan Alor Timur

Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, apabila nilai signifikan yang terbentuk di atas 5% maka data terdistribusi secara normal, sebaliknya bila di bawah 5% maka tidak terdistribusi secara normal.

TABEL IV.30
Uji Normalitas Data

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
1	2	3	4
PDRB	0,712	0,691	Normal
Pertanian	0,406	0,996	Normal
Bangunan & Konstruksi	0,562	0,910	Normal
Pengangkutan & Komunikasi	0,583	0,886	Normal

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil uji Kolmogoro-Smirnov terhadap variabel PDRB (0,691), Pertanian (0,996), Bangunan & Konstruksi (0,910) dan Pengangkutan & Komunikasi (0,886) menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai signifikansi di bawah 5%, hal ini berarti data yang dimiliki terdistribusi secara normal dan analisis regresi berganda layak untuk digunakan.

Pengujian terhadap korelasi antar variabel bebas dilakukan dengan melihat matrik korelasi, jika antar variabel bebas ada korelasi yang tinggi (umumnya di atas 0,900) maka hal ini menunjukkan indikasi terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas.

TABEL IV.31
Uji Multikolinearitas

Variabel	Pertanian	Bangunan & Konstruksi	Pengangkutan & Komunikasi
Pertanian	1,000	0,596	-0,804
Bangunan & Konstruksi	0,596	1,000	-0,843
Pengangkutan & Komunikasi	-0,804	-0,843	1,000

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel matrik korelasi di atas menunjukkan korelasi tertinggi terjadi antara variabel Bangunan & Konstruksi dan Pengangkutan & Komunikasi yaitu sebesar -0,843, sedangkan korelasi terendah terjadi antara variabel Pertanian dan Bangunan & Konstruksi yaitu sebesar 0,596. Meskipun demikian korelasi yang terbentuk antar variabel bebas masih di bawah 0,900, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas sehingga analisis regresi dapat digunakan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap asumsi yang mendasari analisis regresi berganda dan tidak ditemukan adanya penyimpangan dimana data yang tersedia terdistribusi secara normal dan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas, tahap selanjutnya adalah melihat pengaruh secara partial variabel bebas terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang yang diukur dengan PDRB.

TABEL IV.32
Analisis Pengaruh Secara Partial

Variabel	t hitung	Sig.	Ket.
1	2	3	4
Pertanian	3,453	0,014	Signifikan
Bangunan & Konstruksi	1,818	0,119	Tidak
Pengangkutan&Komunikasi	0,911	0,397	Tidak

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,014 atau di bawah 5%.
2. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Bangunan & Konstruksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,119 atau di atas 5%.
3. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pengangkutan & Komunikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,397 atau di atas 5%.

Hasil pengujian pengaruh secara simultan variabel sektor Pertanian, Bangunan & Konstruksi dan Pengangkutan & Komunikasi terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.33
Analisis Pengaruh Secara Simultan

Model	F hitung	Sig.	Keterangan	R ²
1	2	3	4	5
Regresi	16,836	0,003	Signifikan	0,841

Sumber: data sekunder, diolah

Pengujian pengaruh secara simultan menunjukkan nilai signifikan yang terbentuk adalah sebesar 0,003 atau di bawah 5%, maka dapat disimpulkan secara simultan variabel sektor Pertanian, Bangunan & Konstruksi dan Pengangkutan & Komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel peningkatan

pertumbuhan daerah belakang. Ketiga variabel bebas tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,841 atau 84,1% terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang sisanya sebesar 15,9% dipengaruhi oleh faktor lain selain ketiga variabel tersebut di atas.

6. Kecamatan Alor Timur Laut

Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, apabila nilai signifikan yang terbentuk di atas 5% maka data terdistribusi secara normal, sebaliknya bila di bawah 5% maka tidak terdistribusi secara normal.

TABEL IV.34
Uji Normalitas Data

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
1	2	3	4
PDRB	0,371	0,999	Normal
Pertanian	0,511	0,956	Normal
Pertambangan & Penggalian	0,550	0,922	Normal
Industri	0,514	0,955	Normal
Listrik & Air Minum	0,726	0,668	Normal
Bangunan & Konstruksi	0,639	0,808	Normal

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil uji Kolmogoro-Smirnov terhadap variabel PDRB (0,999), Pertanian (0,956), Pertambangan & Penggalian (0,922), Industri (0,955), Listrik & Air Minum (0,668) dan Bangunan & Konstruksi (0,808) menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai signifikansi di bawah 5%, hal ini berarti data yang dimiliki terdistribusi secara normal dan analisis regresi berganda layak untuk digunakan.

Pengujian terhadap korelasi antar variabel bebas dilakukan dengan melihat matrik korelasi, jika antar variabel bebas ada korelasi yang tinggi (umumnya di

atas 0,900) maka hal ini menunjukkan indikasi terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas.

TABEL IV.35
Uji Multikolinearitas

Variabel	Pertanian	Pertambangan & Penggalian	Industri	Listrik & Air Minum	Bangunan & Konstruksi
Pertanian	1,000	0,005	-0,147	0,013	-0,154
Pertambangan & Penggalian	0,005	1,000	-0,843	0,876	-0,853
Industri	-0,147	-0,843	1,000	-0,878	0,886
Listrik & Air Minum	0,013	0,876	-0,878	1,000	-0,810
Bangunan & Konstruksi	-0,154	-0,853	0,886	-0,810	1,000

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel matrik korelasi di atas menunjukkan korelasi tertinggi terjadi antara variabel Industri dan Bangunan & Konstruksi yaitu sebesar 0,886, sedangkan korelasi terendah terjadi antara variabel Pertanian dan Pertambangan & Penggalian yaitu sebesar 0,005. Meskipun demikian korelasi yang terbentuk antar variabel bebas masih di bawah 0,900, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas sehingga analisis regresi dapat digunakan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap asumsi yang mendasari analisis regresi berganda dan tidak ditemukan adanya penyimpangan dimana data yang tersedia terdistribusi secara normal dan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas, tahap selanjutnya adalah melihat pengaruh secara partial variabel bebas terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang yang diukur dengan PDRB.

Kajian terhadap asumsi tersebut diatas dimaksudkan untuk mengetahui bahwa tidak terdapat variabel yang saling dominan sehingga dapat mempengaruhi kevaliditas sektor yang menjadi unggulan.

TABEL IV.36
Analisis Pengaruh Secara Partial

Variabel	t hitung	Sig.	Ket.
1	2	3	4
Pertanian	0,893	0,422	Tidak
Pertambangan & Penggalian	0,109	0,919	Tidak
Industri	0,034	0,975	Tidak
Listrik & Air Minum	0,597	0,583	Tidak
Bangunan & Konstruksi	0,598	0,582	Tidak

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pertanian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,422 atau di atas 5%.
2. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pertambangan & Penggalian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,919 atau di atas 5%.
3. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,975 atau di atas 5%.
4. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Listrik & Air Minum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,583 atau di atas 5%.

5. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Bangunan & Konstruksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,582 atau di atas 5%.

Hasil pengujian pengaruh secara simultan variabel sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum dan Bangunan & Konstruksi terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.37
Analisis Pengaruh Secara Simultan

Model	F hitung	Sig.	Keterangan	R ²
1	2	3	4	5
Regresi	9,120	0,026	Signifikan	0,819

Sumber: data sekunder, diolah

Pengujian pengaruh secara simultan menunjukkan nilai signifikan yang terbentuk adalah sebesar 0,026 atau di bawah 5%, maka dapat disimpulkan secara simultan variabel sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum dan Bangunan & Konstruksi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang. Kelima variabel bebas tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,819 atau 81,9% terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang sedangkan sisanya sebesar 18,1% dipengaruhi oleh faktor lain selain kelima variabel tersebut di atas.

7. Kecamatan Teluk Mutiara

Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, apabila nilai signifikan yang terbentuk di atas 5% maka data

terdistribusi secara normal, sebaliknya bila di bawah 5% maka tidak terdistribusi secara normal.

TABEL IV.38
Uji Normalitas Data

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
1	2	3	4
PDRB	0,684	0,738	Normal
Pertambangan & Penggalian	0,881	0,420	Normal
Industri	0,664	0,769	Normal
Listrik & Air Minum	0,490	0,970	Normal
Bangunan & Konstruksi	0,760	0,611	Normal
Perdagangan, Restoran & Hotel	0,581	0,889	Normal
Pengangkutan & Komunikasi	0,765	0,603	Normal
Keuangan, Persewaan & Jasa	0,767	0,598	Normal

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil uji Kolmogoro-Smirnov terhadap variabel PDRB (0,738), Pertambangan & Penggalian (0,420), Industri (0,769), Listrik & Air Minum (0,970), Bangunan & Konstruksi (0,611), Perdagangan, Restoran & Hotel (0,889), Pengangkutan & Komunikasi (0,603) dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (0,598) menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai signifikansi di bawah 5%, hal ini berarti layak digunakan.

Pengujian terhadap korelasi antar variabel bebas dilakukan dengan melihat matrik korelasi, jika antar variabel bebas ada korelasi yang tinggi (umumnya di atas 0,900) maka hal ini menunjukkan indikasi terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas.

Dalam pengujian tersebut dimaksudkan untuk melihat seberapa besar pengaruh terhadap nilai dari sektor unggulan yang dimiliki pada Kecamatan Alor Timur Laut, Dan keterikatan variabel yang saling dominan sehingga perhitungan regresi dapat dilakukan.

TABEL IV.39
Uji Multikolinearitas

Variabel	Pertambangan & Penggalian	Industri	Listrik & Air Minum	Bangunan & Konstruksi	Perdagangan, Restoran & Hotel	Pengangkutan & Komunikasi	Keuangan, Persewaan & Jasa
Pertambangan & Penggalian	1,000	-0,612	-0,419	-0,812	0,166	0,799	0,770
Industri	-0,612	1,000	-0,114	0,197	-0,500	-0,447	-0,320
Listrik & Air Minum	-0,419	-0,114	1,000	0,612	-0,380	-0,309	-0,651
Bangunan & Konstruksi	-0,812	0,197	0,612	1,000	0,143	-0,835	-0,878
Perdagangan, Restoran & Hotel	0,166	-0,500	-0,380	0,143	1,000	-0,077	0,065
Pengangkutan & Komunikasi	0,799	-0,447	-0,309	-0,835	-0,077	1,000	0,611
Keuangan, Persewaan & Jasa	0,770	-0,320	-0,651	-0,878	0,065	0,611	1,000

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel matrik korelasi di atas menunjukkan korelasi tertinggi terjadi antara variabel Bangunan & Konstruksi dan Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan yaitu sebesar $-0,878$, sedangkan korelasi terendah terjadi antara variabel Perdagangan, Restoran & Hotel dan Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan yaitu sebesar $0,065$. Meskipun demikian korelasi yang terbentuk antar variabel bebas masih di bawah $0,900$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas sehingga analisis regresi dapat digunakan.

TABEL IV.40
Analisis Pengaruh Secara Partial

Variabel	t hitung	Slg.	Ket.
1	2	3	4
Pertambangan & Penggalian	1,241	0,340	Tidak
Industri	0,996	0,424	Tidak
Listrik & Air Minum	2,758	0,110	Tidak
Bangunan & Konstruksi	2,350	0,143	Tidak
Perdagangan, Restoran & Hotel	2,261	0,152	Tidak
Pengangkutan & Komunikasi	0,822	0,498	Tidak
Keuangan, Persewaan & Jasa	0,812	0,502	Tidak

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pertambangan & Penggalan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,340 atau di atas 5%.
2. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,424 atau di atas 5%.
3. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Listrik & Air Minum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,110 atau di atas 5%.
4. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Bangunan & Konstruksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,143 atau di atas 5%.
5. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Perdagangan, Restoran & Hotel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,152 atau di atas 5%.
6. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pengangkutan & Komunikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan

pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,498 atau di atas 5%.

7. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,502 atau di atas 5%.

Hasil pengujian pengaruh secara simultan variabel sektor Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel, Pengangkutan & Komunikasi dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.41
Analisis Pengaruh Secara Simultan

Model	F hitung	Sig.	Keterangan	R ²
1	2	3	4	5
Regresi	102,786	0,010	Signifikan	0,988

Sumber: data sekunder, diolah

Pengujian pengaruh secara simultan menunjukkan nilai signifikan yang terbentuk adalah sebesar 0,010 atau di bawah 5%, maka dapat disimpulkan secara simultan variabel sektor Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel, Pengangkutan & Komunikasi dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang. Ketujuh variabel bebas tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,988 atau 98,8% terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang sedangkan sisanya sebesar 1,2% dipengaruhi oleh faktor lain selain ketujuh variabel tersebut di atas.

8. Kecamatan Alor Barat Laut

Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, apabila nilai signifikan yang terbentuk di atas 5% maka data terdistribusi secara normal, sebaliknya bila di bawah 5% maka tidak terdistribusi secara normal.

TABEL IV.42
Uji Normalitas Data

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
1	2	3	4
PDRB	0,958	0,318	Normal
Pertanian	0,663	0,772	Normal
Pertambangan & Penggalian	0,697	0,717	Normal
Listrik & Air Minum	0,903	0,389	Normal
Bangunan & Konstruksi	0,736	0,650	Normal
Perdagangan, Restoran & Hotel	0,796	0,551	Normal
Jasa-Jasa	0,572	0,899	Normal

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil uji Kolmogoro-Smirnov terhadap variabel PDRB (0,318), Pertanian (0,772), Pertambangan & Penggalian (0,717), Listrik & Air Minum (0,389), Bangunan & Konstruksi (0,650), Perdagangan, Restoran & Hotel (0,551) dan Jasa-Jasa (0,899) menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai signifikansi di bawah 5%, hal ini berarti data yang dimiliki terdistribusi secara normal dan analisis regresi berganda layak untuk digunakan.

Pengujian terhadap korelasi antar variabel bebas dilakukan dengan melihat matrik korelasi, jika antar variabel bebas ada korelasi yang tinggi (umumnya di atas 0,900) maka hal ini menunjukkan indikasi terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas.

TABEL IV.43
Uji Multikolinearitas

Variabel	Pertanian	Pertambangan & Penggalian	Listrik & Air Minum	Bangunan & Konstruksi	Perdagangan, Restoran & Hotel	Jasa-Jasa
Pertanian	1,000	0,232	-0,516	-0,743	0,740	-0,760
Pertambangan & Penggalian	0,232	1,000	0,100	-0,751	0,378	-0,367
Listrik & Air Minum	-0,516	0,100	1,000	0,286	-0,584	0,065
Bangunan & Konstruksi	-0,743	-0,751	0,286	1,000	-0,623	0,605
Perdagangan, Restoran & Hotel	0,740	0,378	-0,584	-0,623	1,000	-0,770
Jasa-Jasa	-0,760	-0,367	0,065	0,605	-0,770	1,000

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel matrik korelasi di atas menunjukkan korelasi tertinggi terjadi antara variabel Perdagangan, Restoran & Hotel dan Jasa-Jasa yaitu sebesar $-0,770$, sedangkan korelasi terendah terjadi antara variabel Listrik & Air Minum dan Jasa-Jasa yaitu sebesar $0,065$. Meskipun demikian korelasi yang terbentuk antar variabel bebas masih di bawah $0,900$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas sehingga analisis regresi dapat digunakan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap asumsi yang mendasari analisis regresi berganda dan tidak ditemukan adanya penyimpangan dimana data yang tersedia terdistribusi secara normal dan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas, tahap selanjutnya adalah melihat pengaruh secara partial variabel bebas terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang yang diukur dengan PDRB.

Kajian terhadap asumsi tersebut diatas dimaksudkan untuk mengetahui bahwa tidak terdapat variabel yang saling dominan sehingga dapat mempengaruhi kevaliditas sektor yang menjadi unggulan.

TABEL IV.44
Analisis Pengaruh Secara Partial

Variabel	t hitung	Sig.	Ket.
1	4	5	6
Pertanian	7,194	0,006	Signifikan
Pertambangan & Penggalian	0,057	0,958	Tidak
Listrik & Air Minum	0,395	0,719	Tidak
Bangunan & Konstruksi	3,617	0,036	Signifikan
Perdagangan, Restoran & Hotel	6,157	0,009	Signifikan
Jasa-Jasa	7,765	0,004	Signifikan

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,006 atau di bawah 5%.
2. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pertambangan & Penggalian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,958 atau di atas 5%.
3. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Listrik & Air Minum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,719 atau di atas 5%.
4. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Bangunan & Konstruksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,036 atau di bawah 5%.

5. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Perdagangan, Restoran & Hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,009 atau di bawah 5%.
6. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Jasa-Jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,004 atau di bawah 5%.

Hasil pengujian pengaruh secara simultan variabel sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalan, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel dan Jasa-Jasa terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.45
Analisis Pengaruh Secara Simultan

Model	F hitung	Sig.	Keterangan	R ²
1	2	3	4	5
Regresi	1.543,576	0,000	Signifikan	0,999

Sumber: data sekunder, diolah

Pengujian pengaruh secara simultan menunjukkan nilai signifikan yang terbentuk adalah sebesar 0,000 atau di bawah 5%, maka dapat disimpulkan secara simultan variabel sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalan, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel dan Jasa-Jasa berpengaruh secara signifikan terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang. Keenam variabel bebas tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,999 atau 99,9% terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang

sedangkan sisanya sebesar 0,1% dipengaruhi oleh faktor lain selain keenam variabel tersebut di atas.

9. Kecamatan Alor Tengah Utara

Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, apabila nilai signifikan yang terbentuk di atas 5% maka data terdistribusi secara normal, sebaliknya bila di bawah 5% maka tidak terdistribusi secara normal.

TABEL IV.46
Uji Normalitas Data

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
1	2	3	4
PDRB	0,577	0,893	Normal
Pertanian	0,523	0,947	Normal
Pertambangan & Penggalian	0,630	0,823	Normal
Industri	0,829	0,498	Normal
Listrik & Air Minum	0,848	0,469	Normal
Bangunan & Konstruksi	0,834	0,489	Normal
Pengangkutan & Komunikasi	0,668	0,764	Normal
Keuangan, Persewaan & Jasa	0,700	0,711	Normal

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil uji Kolmogoro-Smirnov terhadap variabel PDRB (0,893), Pertanian (0,947), Pertambangan & Penggalian (0,823), Industri (0,498), Listrik & Air Minum (0,469), Bangunan & Konstruksi (0,489), Pengangkutan & Komunikasi (0,764) dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (0,711) menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai signifikansi di bawah 5%, hal ini berarti data layak untuk digunakan.

Pengujian terhadap korelasi antar variabel bebas dilakukan dengan melihat matrik korelasi, jika antar variabel bebas ada korelasi yang tinggi (umumnya di

atas 0,900) maka hal ini menunjukkan indikasi terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas.

TABEL IV.47
Uji Multikolinearitas

Variabel	Pertanian	Pertambangan & Penggalian	Industri	Listrik & Air Minum	Bangunan & Konstruksi	Pengangkutan & Komunikasi	Keuangan, Persewaan & Jasa
Pertanian	1,000	0,453	0,372	0,009	-0,553	-0,485	0,634
Pertambangan & Penggalian	0,453	1,000	0,531	0,693	-0,805	-0,251	0,180
Industri	0,372	0,531	1,000	0,107	-0,390	-0,673	0,254
Listrik & Air Minum	0,009	0,693	0,107	1,000	-0,361	0,019	-0,232
Bangunan & Konstruksi	-0,553	-0,805	-0,390	-0,361	1,000	-0,014	-0,265
Pengangkutan & Komunikasi	-0,485	-0,251	-0,673	0,019	-0,014	1,000	-0,598
Keuangan, Persewaan & Jasa	0,634	0,180	0,254	-0,232	-0,265	-0,598	1,000

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel matrik korelasi di atas menunjukkan korelasi tertinggi terjadi antara variabel Pertambangan & Penggalian dan Bangunan & Konstruksi yaitu sebesar -0,805, sedangkan korelasi terendah terjadi antara variabel Pertanian dan Listrik & Air Minum yaitu sebesar 0,009. Meskipun demikian korelasi yang terbentuk antar variabel bebas masih di bawah 0,900, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas sehingga analisis regresi dapat digunakan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap asumsi yang mendasari analisis regresi berganda dan tidak ditemukan adanya penyimpangan dimana data yang tersedia terdistribusi secara normal dan tidak terjadi multikolinearitas yang serius antar variabel bebas, tahap selanjutnya adalah melihat pengaruh secara partial variabel bebas terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang yang diukur dengan PDRB.

TABEL IV.48
Analisis Pengaruh Secara Partial

Variabel	t hitung	Sig.	Ket.
1	4	5	6
Pertanian	7,012	0,020	Signifikan
Pertambangan & Penggalian	0,506	0,663	Tidak
Industri	1,596	0,251	Tidak
Listrik & Air Minum	5,361	0,033	Signifikan
Bangunan & Konstruksi	0,175	0,877	Tidak
Pengangkutan & Komunikasi	2,829	0,106	Tidak
Keuangan, Persewaan & Jasa	3,832	0,062	Tidak

Sumber: data sekunder, diolah

Dari total di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,020 atau di bawah 5%.
2. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pertambangan & Penggalian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,663 atau di atas 5%.
3. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,251 atau di atas 5%.
4. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Listrik & Air Minum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,033 atau di bawah 5%.

5. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Bangunan & Konstruksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,877 atau di atas 5%.
6. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Pengangkutan & Komunikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,106 atau di atas 5%.
7. Pengujian pengaruh secara partial menunjukkan sektor Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang terbentuk adalah sebesar 0,062 atau di atas 5%.

Hasil pengujian pengaruh secara simultan variabel sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Pengangkutan & Komunikasi dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.49
Analisis Pengaruh Secara Simultan

Model	F hitung	Sig.	Keterangan	R ²
1	2	3	4	5
Regresi	127,407	0,008	Signifikan	0,990

Sumber: data sekunder, diolah

Pengujian pengaruh secara simultan menunjukkan nilai signifikan yang terbentuk adalah sebesar 0,008 atau di bawah 5%, maka dapat disimpulkan secara simultan variabel sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik

& Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Pengangkutan & Komunikasi dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang. Ketujuh variabel bebas tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,990 atau 99,0% terhadap variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang sedangkan sisanya sebesar 1,0% dipengaruhi oleh faktor lain selain ketujuh variabel tersebut di atas.

4.4.3 Kontribusi Sektor Unggulan yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Daerah Belakang

Kajian ini akan membahas seberapa besar pengaruh sektor unggulan terhadap pertumbuhan daerah belakang dengan melihat koefisien regresi yang terbentuk. Dari sembilan sektor ekonomi, hanya terdapat enam sektor ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang yaitu sektor Pertanian, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel, Pengangkutan & Komunikasi dan Jasa-Jasa.

Penentuan terhadap pertumbuhan sektor unggulan dari kajian tersebut diatas merupakan hasil terhadap kontribusi sumbangan sektor ekonomi dari PDRB tingkat Kecamatan selama periode sepuluh tahun, yang akan menunjukkan secara kuantitas tingkat perkembangan secara sektoral. Kemajuan dan kemunduran dalam kajian dari perkembangan sektor unggulan akan dapat diukur sebagai upaya yang menjadi prioritas dalam meningkatkan perkembangan wilayah belakang. Untuk lebih jelasnya seberapa besar pengaruh enam sektor tersebut terhadap peningkatan daerah belakang pada setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.50
Analisis Pengaruh Secara Partial

Variabel	Koefisien Regresi								
	Pantar	Pantar Barat	Alor Barat Daya	Alor Selatan	Alor Timur	Alor Timur Laut	Teluk Melilera	Alor Barat Laut	Alor Tengah Utara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertanian	1,502	-	-	-	1,646	-	-	0,933	1,010
Listrik & Air Minum	-	-	47,726	-	-	-	-	-	15,706
Bangunan & Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	2,452	-
Perdagangan, Restoran & Hotel	-	-	-	-	-	-	-	0,807	-
Pengangkutan & Komunikasi	-	-	-	4,655	-	-	-	-	-
Jasa-Jasa	-	1,967	-	1,333	-	-	-	1,339	-

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel di atas dapat di analisis sebagai berikut :

1. Kecamatan Pantar

Kecamatan Pantar memiliki dua sektor basis yaitu sektor Pertanian dan sektor Pertambangan & Penggalan, tetapi dari kedua sektor tersebut hanya sektor Pertanian yang secara partial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan daerah belakang.

Besarnya koefisien variabel sektor Pertanian yang terbentuk dari analisis data adalah sebesar 1,502 dan memiliki pengaruh positif artinya setiap ada peningkatan hasil dari sektor Pertanian sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami peningkatan sebesar Rp.1,502, sebaliknya apabila hasil dari sektor Pertanian mengalami penurunan sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami penurunan sebesar Rp.1,502.

Dengan demikian dari hasil analisis tersebut secara signifikan menunjukkan pengaruh positif untuk diprioritaskan perkembangan sektor unggulan di Kecamatan Pantar adalah sektor Pertanian.

2. Kecamatan Pantar Barat

Kecamatan Pantar Barat memiliki lima sektor basis yaitu sektor Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Keuangan, Sewa & Jasa dan Jasa-Jasa, tetapi dari kelima sektor tersebut hanya sektor Jasa-Jasa yang secara partial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan daerah belakang.

Besarnya koefisien variabel sektor Jasa-Jasa yang terbentuk dari analisis data adalah sebesar 1,967 dan memiliki pengaruh positif artinya setiap ada peningkatan hasil dari sektor Jasa-Jasa sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami kenaikan sebesar Rp.1,967, sebaliknya apabila hasil sektor Jasa-Jasa mengalami penurunan sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami penurunan sebesar Rp.1,967.

3. Kecamatan Alor Barat Daya

Kecamatan Alor Barat Daya memiliki tiga sektor basis yaitu sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian dan Listrik & Air Minum tetapi dari ketiga sektor tersebut hanya sektor Listrik & Air Minum yang secara partial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan daerah belakang.

Besarnya koefisien variabel sektor Listrik & Air Minum yang terbentuk dari analisis data adalah sebesar 47,726 dan memiliki pengaruh positif artinya setiap ada peningkatan hasil sektor Listrik & Air Minum sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami peningkatan sebesar Rp.47,726, sebaliknya apabila sektor Listrik & Air Minum mengalami penurunan hasil sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami penurunan sebesar Rp.47,726.

4. Kecamatan Alor Selatan

Kecamatan Alor Selatan memiliki lima sektor basis yaitu sektor Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Pengangkutan & Komunikasi, Keuangan, Persewaan & Jasa dan Jasa-Jasa, dari kelima sektor tersebut ada dua sektor yang secara partial memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan daerah belakang yaitu sektor Pengangkutan & Komunikasi dan Jasa-Jasa.

Besarnya koefisien variabel sektor Pengangkutan & Komunikasi yang terbentuk dari analisis data adalah sebesar 4,655 dan memiliki pengaruh positif artinya setiap ada peningkatan hasil dari sektor Pengangkutan & Komunikasi sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami kenaikan sebesar Rp.4,655, sebaliknya apabila hasil dari sektor Pengangkutan & Komunikasi mengalami penurunan sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami penurunan sebesar Rp.4,655.

Besarnya koefisien variabel sektor Jasa-Jasa yang terbentuk dari analisis data adalah sebesar 1,333 dan memiliki pengaruh positif artinya setiap ada peningkatan hasil dari sektor Jasa-Jasa sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami peningkatan sebesar 1,333, sebaliknya apabila hasil dari sektor Jasa-Jasa mengalami penurunan sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami penurunan sebesar Rp.1,333.

5. Kecamatan Alor Timur

Kecamatan Alor Timur memiliki tiga sektor basis yaitu sektor Pertanian, Bangunan & Konstruksi dan Pengangkutan & Komunikasi, tetapi dari ketiga

sektor tersebut hanya sektor Pertanian yang secara partial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan daerah belakang.

Besarnya koefisien variabel sektor Pertanian yang terbentuk dari analisis data adalah sebesar 1,646 artinya setiap ada peningkatan hasil dari sektor Pertanian sebesar Rp.1 maka variabel pertumbuhan daerah belakang akan mengalami peningkatan sebesar Rp.1,646, sebaliknya apabila hasil dari sektor Pertanian mengalami penurunan sebesar Rp.1 maka variabel pertumbuhan daerah belakang akan mengalami penurunan sebesar Rp.1,646.

6. Kecamatan Alor Timur Laut

Kecamatan Alor Timur Laut memiliki lima sektor basis yaitu sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum dan Bangunan & Konstruksi, tetapi dari kelima sektor tersebut tidak ada satupun yang secara partial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan daerah belakang.

7. Kecamatan Teluk Mutiara

Kecamatan Teluk Mutiara memiliki tujuh sektor basis yaitu sektor Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel, Pengangkutan & Komunikasi dan Keuangan, Persewaan & Jasa tetapi dari ketujuh sektor tersebut tidak ada satupun yang secara partial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan daerah belakang. Dengan demikian dari hasil analisis tersebut secara signifikan menunjukkan pengaruh positif untuk diprioritaskan perkembangan sektor unggulan di Kecamatan Teluk Mutiara adalah tujuh sektor basis yang dominan.

UPT-PUSTAK-UNDIP

8. Kecamatan Alor Barat Laut

Kecamatan Alor Barat Laut memiliki enam sektor basis yaitu sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalan, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel dan Jasa-Jasa, dari keenam sektor tersebut ada empat sektor yang secara partial memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan daerah belakang yaitu sektor sektor Pertanian, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel dan Jasa-Jasa.

Besarnya koefisien variabel sektor Pertanian yang terbentuk dari analisis data adalah sebesar 0,933 dan memiliki pengaruh positif artinya setiap ada peningkatan hasil dari sektor Pertanian sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami peningkatan sebesar Rp.0,933, sebaliknya apabila hasil dari sektor Pertanian mengalami penurunan sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami penurunan sebesar Rp.0,933.

Besarnya koefisien variabel sektor Bangunan & Konstruksi yang terbentuk dari analisis data adalah sebesar 2,452 dan memiliki pengaruh positif artinya setiap ada peningkatan hasil dari sektor Bangunan & Konstruksi sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami peningkatan sebesar Rp.2,452, sebaliknya apabila hasil dari sektor Bangunan & Konstruksi mengalami penurunan sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami penurunan sebesar Rp.2,452.

Besarnya koefisien variabel sektor Perdagangan, Restoran & Hotel yang terbentuk dari analisis data adalah sebesar 0,807 dan memiliki pengaruh positif artinya setiap ada peningkatan hasil dari sektor Perdagangan, Restoran & Hotel

sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami peningkatan sebesar Rp.0,807, sebaliknya apabila hasil dari sektor Perdagangan, Restoran & Hotel mengalami penurunan sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami penurunan sebesar Rp.0,807.

Besarnya koefisien variabel sektor Jasa-Jasa yang terbentuk dari analisis data adalah sebesar 1,339 dan memiliki pengaruh positif artinya setiap ada peningkatan hasil dari sektor Jasa-Jasa sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami peningkatan sebesar Rp.1,339, sebaliknya apabila hasil dari sektor Jasa-Jasa mengalami penurunan sebesar Rp.1 maka variabel peningkatan pertumbuhan daerah belakang akan mengalami penurunan sebesar Rp.1,339.

9. Kecamatan Alor Tengah Utara

Kecamatan Alor Tengah Utara memiliki tujuh sektor basis yaitu sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Pengangkutan & Komunikasi dan Keuangan, Persewaan & Jasa, dari ketujuh sektor tersebut ada dua sektor yang secara partial memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan daerah belakang yaitu sektor sektor Pertanian dan Listrik & Air Minum.

Besarnya koefisien variabel sektor Pertanian yang terbentuk dari analisis data adalah sebesar 1,010 dan memiliki pengaruh positif artinya setiap ada peningkatan hasil dari sektor Pertanian sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami peningkatan sebesar Rp.1,010, sebaliknya apabila hasil

dari sektor Pertanian mengalami penurunan sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami penurunan sebesar Rp.1,010.

Besarnya koefisien variabel sektor Listrik & Air Minum yang terbentuk dari analisis data adalah sebesar 15,706 dan memiliki pengaruh positif artinya setiap ada peningkatan hasil dari sektor Listrik & Air Minum sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami peningkatan sebesar Rp.15,706, sebaliknya apabila hasil dari sektor Listrik & Air Minum mengalami penurunan sebesar Rp.1 maka pertumbuhan daerah belakang akan mengalami penurunan sebesar Rp.15,706.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Temuan Hasil Penelitian

1. Kajian Struktur Ruang Wilayah

Berdasarkan analisis struktur ruang wilayah Kabupaten Alor dengan alat analisis Skalogram diketahui bahwa Kecamatan Pantar dan Kecamatan Teluk Mutiara merupakan kecamatan berorde I. Meskipun keduanya merupakan pusat pertumbuhan namun belum dapat mendorong pemerataan pembangunan. Hal ini berpengaruh terhadap penjabaran pembangunan yang jauh lebih berkembang intensitasnya pada pusat pelayanan bila dibandingkan dengan daerah belakang menjadi sangat lamban.

Struktur ruang yang baik akan memungkinkan keberlangsungan semua aktivitas pembangunan berdasarkan karakteristik dari lokasi yang tepat terhadap perkembangan kota-kota yang memiliki potensi ekonomi dengan pemerataan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi. Pendekatan keruangan yang dilakukan tersebut melalui suatu karakteristik tempat sebagai pusat pertumbuhan dari analisis diketahui Kecamatan Pantar lebih condong sebagai sentra pelayanan perdesaan sedangkan Kecamatan Teluk Mutiara lebih sebagai pusat pelayanan perkotaan.

2. Analisis Wilayah Pengaruh

Berdasarkan Indeks Gravitasi ditemukan dua pusat wilayah pengaruh yaitu Kecamatan Pantar sebagai pusat pertumbuhan pertama pengaruhnya lebih kuat

terhadap Kecamatan Pantar Barat hal tersebut dipengaruhi karena kondisi wilayah yang bersangkutan merupakan daerah kepulauan, sedangkan Kecamatan Teluk Mutiara sebagai wilayah pusat pertumbuhan kedua dengan wilayah terpengaruh meliputi Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Tengah Utara hal tersebut dipengaruhi karena kondisi wilayah yang bersangkutan merupakan satu daratan wilayah pengembangan.

3. Analisis Tingkat Kesenjangan antar Wilayah

Berdasarkan analisis disparitas antar wilayah lebih dipengaruhi oleh besarnya tingkat ketimpangan yang dilihat dari jumlah penduduk dan kontribusi PDRB antar wilayah kecamatan yang tidak merata dibandingkan dengan sumbangannya terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang di Kabupaten Alor. Dengan alat analisis Indeks Williamson diketahui tingkat kesenjangan yang terjadi di Kabupaten Alor masih berada di bawah nilai yang telah ditetapkan (0,4 – 0,5) sehingga dapat dikatakan tingkat kesenjangan yang terjadi masih wajar dan tingkat kesenjangan yang terjadi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

4. Kajian Potensi Sektor Ekonomi Basis Wilayah

Berdasarkan analisis data PDRB kecamatan selama periode 1994 – 2003 pertumbuhan ekonomi wilayah lebih dipengaruhi oleh perbedaan pertumbuhan antar sektor dalam kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan dan sebaliknya kontribusi dengan sektor lain (sekunder dan tersier). Dengan alat analisis *Location*

Quotient (LQ) dan regresi berganda diketahui setiap kecamatan di Kabupaten Alor memiliki sektor basis atau sektor unggulan sebagai berikut:

1. Kecamatan Pantar

Berdasarkan analisis *Location Quotient* diketahui sektor basis yang dimiliki adalah sektor Pertanian dan Pertambangan & Penggalian. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan hanya sektor Pertanian yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang.

2. Kecamatan Pantar Barat

Berdasarkan analisis *Location Quotient* diketahui sektor basis yang dimiliki adalah sektor Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan hanya sektor Jasa-Jasa yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang.

3. Kecamatan Alor Barat Daya

Berdasarkan analisis *Location Quotient* diketahui sektor basis yang dimiliki adalah sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian dan Listrik & Air Minum. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan hanya sektor Listrik & Air Minum yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang.

4. Kecamatan Alor Selatan

Berdasarkan analisis *Location Quotient* diketahui sektor basis yang dimiliki adalah sektor Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Pengangkutan & Komunikasi, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa. Hasil

analisis regresi berganda menunjukkan sektor Pengangkutan & Komunikasi dan Jasa-Jasa yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang.

5. Kecamatan Alor Timur

Berdasarkan analisis *Location Quotient* diketahui sektor basis yang dimiliki adalah sektor Pertanian, Bangunan & Konstruksi dan Pengangkutan & Komunikasi. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan hanya sektor Pertanian yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang.

6. Kecamatan Alor Timur laut

Berdasarkan analisis *Location Quotient* diketahui sektor basis yang dimiliki adalah sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum dan Bangunan & Konstruksi. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan tidak ada satupun sektor basis yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang.

7. Kecamatan Teluk Mutiara

Berdasarkan analisis *Location Quotient* diketahui sektor basis yang dimiliki adalah sektor Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel, Pengangkutan & Komunikasi dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan tidak ada satupun sektor basis yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang.

8. Kecamatan Alor barat Laut

Berdasarkan analisis *Location Quotient* diketahui sektor basis yang dimiliki adalah sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel dan Jasa-Jasa. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan sektor Pertanian, Bangunan & Konstruksi, Perdagangan, Restoran & Hotel dan Jasa-Jasa berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang.

9. Kecamatan Alor Tengah Utara.

Berdasarkan analisis *Location Quotient* diketahui sektor basis yang dimiliki adalah sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Listrik & Air Minum, Bangunan & Konstruksi, Pengangkutan & Komunikasi dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan sektor Pertanian dan Listrik & Air Minum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan daerah belakang.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian analisis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kajian struktur ruang wilayah.

Pendekatan struktur ruang wilayah terbentuk karena adanya pergerakan barang dan manusia sebagai aktivitas sosial ekonomi penduduk. Pola pergerakan tersebut membentuk simpul-simpul kegiatan, bahwa pusat pertumbuhan sebagai simpul merupakan kumpulan kelengkapan fasilitas dan

secara hierarki akan saling mengikat terhadap besar kecilnya kedudukan suatu kota.

Berdasarkan hasil kajian analisis skalogram dan kajian teori disimpulkan bahwa secara hierarki diketahui orde kota di Kabupaten Alor di klasifikasi dalam 3 orde pusat pengembangan wilayah dengan 2 pusat pelayanan yang mempunyai spesifikasi sektor propulsif (perkotaan) yang berada di Kecamatan Teluk Mutiara, dan sektor perdesaan yang berada di Kecamatan Pantar. Dari 2 pusat pelayanan tersebut akan membentuk simpul-simpul pelayanan secara efektif dalam distribusi barang dan jasa yang sangat tergantung oleh karakteristik dan kondisi wilayah kepulauan dan daratan dalam memilih daerah pasar untuk dapat menarik kontribusi potensi sektor unggulan yang dimiliki. Sebagaimana kajian wilayah pengaruh melalui Indeks Gravitasi menunjukkan adanya sistem keruangan antara pusat-pusat pelayanan dengan hierarki kota sebagai simpul-simpul daerah belakang. Sehingga kondisi daerah yang kurang memiliki akses dalam pelayanan fasilitas sarana terutama daerah belakang yang tidak efektif perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap struktur tata ruang dalam penentuan pusat-pusat pelayanan baru bagi aktivitas dan perkembangan penduduk dimasa yang akan datang.

2. Kajian tingkat kesenjangan antara wilayah melalui indikator sumbangan PDRB dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan bahwa adanya ketimpangan pemerataan pendapatan. Kondisi ini terjadi pada Kecamatan Teluk Mutiara sebagai pusat pertumbuhan lebih besar kontribusinya terhadap sektor pembangunan, Sedangkan pada Kecamatan Pantar, Pantar Barat, Alor

timur laut, Alor Barat Laut dan Alor Tengah Utara kontribusi terhadap sumbangan sektor pembangunan lebih kecil persentasenya, namun dari sektor primer memiliki sumbangan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor. Hal tersebut dikarenakan oleh struktur ekonomi yang dilihat dari kontribusi sektor PDRB di kecamatan bersangkutan merupakan daerah sentra produksi sektor pertanian yang memiliki tingkat kesejahteraan penduduk sangat rendah. Namun ketimpangan yang terjadi dalam peningkatan pertumbuhan di masing-masing wilayah tersebut dari tahun ketahun cenderung menurun sesuai batas ambang yang wajar dibawah 0,4 – 0,5% (Indeks Williamson) bagi perkembangan wilayah yang bersangkutan.

3. Kajian Sektor Basis melalui 9 (sembilan) sektor pembangunan selama 5 (lima) tahun dari hasil analisis terhadap peran sektor basis pada masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa peran sektor primer atau pertanian masih mendominasi kontribusi Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB). Menurut pendapat Sukirno (1981) perkembangan suatu daerah tidak tergantung pada besarnya peran kotanya, perkembangan kota juga ditentukan oleh potensi sumber daya yang tersedia. Interaksinya dengan wilayah sekitar membutuhkan interaksi fasilitas pelayanan. Dengan melihat perkembangan sektor unggulan yang dimiliki di Kabupaten Alor sebagai upaya dalam pembangunan sentra-sentra produksi sektor primer (pertanian) baik secara partial maupun simultan dapat dikembangkan dengan sektor-sektor lokal lainnya dapat di kelola untuk meningkatkan perkembangan wilayah belakang.

Kelemahan yang sering terjadi bahwa sektor primer (petanian) dinilai lamban dalam mendongkrak pertumbuhan di satusisi sehingga intervensi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal bersama masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan ketrampilan tenaga kerja untuk dapat menarik modal masuk dengan pola agroindustri yang bersumber dari sektor pertanian.

4. Kajian Pengaruh sektor unggulan melalui sektor basis dari kontribusi PDRB selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun untuk meningkatkan pertumbuhan daerah belakang menunjukkan bahwa pengaruh sektor basis yang terdapat di kecamatan teluk mutiara sebagai pusat pertumbuhan memiliki 7 (tujuh) sektor basis dan kecamatan Alor Barat Laut memiliki 6 (enam) sektor basis masing-masing belum berpengaruh secara signifikan terhadap sektor unggulan. Dimana pengaruh 7 (tujuh) sektor basis di kecamatan teluk mutiara secara keseluruhan tidak memiliki satupun sektor basis yang mempunyai keunggulan dalam peningkatan pertumbuhan wilayah. Sebaliknya Kecamatan Alor Barat Laut dengan 6 (enam) sektor basis secara keseluruhan hanya memiliki 4 (empat) sektor unggulan secara signifikan baik parsial maupun simultan. Kondisi tersebut dikarenakan peran dari sektor primer lebih besar kontribusinya terhadap pendapatan penduduk yang sekaligus bermata pencaharian sebagai petani lebih besar tersebar di sebagian kecamatan, sebaliknya di pusat kota Kecamatan Teluk Mutiara kontribusinya tidak merata karena lapangan usaha yang tersedia lebih besar pada sektor sekunder dan tersier tidak proporsional untuk mendorong pertumbuhan wilayah secara menyeluruh.

Perkembangan wilayah di Kabupaten Alor yang cenderung memusat pada pusat ibu kota menyebabkan adanya perbedaan pertumbuhan antara wilayah kecamatan yang kurang berkembang. Hal tersebut merupakan gambaran dari pengelolaan potensi sumber-sumber perekonomian wilayah yang belum optimal. Produktifitas dari masing-masing kecamatan akan merupakan pendukung terhadap besarnya kontribusi PDRB sektoral wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil kajian penelitian yang menelaah bahwa sektor primer ternyata masih menjadi sektor basis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kota dan daerah belakang. Tingkat potensi ekonomi wilayah dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak semua sektor basis merupakan sektor unggulan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan antara wilayah, hal ini juga dilihat dari tingkat pertumbuhan wilayah dalam periode 5 (lima) tahun menunjukkan adanya penurunan setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan adanya Integrasi arah pembangunan daerah belakang dan pengembangan sektor primer yang lebih berorientasi ekonomi (agrobisnis) sebagai suatu sistim yang mendukung pola integrasi bagi pihak-pihak terkait terutama bagi Pemerintah Kabupaten Alor dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Alor dan khususnya dalam pembuatan kebijakan pengembangan wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan wilayah di Kabupaten Alor pada umumnya perlu ditinjau kembali terhadap pendekatan struktur ruang sebagai upaya penentuan pusat-pusat pelayanan kota kecamatan. Melalui penentuan orde kota yang mengacu pada tingkat ketersediaan fasilitas sosial ekonomi yang lebih merata dan karakteristik wilayah pada setiap kecamatan khususnya yang berada di daerah belakang diharapkan mampu berkembang sejalan dengan kebutuhan aktivitas penduduk sebagai dinamika pengembangan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Upaya mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Alor sebagai upaya pembangunan harus diikuti oleh perkembangan lintas wilayah. Untuk dapat mengatasi ketimpangan maka diperlukan intervensi kebijakan pemerintah yang efektif dalam prioritas pembangunan sarana fisik yang diikuti oleh pertumbuhan ekonomi wilayah berdasarkan pada potensi lokal masing-masing kecamatan terhadap kontribusi dari sektor pembangunan sebagai momen pembangunan yang merata bagi pengembangan integrasi daerah belakang.
- c. Pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Alor melalui potensi sektor basis yang dimiliki, terutama yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan wilayah berdasarkan potensi dan karakter wilayah kecamatan masing-masing. Potensi sektor basis tersebut akan lebih efektif bila di fokuskan dalam implementasi model pengembangan kecamatan-kecamatan pada daerah belakang yang mempunyai potensi sebagai sentra produksi diarahkan untuk membentuk sistem perekonomian wilayah dengan simpul-

simpul produksi dan distribusi sebagai klaster antar wilayah dengan mengintegrasikan beberapa pusat yang berbeda melalui aksesibilitas sarana dan prasarana. Hal ini dapat dicapai dengan cara mengedepankan beberapa kecamatan dengan potensi sektor primer seperti pertanian ke dalam relasi yang lebih berorientasi ekonomi (agroindustri). Agroindustri merupakan suatu sistem yang terdiri atas sub.sistem hulu, usaha tani, hilir dan penunjang yang tidak di bahas dalam studi ini hanya merupakan masukan sebagai rekomendasi untuk topik penelitian lebih lanjut.

- d. Pada dasarnya upaya pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Alor bisa dilakukan dengan memperbaiki sektor basis ekonomi perkecamatan apabila potensi unggulan sektor basisnya adalah sektor pertanian maka arah pengembangan ekonomi lokalnya adalah sektor primer yang harus diberdayakan sebagai sumber utama pendorong pertumbuhan wilayah secara khusus bagi daerah belakang. Di samping itu strategi dalam pembangunan daerah lebih diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh sektor ekonomi dengan tujuan agar secara langsung dapat meningkatkan produktifitas bagi peningkatan pendapatan sebagian besar penduduk daerah belakang.
- e. Dana Investasi bagi pelaksanaan pembangunan yang cenderung dipusatkan di ibu kota Kabupaten harus didesentralisasikan ke wilayah-wilayah yang mampu berfungsi sebagai pusat-pusat fasilitas pelayanan, pemasaran, distribusi dan transformasi bagi penduduk sekitarnya. Hal ini dimaksudkan untuk pengembangan wilayah perdesaan yang memiliki akses seluas-luasnya dalam satu kesatuan integrasi wilayah perkotaan dan perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku:

- Aji, Firman B. 1990. *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE-UGM.
- Blakeley, Edward J. 1989. *Planning Local Economic Development, Theory dan Practice*. Sage Publication.
- Boudeville, J. 1966. *Problems of Regional Economic Planning*. Edinburgh U.P.
- Branch, Melville C. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*, Terjemahan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Daldjoeni, N. 1997. *Geografi Baru, Cetakan Kedua 1997*, Alumni. Bandung.
- Daldjoeni, N. 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Penerbit Alumni ITB.
- Dumary. 1997. *Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Eka Budianata.2003. *Humanisme Bisnis*. Catatan Praktek dan Pemikiran Penerbit Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Edisi Revisi Dosen Fakultas Ekonoi Universitas Gaja Mada Jogjakarta. 1993. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* Penerbit UPP AMK YKPN.
- Erna Widodo Mukhtar.2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Penerbit Avyrouz.
- Florens Maxi Un Bria.2001. *Introduction to The Wonders of The Canary Island, Mengenal Keajaiban Pulau Kenari, Pluralisme dan Paradigma Pembangunan Kabupaten Alor memasuki Otonomi Daerah dan Indonesia Baru Era Milinium III*. Penerbit CPH.
- Friedman, J.P and Douglas, M. 1976. *Agropolitan Development Towards a New Strategy for regional Planning in Asia*. In UNCRD.

- Glasson, John. 1983. *An Introduction Regional Planning*. London: Second Edition, Hutchinson and Co. (Plublisher) Ltd.
- Glasson John. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. terjemahan oleh Paul Sitohang. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hirschman, A.D. 1985. *Strategi Pembangunan Ekonomi*, Edisi Indonesia. FEUI. Jakarta.
- Ir. Soefaat, MCPI. 1999. *Hubungan Fungsional Teknik Sipil dengan Tata Ruang Kota dan Daerah*. Suatu Pengantar Jilid I.
- Isard, Walter. 1976. *Methods of Regional Analisis: an Introduction to Regional Sciene* Massachusset: The MIT Press.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Penerbit ITB.
- Myrdal, Gunnar. 1957. *Economic Theory In Underdeveloped Regions*. Duckworth, London.
- Oppeinheim, Nobert. 1980. *Applied Models in Urban and Regional Analysis*.
- Parr, J. B. 1973. *Growth Poles, Regional Development and Central Place Theory*. Carfax Publishing.
- Perroux, F. 1964. *La Nation De Pole de Croissance, i' economic de xxeme siecle*, edisi ke-2, halaman 143. Paris.
- Rondinelli, Denis A. 1983. *Secondary City in Developing Countries, Policies for Diffusi Urbanization*. Sage Publicatioan Inc. London.
- Raharjo, Dawam M. 1997. *Pembangunan Ekonomi Nasional Suatu Pendekatan Pemerataan, Keadilan dan Ekonomi Kerakyatan*. Intermedia. Jakarta.
- Richarson, Harry. 1974. *Dasar dan Ilmu Ekonomi Regional*, Edisi Indonesia. FEUI. Jakarta.
- Jawoto Sih Setyono. 2003. *Analisis keputusan (Decision analysis):Dasar-Dasar dan Teknik Analisis*. UNDIP. Semarang.

- Siti Sutriah Nurzaman. 2002. *Perencanaan Wilayah Di Indonesia, Pada Masa Sekitar Krisis*. Penerbit ITB.
- Soejarto, Djoko. 1981. Implikasi Faktor-faktor Perkembangan Kota Secara Fungsional. *Laporan Penelitian ITB Bandung*.
- Soejarto, Djoko. 1989. *Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau dari Segi Perencanaan Lokal*. Bandung: Departemen Planologi ITB.
- Sukirno, Sadono. 1981. Beberapa Aspek Persoalan dalam Pembangunan Daerah. FEUI. Jakarta.
- Yulianto. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung Penerbit M2S.
- Yunus, Hadi Sabari. 2001. *Struktur Tata Ruang Kota*. Jogjakarta Pustaka Pelajar.

Desertasi, Thesis, Skripsi:

- Damayanti, Maya. 1999. "Peran Semarang Sebagai Pusat Pertumbuhan Di Wilayah Tengah Indonesia". Skripsi. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Semarang.
- May, Hendarmini. 1984. *Study Pembagian Wilayah Administrasi Sebagai Usaha Penjangkuan Pemerataan Pembangunan*. Dep. Planologi, ITB. Bandung.
- Sodikin, Djuang Fadjar. 2002. *Pengaruh Kota Cirebon Terhadap Daerah Belakangnya Di Kabupaten Cirebon*. Skripsi. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro. Semarang.

Jurnal, Media Informasi Umum dan Internet:

- Putu Rudy Satiawan. Jurnal Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). 2002. *Pengelolaan Infrastruktur Kota Melalui Mekanisme Kerja Sama Antar Daerah*, Volume 2, Nomor 1.
- Jawoto Sih Setyono. 2003. Jurnal Ilmiah Perencanaan Wilayah dan Kota. *Centre-Periphery Issues And Spatial Policy In West Kalimantan Province, Indonesia*. Volume 5; Nomor 1.

Rimbowati. 2004. *Media Komunikasi Ilmu dan Profesi Bidang Kerekayasaan, Konservasi dan Realitas Ekonomi*, Tahun Ke XXIV – Edisi 2.

Peraturan dan Buku-Buku Data

Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor. 2001. *Kerja sama Dengan Pemerintah Kabupaten Alor (BAPPEDA), Alor Dalam Angka*.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2002. *Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten*, Nomor : 327/KPTS/M/2002.

Pemerintah Kabupaten Alor. 2003. *Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Tahun 2000 – 2004*, Nomor : 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 1999, *Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Alor Tahun 1999 – 2002*.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). 1997. *Pengembangan dan Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri.

Petunjuk Teknis (Juknis). 1997. *Pelaksanaan Tugas Konsultan/Program Asistensi Pengembangan Perencanaan Regional (PPR) dalam rangka Pengembangan dan Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia. 1993. No 24 Tahun 1992: *Tentang Penataan Ruang*. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. *Orientasi Manajemen Pengembangan Wilayah Terpadu*. Jakarta (tanpa tahun).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ALEXANDER SARENG KELANG, lahir di Ende/Flores pada tanggal 15 Mei 1965, sebagai anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan orang tua Claudius Sareng Kelang (Almarhum) dan Agustina Sanggudoa (Almarhumah), telah berkeluarga dengan isteri Maria Ruth Sulastri kelahiran Surabaya, 19 April 1968, berdomisili di Kabupaten Alor dengan alamat jalan Cekalang No.30, Kalabahi Kota Propinsi Nusa Tenggara Timur, Telepon (0386) 21483.

Penulis menamatkan Pendidikan di SD Katolik Putra B Naikoten II Kupang tahun 1977, SMP Negeri 1 Kupang tamat Tahun 1981, SMA Negeri I Kupang tamat tahun 1984, dan lulus sebagai Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tahun 1992, dan diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditempatkan di Kabupaten Alor tahun 1995, hingga saat ini ditempatkan sebagai staf di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Alor. September 2003 mengikuti Pendidikan Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota (MPPWK), Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang dan selesai pada April 2005 dengan judul Tesis "Sektor Unggulan Yang Berpengaruh Terhadap Peningkatan Daerah Belakang di Kabupaten Alor".